



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta guna melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi lainnya, maka dapat dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan perubahan sebagai landasan hukum perumusan, penyusunan dan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2020, serta sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 berpodaman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat analisis ekonomi dan keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai pedoman untuk:
 - a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - b. menyusun KUPA Tahun 2020;
 - c. menyusun PPAS Perubahan Tahun 2020; dan
 - d. menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Narasi Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020;

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

BAB VI : PENUTUP.

b. Matrik Perubahan RKPD Tahun 2020.

(2) Narasi Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Matrik Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, serta sebagai bahan usulan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan Rancangan APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2020 hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2020 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk I
NIP. 19631005 199208 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
A. Latar Belakang.....	I.1
B. Dasar Hukum.....	I.3
C. Maksud dan Tujuan	I.5
D. Sistematika.....	I.6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020.....	II.1
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II.1
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II.11
C. Urusan Pilihan	II.23
D. Penunjang Urusan Pemerintahan	II.27
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III.1
A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III.1
1. Tatanan Baru Beradaptasi (New Normal) dengan COVID-19	III.1
2. Kondisi Perekonomian Daerah 2020 dalam masa Pandemi COVID-19	III.2
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	III.2
b. Kemiskinan dan Pengangguran.....	III.5
c. Inflasi	III.5
d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III.6
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.....	III.7
3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020.....	III.8
B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020.....	III.9
1. Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.....	III.10
2. Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III.13
3. Kebijakan Belanja Daerah	III.15
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III.16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020.....	IV.1
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020.....	IV.1
B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020.....	IV.13
1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.....	IV.13
2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020.....	IV.15
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	IV.20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V.1
A. Kerangka Pendanaan Tahun 2020.....	V.1
B. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2020.....	V.48
BAB VI PENUTUP.....	VI.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pekalongan Pada Tahun 2019 dan 2020 (TW II).....	II.1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan.....	II.1
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II.3
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.6
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.7
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II.8
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II.10
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II.11
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.13
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Pangan	II.13
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II.14
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II.14
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.15
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II.16
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.17
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II.18
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II.18
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II.19
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II.20
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	II.20
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II.21
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Persandian.....	II.21
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	II.22
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II.22
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II.23
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II.23
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II.24
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II.25
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	II.26
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	II.26
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi.....	II.27
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan	II.27
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	II.28
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II.28
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	II.29
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	II.30
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum	II.30
Tabel 3.1	Asumsi dan Skenario Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2020.....	III.4
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.4
Tabel 3.3	Proyeksi Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	III.5
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah 2016 - 2020.....	III.5
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020	III.5
Tabel 3.6	Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	III.6

Tabel 3.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 s.d 2020 (Juta Rupiah)	III.6
Tabel 3.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 s.d 2020 (Juta Rupiah)	III.7
Tabel 3.9	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III.8
Tabel 3.10	Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020	III.9
Tabel 3.11	Perubahan Dana Transfer Daerah sesuai PMK No. 35 / 2020 Kabupaten Pekalongan.....	III.13
Tabel 3.12	Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	III.14
Tabel 3.13	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan 2020	III.15
Tabel 3.14	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	III.17
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021.....	IV.5
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Perubahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020..	V.1
Tabel 5.2	Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	V.3
Tabel 5.3	Rekap RKPD Perubahan Berdasarkan OPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	VI.10
Tabel 5.4	Rekap RKPD Perubahan Berdasarkan Urusan dan Program Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	VI.13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Isu Strategis Pasca Pandemi COVID-19 Kabupaten Pekalongan..... IV.20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 348 yang terdiri atas :

1. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
2. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain hal tersebut di atas, penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

COVID-19 sebagai bencana nasional non alam segera disikapi oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan daerah guna melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan melalui **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020** tanggal 30 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut maka ditetapkan **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020** tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020** tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang mengamanatkan Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah tahun anggaran 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 maka ditetapkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020** tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan Negara untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menyesuaikan postur APBD dengan regulasi tersebut.

Selang beberapa lama kemudian ditetapkan **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020** tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga kembali Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyesuaikan APBD Tahun 2020 dengan regulasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan **refocusing** terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan perubahan atas postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang difokuskan untuk :

1. Penanganan Kesehatan,
2. Penanganan Dampak Ekonomi, dan
3. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*).

Adanya pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan hati-hati. Hal tersebut harus mendapat perhatian serius dalam fokus belanja maupun pembiayaan Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan akibat yang sistemik dalam perekonomian. Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan Daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah, adanya saldo anggaran lebih, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, serta pengaruh dari pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 meliputi perubahan :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
3. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Perkalongan Tahun 2020 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2)perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3)penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
22. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 24);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2020 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

D. SISTEMATIKA

Sistematika perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan, serta sistematika RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2020

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 serta arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Memuat prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan Daerah tahun 2020.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan diukur dari ketercapaian indikator program pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2020, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, dari **388** indikator program pembangunan Daerah, sebanyak **215** indikator (**55,41%**) berstatus telah tercapai; **166** indikator (**42,79%**) berstatus akan tercapai; dan **7** indikator (**1,80%**) berstatus perlu upaya keras.

Secara umum, penyebab beberapa indikator berstatus perlu perhatian atau upaya keras dikarenakan sampai dengan triwulan II:

1. Kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian belum dapat dihitung;
2. Kegiatannya belum dapat dilaksanakan pada triwulan I dan II, karena menyesuaikan dengan aktivitas di luar rencana Daerah (misalnya perhitungan APK, dapat dilakukan setelah tahun ajaran sekolah baru dimulai);
3. Capaian indikator tidak dapat dihitung secara triwulan, dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan); dan
4. Perhitungan capaian berdasarkan BPS.

Rekapitulasi hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah per urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pekalongan Pada Tahun 2019 dan 2020 (TW II)

No	Status Pencapaian Indikator	2019		2020	
		Jumlah Indikator	Persentase	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Telah Tercapai	162	41,43	215	55,41
2.	Akan Tercapai	83	21,23	166	42,79
3.	Perlu Upaya Keras	146	37,34	7	1,80
Total Indikator		391	100,00	388	100,00

Secara rinci, hasil evaluasi kinerja program pembangunan Daerah untuk seluruh urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 sebagai berikut.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini							
1	APK PAUD/TK/RA (%)	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	98,59	
2	Persentase Anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD	72,00	78,00	71,00	78,00	78,00	109,86	
3	Persentase TK/RA memiliki perpustakaan (%)	45,00	32,28	40,00	32,28	32,28	80,70	
4	Persentase TK/RA layak sanitasi (%)	85,00	73,30	80,00	73,30	73,30	91,63	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,10	0,14	0,15	0,14	0,14	106,67	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,14	0,12	0,15	0,12	0,12	120,00	
3	Angka kelulusan UN SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Angka kelulusan UN SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik (%)	90,00	100,00	87,00	100,00	100,00	114,94	
6	Persentase SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	98,00	94,00	95,00	94,00	94,00	98,95	
7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,00	94,00	96,00	94,00	94,00	97,92	
8	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	80,00	79,00	79,00	79,00	79,00	100,00	
9	Persentase SD/MI Sesuai standar nasional pendidikan (%)	70,00	60,00	65	60,00	60,00	92,31	
10	Persentase SMP/MTs Sesuai standar nasional pendidikan (%)	41,00	35,00	36	35,00	35,00	97,22	
11	Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar (%)	60,00	70,71	50,00	70,71	70,71	141,42	
12	Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (%)	100,00	99,00	100,00	99,00	99,00	99,00	
13	Persentase SD/MI yang memiliki sanitasi layak (%)	90,00	63,00	80,00	63,00	63,00	78,75	
14	Persentase SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak (%)	95,00	67,00	85,00	67,00	67,00	78,82	
15	Persentase Penerima Kartu Kajian Cerdas (%)	10,38 (6000 orang)	10,00 (56.075 org)	10,25 (5900 Orang)	10,00 (56.075 org)	10,00 (56.075 org)	97,56	
3	Program Pendidikan Non Formal							
1	Angka lulus paket A (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Angka lulus paket B (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Angka lulus paket C (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Taman Bacaan masyarakat (TBM) di Desa/Kelurahan (%)	29,12	24,00	27,37	24,00	24,00	87,69	
5	Persentase lembaga kursus yang bersertifikasi (%)	68,00	56,00	63,00	56,00	56,00	88,89	
6	Persentase desa vokasi (sentra penyelenggaraan kursus) yang dikembangkan (%)	2,60	2,81	2,50	2,81	2,81	112,40	
7	Persentase lembaga PNF terakreditasi (%)	60,00	35,67	45,00	35,67	35,67	79,27	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							
1	Persentase guru PAUD, TK/RA berkualifikasi S1/D4 (%)	93,00	82,18	90,00	82,18	82,18	91,31	
2	Persentase guru SD/MI Yang berkualifikasi S1/D4 (%)	100,00	97,05	100,00	97,05	97,05	97,05	
3	Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 (%)	100,00	97,59	100,00	97,59	97,59	97,59	
4	Persentase guru PAUD, TK/RA bersertifikasi pendidik (%)	70,00	56,02	65,00	56,02	56,02	86,18	
5	Persentase guru SD/MI Yang bersertifikasi pendidik (%)	100,00	88,53	95,00	88,53	88,53	93,19	
6	Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik (%)	100,00	92,38	96,00	92,38	92,38	96,23	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
1	Persentase SD/MI terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)	91,00	98,00	90,00	98,00	98,00	108,89	
3	Persentase SD/MI yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%)	61,00	61,00	60,00	61,00	61,00	101,67	
4	Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%)	61,00	63,00	60,00	63,00	63,00	105,00	

Sumber: Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.2, capaian kinerja urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 36 indikator, 16 indikator telah tercapai dan 20 indikator akan tercapai.

2. Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DINKES								
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
1	Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1	Jumlah Posyandu Mandiri (buah)	300	417	295	417	417	141,36	
2	Jumlah Posyandu Purnama (buah)	750	562	730	562	562	76,99	
3 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan								
1	Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan (%)	95,00	97,73	92,20	97,73	97,73	106,00	
4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Persentase desa siaga aktif (%)	10,00	69,47	9,00	69,47	69,47	771,89	
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
1	Cakupan bayi mendapat vitamin A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Baduta Bawah Garis Merah (BGM)	0,50	2,7	0,60	2,7	2,7	-250,00	
6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
1	Persentase rumah dibina yang sehat	80,00	61,18	80,00	61,18	61,18	76,48	
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
1	Angka kesembuhan pasien TB Paru BTA+ (Cure Rate)	98,00	96,4	97,70	96,4	96,4	98,67	
2	Penderita Diare ditangani	100,00	100,00	97,50	100,00	100,00	102,56	
3	NCDR (New Case Detection Rate)	12,00	8,5	12,20	8,5	8,5	69,67	
4	Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate)	30,00	24,7	31,00	24,7	24,7	79,68	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Angka Kesakitan Filariasis	4,00	3,2	4,20	3,2	3,2	123,81	
6	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap pada bayi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase kejadian luar biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditanggulangi <24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan ibu hamil mendapat imunisasi TT2+	90,00	100,00	88,00	100,00	100,00	113,64	
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
1	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100,00	96,97	100,00	96,97	96,97	96,97	
2	Jumlah tenaga Kesehatan Daerah atas yang menerima Insentif (orang)	365	165 (PNS =165)	350	165 (PNS =165)	165 (PNS =165)	47,14	
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							
1	Persentase penduduk yang terintegrasi layanan JKN-BPJS	100,00	83,21	90,00	83,21	83,21	92,46	
2	Persentase penduduk miskin penerima manfaat jaminan kesehatan bersumber APBD Kabupaten (%)	25,24	17,17	20,85	17,17	17,17	82,35	
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya							
1	Persentase puskesmas dalam kondisi baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
1	Persentase yankes swasta yang terintegrasi	100,00	83,3	80,00	83,3	83,3	104,13	
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	102,04	
2	Cakupan KN lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase bayi yang diberi ASI eksklusif (0-6 bulan)	70,00	57,2	60,00	57,2	57,2	95,33	
4	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	102,04	
5	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan pelayanan ibu nifas	100,00	99,6	100,00	99,6	99,6	99,60	
13	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan							
1	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	77,79	87,00	77,79	77,79	89,41	
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas BLUD	90,00	77,79	86,00	77,79	77,79	90,45	
2	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TB sesuai standar							
7	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase anak usia pendidikan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	74,57	100,00	74,57	74,57	74,57	
10	Persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	73,92	100,00	73,92	73,92	73,92	
11	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	53,28	100,00	53,28	53,28	53,28	
12	Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100,00	91,71	100,00	91,71	91,71	91,71	
13	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,55	100,00	100,55	100,55	100,55	
RSUD KRATON								
1	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	72,00	56,49	71,00	56,49	56,49	79,56	
2	Rata-rata hari perawatan/Av Los (hari)	4,60	3,85	4,60	3,85	3,85	83,70	
3	Frekuensi pemakaian tempat tidur/BTO (kali)	59,00	53,82	59,90	53,82	53,82	89,85	
4	Jumlah efisiensi pemakaian tempat tidur /TOI (hari)	1,70	2,95	1,70	2,95	2,95	173,53	
5	Angka kematian bersih /NDR (%)	20,00	30,05	20,00	30,05	30,05	49,75	
6	Angka kematian kasar/GDR (%)	40,00	62,60	40,00	62,60	62,60	43,50	
RSUD KAJEN								
1	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	75,00	70,83	74,90	70,83	70,83	94,57	
2	Rata-rata hari perawatan/Av Los (hari)	4,31	4,32	4,32	4,32	4,32	100,00	
3	Frekuensi pemakaian tempat tidur/BTO (kali)	40,00	77,30	50,00	77,30	77,30	154,60	
4	Jumlah efisiensi pemakaian tempat tidur /TOI (hari)	1,82	1,38	1,83	1,38	1,38	75,41	
5	Angka kematian bersih /NDR (%)	15,00	23,76	15,20	23,76	23,76	43,68	
6	Angka kematian kasar/GDR (%)	36,54	45,05	36,56	45,05	45,05	76,78	
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata							
1	Persentase Pembangunan RSUD Kesesi	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	12,00	
RSUD KRATON								
1	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (%)	100,00	90,00	95,00	90,00	90,00	94,74	
2	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (%)	100,00	90,00	95,00	90,00	90,00	94,74	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RSUD KAJEN								
1	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (%)	100,00	78,88	95,00	78,88	78,88	83,03	
2	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (%)	100,00	77,74	95,00	77,74	77,74	81,83	
16 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular								
1	Cakupan pengukuran tekanan darah	100,00	74,57	100,00	74,57	74,57	74,57	
2	Persentase hipertensi / tekanan darah tinggi	6,00	22,09	6,50	22,09	22,09	-139,85	

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.3 capaian kinerja urusan kesehatan, dari sebanyak 64 target indikator diketahui bahwa 28 target indikator berstatus telah tercapai dan 34 indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase Baduta Garis Bawah Merah (GBM) dan Persentase hipertensi/tekanan darah tinggi.

Capaian indikator kinerja persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2019 adalah rendah yaitu -139,85% hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya program PIS-PK di wilayah Puskesmas dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan jika tidak ada keluhan. Capaian indikator kinerja persentase Baduta Bawah Garis Merah (BGM) tahun 2019 adalah sangat rendah yaitu (-250%) hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan memperhatikan nilai gizi konsumsi anak per hari.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DPU TARU								
1 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
1	Persentase Jalan yang ditangani (%)	100,00	92,00	96,00	92,00	92,00	95,83	
2	Persentase Jembatan yang ditangani (%)	100,00	85,00	96,00	85,00	85,00	88,54	
3	Persentase Drainase Gorong-gorong Dalam Kondisi Baik (%)	80,00	80,00	70,00	80,00	80,00	114,29	
4	Persentase Jalan yang Berdrainase(%)	15,00	16	14,00	16	16	114,29	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an								
1	Persentase pemenuhan kebutuhan alat-alat Kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur								
1	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Infrastruktur yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	13	12	13	13	108,33	
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
1	Persentase RTH Publik di kawasan perkotaan	2,00	0,27	2,00	0,27	0,27	13,50	
5 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
1	Jumlah bangunan ber-IMB per tahun (buah)	1.293	2551	1268	2551	2551	201,18	
6 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
1	Persentase Penataan lingkungan Perkotaan dan perbatasan (%)	92,00	95,00	90,00	95,00	95,00	105,56	
7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	47,79	46,71	46,71	46,71	46,71	100,00	
2	Persentase jaringan irigasi yang ditangani (%)	12,36	8,76	10,45	8,76	8,76	83,83	
8 Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob								
1	Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob (%)	35,00	24	30,00	24	24	120,00	
DINAS PERKIM LH								
9 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan U								
1	Persentase penggantian LPJU yang ada dengan Lampu LED (%)	100,00	87,00	100,00	87,00	87,00	87,00	
2	Persentase Jalan yang Sudah Terpasang LPJU (%)	43,21	61,53	35,22	61,53	61,53	174,70	

Sumber: DPU TARU Kab. Pekalongan, DINAS PERKIM LH Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.4, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 14 indikator diketahui bahwa 8 target indikator berstatus telah tercapai, dan 6 indikator akan tercapai.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman								
1	Persentase sarana dan prasarana dasar permukiman yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program Lingkungan Sehat Perumahan								
1	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (%)	100,00	86,00	100,00	86,00	86,00	86,00	
3 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan								
1	Persentase infrastruktur di kelurahan yang terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
1	Terbangunnya Jaringan Air Bersih bagi MBR per tahun (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi							
1	Persentase rumah tangga yang belum dilayani air minum (%)	5,20	13,49	0,00	13,49	13,49		
2	Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi (%)	29,16	15,59	0,00	15,59	15,59		
6	Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman							
1	Persentase taman dan pemakaman umum yang terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
1	Persentase Pelayanan Persampahan di Kabupaten Pekalongan (%)	16,00	34,50	15,00	34,50	34,50	230,00	

Sumber: DINAS PERKIM LH Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.5, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak 8 target, dan 5 indikator target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 indikator akan tercapai.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SATPOL PP DAN DAMKAR							
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
1	Persentase terselenggaranya kegiatan keamanan Pejabat dalam Acara Resmi (Prosentase)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (Persen)	50,00	40,00	45,00	40,00	40,00	88,89	
3	Persentase Penugasan Anggota Linmas LRC (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa							
1	Persentase Pembinaan/sosialisasi Linmas desa (%)	50,00	30,00	40,00	30,00	30,00	75,00	
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)							
1	Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbub							
1	Persentase Penegakan Perda dan Perbub (Persen)	50,00	40,00	45,00	40,00	40,00	88,89	
5	Program Peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							
1	Persentase tanggap darurat terhadap pencegahan bahaya kebakaran (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KESBANG LINMAS								
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	Persentase Kader Bela Negara yang terbina	100,00	74,37	90,74	74,37	74,37	81,96	
2	Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi pemahaman dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pelajar/ mahasiswa, ormas, aparat desa/kelurahan, guru PPKN SLTA, toga, toda, tomas (%)	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase pelaksanaan pembinaan/ sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan budaya bagi guru PPKn, Ormas/LSM, PTN/PTS dan aparatur pemerintah, tomas, toga dan generasi muda	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan							
1	Persentase pembentukan FKDM. Tk Desa/kel	100,00	21,40	80,70	21,40	21,40	26,52	
2	Persentase pembentukan FPBI. Tk Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan							
1	Persentase terselenggaranya Pengamanan Acara Pemda, Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase terselenggaranya Pengamanan Kunjungan Tamu VIP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase tersusunnya laporan kejadian aktual anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menjaga kondusifitas wilayah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban (%)	100,00	0	100,00	0	0	0,00	
5	Persentase konflik sosial yang tertangani menurut Dokumen Rencana Aksi Terpadu(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase laporan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil							
1	Persentase Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas/LSM yang diterbitkan (%)	85,00	42,47	80	42,47	42,47	53,09	
2	Persentase Ormas/LSM/ LNL yang aktif (%)	100,00	43,85	84,07	43,85	43,85	52,16	
3	Persentase pembinaan Ormas/LSM/LNL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat							
1	Persentase Pembinaan politik di daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase peningkatan SDM pengurus parpol (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pilkada (%)	75,00	78,56	74,00	78,56	78,56	106,16	

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan dan KESBANGPOL Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.6, capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 25 target indikator, sebanyak 17 target indikator berstatus telah tercapai, 7 target akan tercapai, 1 indikator perlu perhatian/upaya keras pada tahun 2020 yaitu persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban.

Capaian indikator kinerja persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban (%) adalah sangat rendah yaitu sebesar 0% hal ini disebabkan pada tahun 2019 sudah tidak diadakan kegiatan Pelatihan Bidang Keamanan dan Ketertiban bagi Anggota Kominda, karena Kegiatan Bintek Kominda berhenti pada tahun 2018. Hal ini mengacu pada amanat Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

6. Sosial

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan sosial sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DINAS SOSIAL								
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya							
1	Persentase fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)	0,430	0,37	0,35	0,37	0,37	105,71	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
1	Persentase anak yang mendapatkan layanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat	100,00	75,65	78,53	75,65	75,65	96,33	
2	Persentase LUT yang mendapatkan layanan sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat	44,64	29,02	31,25	29,02	29,02	92,86	
3	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)							
1	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (lokasi)	19	19	19	19	19	100,00	
4	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma							
1	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat	42,11	18,22	31,82	18,22	18,22	57,26	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)							
1	Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat	155	155	155	155	155	100,00	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
1	Persentase Penguatan PSKS dalam penanganan PMKS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial							
1	Jumlah peserta bimbingan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	750	755	750	755	755	100,67	
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
1	Jumlah Fasilitasi Layanan Santunan Kematian bagi Fakir Miskin (Jiwa)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	
9	Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial							
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
10	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam							
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan logistik penampungan sementara dan phisiko sosial pada saat pasca bencan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana							
1	Persentase sarana dan prasarana yang terehabilitasi dan terekontruksi pasca bencana dalam 1 tahun (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Dinsos Kab. Pekalongan, BPBD Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.7, capaian kinerja urusan sosial sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 11 indikator diketahui bahwa 8 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 indikator berstatus akan tercapai.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.8.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
1	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	40,00	54,69	35,00	54,69	54,69	156,26	
2	Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (%)	95,80	70,90	95,60	70,90	70,90	74,16	
2	Program Peningkatan kesempatan Kerja							
1	Jumlah AKAD dan AKAN	1.535	2,866	1.500	2,866	2,866	8,93	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	28,00	58,66	28,00	58,66	58,66	209,50	
3	Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja)	41,44	34,64	39,93	34,64	34,64	86,75	
4	Jumlah bursa tenaga Kerja (unit)	30	32	29	32	32	110,34	
3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
1	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	95,00	100	93,00	100	100	107,53	
2	Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (%)	38,50	55,12	37,51	55,12	55,12	146,95	
3	Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Kesehatan (%)	32,70	35,95	31,70	35,95	35,95	113,41	
4	Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun (%)	100,00	102	105,00	102	102	102,86	
5	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	36,00	34,00	35,00	34,00	34,00	97,14	
6	Persentase kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan (%)	0,328	0,17	0,329	0,17	0,17	148,33	
7	Persentase kasus kecelakaan kerja di luar perusahaan (%)	0,215	0,215	0,216	0,215	0,215	100,46	
8	Persentase Kasus kecelakaan kerja yang meninggal dunia (%)	0,009	0,009	0,110	0,009	0,009	191,82	
9	UMK ditentukan berdasarkan : $UMK = \frac{UMK_{skr} + (UMK_{skr} \times (infasi + pertumbuhan\ ekonomi))}{1}$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama di perusahaan	12,00	27,61	11,50	27,61	27,61	240,09	
11	Penerapan struktur dan skala upah	20,00	60,00	16,00	60,00	60,00	375,00	

Sumber: Dinas PM, PTSP, dan Nakertrans Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.8, capaian urusan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 17 target indikator, sebanyak 14 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 target indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.9

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan								
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung PPPA	1	0	1	0	0	0,00	
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
1	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa (%)	27,54	57,38	20,98	57,38	57,38	273,50	
2	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase PD yang memanfaatkan data SIGA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rasio desa/kel menuju Kab. Layak Anak	17,54	63,51	14,04	63,51	63,51	452,35	
5	Persentase forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase PD yang mengintegrasikan PUG dan PUHA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak								
1	Persentase petugas terlatih penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan (%)	66,36	38,86	52,47	38,86	38,86	74,06	
2	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0,10	0	0,15	0	0	200,00	
4 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan								
1	Persentase perempuan yang terlatih usaha (%)	20,00	53,46	18,00	53,46	53,46	297,00	

Sumber: Dinas PMD, P3A dan PPKB Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.9, capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari sebanyak 10 target indikator, terdapat 8 target indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung PPPA.

3. Pangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pangan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.10.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	TAHUN 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan								
1	Jumlah Pengelolaan cadangan pangan pemerintah (ton)	18,00	17,40	16	17,40	17,40	108,75	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	TAHUN 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (Komoditas; Pasar; Bulan)	9;7;12	9;7;12	9;7;12	9;7;12	9;7;12	100,00	
3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (%)	66,31	45,61	55,78	45,61	45,61	81,77	
4	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	73,68	68,42	68,42	68,42	68,42	100,00	
2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Konsumsi energi dan protein per kapita							
1	'-Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.150	2.100,00	2.150,00	2.100,00	2.100,00	97,67	
2	'-Protein (Gr/Kap/Hari)	57,00	62,37	57,00	62,37	62,37	109,42	

Sumber: DKPP Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.10, capaian kinerja urusan Pangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 6 target indikator sampai dengan triwulan II tahun 2020, terdapat 4 indikator sudah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

4. Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.11.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah								
1	Persentase Penyediaan lahan untuk kepentingan umum (%)	100,00	20,00	100,00	20,00	20,00	20,00	

Sumber: DPU Taru Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.11, capaian kinerja urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2020, diketahui bahwa 1 target indikator berstatus perlu upaya keras yaitu persentase penyediaan lahan untuk kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.12.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH								
1	Persentase Bank Sampah Desa	100,0	80,00	90,00	80,00	80,00	88,89	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase sarana pengolahan limbah (%)	100,0	92,00	96,00	92,00	92,00	95,83	
3	Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (%)	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH								
1	Persentase penyediaan informasi LH (%)	100,0	71,42	80,95	71,42	71,42	88,23	
2	Persentase desa yang tersosialisasi kelestarian lingkungan hidup(%)	17,65	13,24	15,44	13,24	13,24	85,75	
3	Persentase pembentukan sekolah adiwiyata (%)	100,00	72,00	85,71	72,00	72,00	84,00	
4	Persentase pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: DINAS PERKIM LH Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.12, capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 target indikator, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 5 target indikator berstatus akan tercapai.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.13.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan								
1	Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)	100,00	95,57	99,00	95,57	95,57	96,54	
2	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	75,00	100,00	70,00	100,00	100,00	142,86	
3	Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran	100,00	91,94	95,00	91,94	91,94	96,78	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk (%)	95,00	59,09	90,00	59,09	59,09	65,66	
5	Persentase Kepemilikan KTP EL - Pemula Bagi Wajib KTP EL- Pemula	100,00	97,17	100,00	97,17	97,17	97,17	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	100,00	71,59	100,00	71,59	71,59	71,59	

Sumber: DINDUKCAPIL Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.13, capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 6 indikator, sebanyak 1 target telah tercapai, dan 5 target akan tercapai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.14.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
1	Persentase kelompok pengelola sarana prasarana desa (%)	100,00	89,37	95,00	89,37	89,37	94,07	
2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
1	Persentase UP2K yang aktif	44,91	47,12	39,65	47,12	47,12	118,84	
2	Persentase BUMDes yang terbentuk (%)	42,28	38,60	36,76	38,60	38,60	105,01	
3	Persentase pasar desa yang berfungsi (%)	100,00	92,13	93,75	92,13	92,13	98,27	
4	Jumlah UED – SP yang aktif (unit)	10	21	8	21	21	262,50	
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								
1	Persentase swadaya masyarakat (%)	19,50	18,88	19,50	18,88	18,88	96,82	
2	Persentase posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase PKK aktif di kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Program Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan								
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ (LPMD) yang aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase kelompok binaan LPM yang aktif (%)	61,27	100,00	55,15	100,00	100,00	181,32	
3	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih (%)	80,00	84,00	73,09	84,00	84,00	114,93	
4	Persentase Pengurus dan Anggota PKK yang terlatih (%)	82,19	97,50	72,22	97,50	97,50	135,00	
5	Jumlah kelompok masyarakat desa yang aktif (%)	73,16	100,00	65,81	100,00	100,00	151,95	
5 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)								
1	Persentase pemanfaat TTG yang aktif (%)	15,86	14,28	13,79	14,28	14,28	103,55	
6 Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar								
1	Jumlah kebijakan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal	4	1	3	1	1	33,33	
2	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok	19	11	16	11	11	68,75	
7 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan								
1	Jumlah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang disusun	2	3	2	3	3	150,00	
2	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok	20	18	20	18	18	90,00	
8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
1	Persentase perangkat desa yang terlatih (%)	100,00	82,67	91,92	82,67	82,67	89,94	
9 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa								

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dibina (%)	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	111,11	

Sumber: DPMDP3A DAN PPKB Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.14, capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 20 indikator kinerja, sebanyak 13 target indikator berstatus telah tercapai, dan 7 indikator akan tercapai.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.15.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga							
1	Persentase kelompok tribina terlatih (%)	90,72	78,87	83,15	78,87	78,87	94,85	
2	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi / DO (%)	9,10	11,46	9,22	11,46	11,46	75,70	
3	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga (%)	51,19	41,55	46,19	41,55	41,55	89,95	
4	Persentase Balita yang mempunyai KKA (%)	100,00	38,87	94,54	38,87	38,87	41,11	
5	Persentase kelompok BKB HI (%)	28,76	21,89	25,23	21,89	21,89	86,76	
6	Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,24	2,09	2,25	2,09	2,09	92,89	
8	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun (%)	2,31	1,64	2,32	1,64	1,64	129,31	
9	Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	65,50	79,70	65,25	79,70	79,70	122,15	
10	Persentase anggota UPPKS yang ber-KB (%)	84,50	85,62	84,25	85,62	85,62	101,63	

Sumber: DPMDP3A DAN PPKB Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.15, capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tahun 2020, terdapat 4 indikator telah tercapai, dan 6 indikator akan tercapai.

9. Perhubungan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.16.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
1	Persentase sarana dan prasarana terminal dengan kondisi yang baik (%)	100,00	93,00	95,00	93,00	93,00	97,89	
2	Persentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	80,00	60,00	70,00	60,00	60,00	85,71	
2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan								
1	Jumlah capaian uji kir kendaraan bermotor	7.798	7.767	7.427	7.767	7.767	104,58	
2	Rasio ijin trayek (jumlah jaringan trayek yang terlayani/ jumlah jaringan trayek yang tersedia)	93,30	80,00	86,60	80,00	80,00	92,38	
3 Program Peningkatan Pengamanan dan pengendalian Lalu Lintas								
1	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan (%)	100,00	91,00	95,00	91,00	91,00	95,79	
4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
1	Persentase ketersediaan alat uji kendaraan bermotor (%)	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	90,00	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.16, capaian kinerja urusan Perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 6 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus akan tercapai.

10. Komunikasi dan Informatika

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.17.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
1	Persentase optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi layanan publik (%)	100,00	90,00	95,00	90,00	90,00	94,74	
2	Jumlah sistem informasi Pemerintah kabupaten (sistem)	11	10	10	10	10	100,00	
3	Persentase kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di	100,00	80,00	90,00	80,00	80,00	88,89	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bidang Kominfo (%)							
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa							
1	Persentase pembinaan anggota forum komunikasi media Tradisional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase kerjasama informasi dan media massa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi							
1	Persentase pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (%)	100,00	80,00	90,00	80,00	80,00	88,89	
4	Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi							
1	Persentase perempuan yang terlatih usaha (%)	100,00	0	100,00	0	0	0	
2	Persentase pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.17, capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari total 9 target indikator pada urusan komunikasi dan informasi terdapat sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu persentase perempuan yang terlatih usaha (%).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.18.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif							
1	Persentase jumlah usaha mikro terhadap jumlah UMKM (%)	88,88	83,79	88,60	83,79	83,79	94,57	
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM							
1	Jumlah UKM yang berkembang (unit)	44.980	44.724	44.930	44.724	44.724	99,54	
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
1	Jumlah UKM binaan (unit)	788	775	738	775	775	105,01	
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
1	Jumlah koperasi/KUD (unit)	620	586	605	586	586	96,86	
2	Persentase koperasi aktif (%)	52,00	66,55	51,00	66,55	66,55	130,49	
3	Persentase koperasi Sehat (%)	28,50	30,20	28,20	30,20	30,20	107,09	
5	Program Peningkatan kualitas Pembiayaan koperasi							
1	Persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan (%)	33,00	31,54	32	31,54	31,54	98,56	

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.18, capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 target indikator, 3 indikator telah tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai.

12. Penanaman Modal

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.19.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
1	Jumlah penyelenggaraan promosi dan kerja sama investasi (kali)	6	5	6	5	5	83,33	
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
1	Jumlah Pelayanan perijinan dan non Perijinan melalui PTSP (ijin)	4.344	5.724	4.259	5.724	5.724	134,40	

Sumber: Dinas PMPTSP DAN NAKERTRANS Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.19, capaian kinerja urusan penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 2 indikator, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, dan 1 target indikator akan tercapai.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.20.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda								
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (%)	78,00	72,72	78,00	72,72	72,72	93,23	
2	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi	6	3	6	3	3	50,00	
3	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Nasional	2	2	2	2	2	100,00	
4	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina (%)	76,19	81,25	76,19	81,25	81,25	106,64	
5	Jumlah pemuda pelopor berprestasi tingkat Kab/Prov/Nas	13	10	13	10	10	76,92	
6	Jumlah kelompok wirausaha pemuda	19	19	18	19	19	105,56	
7	Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	290	200	240	200	200	83,33	
2 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga								
1	Persentase organisasi olahraga yang aktif (%)	81	70,00	77	70,00	70,00	90,91	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap atlet, pelatih dan wasit cabang olahraga (%)	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	

Sumber: DINPORAPAR Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.20, capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 9 target indikator, sebanyak 4 target indikator telah tercapai, dan 5 target indikator berstatus akan tercapai.

14. Statistik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Statistik sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.21.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah							
1	Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala kabupaten (jenis)	4	4	4	4	4	100,00	

Sumber: Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.21, capaian kinerja urusan statistik sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sejumlah 1 target indikator berstatus telah tercapai.

15. Persandian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Persandian sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.22.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah							
1	Ketersediaan SOP Persandian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	
2	Tingkat Kapasitas SDM Persandian	3	3	3	3	3	100,00	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP Persandian	100,00	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	

Sumber: Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.22, capaian kinerja urusan Persandian sampai dengan triwulan II tahun 2020, 2 target indikator berstatus telah tercapai, 1 target akan tercapai.

16. Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.23.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Nilai Budaya								
1	Jumlah penyelenggaraan pegelaran, festival seni dan budaya (keg)	85	101	84	101	101	120,24	
2	Cakupan SDM Kesenian (%)	68,00	62,00	66,00	62,00	62,00	93,94	
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
1	Jumlah Grup Kesenian yang dibina (unit)	119	109	114	109	109	95,61	
2	Jumlah Misi Kesenian (kali)	19	13	16	13	13	81,25	

Sumber: Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.23, capaian kinerja urusan kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 indikator berstatus akan tercapai.

17. Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.24.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
1	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan	45.216	50.414	44.116	50.414	50.414	114,28	
2	Persentase SDM Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek Perpustakaan (%)	100,00	86,00	95	86,00	86,00	90,53	
3	Persentase pengembangan perpustakaan (%)	53,33	65,20	52,63	65,20	65,20	123,88	
4	Persentase Perpustakaan desa yang memenuhi standard perpustakaan (%)	50,00	44,00	45,00	44,00	44,00	97,78	

Sumber : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.24, capaian kinerja urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 4 indikator urusan perpustakaan, sebanyak 2 target telah tercapai, dan 2 target akan tercapai.

18. Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.25.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan								
1	Persentase Penyusunan Pedoman Kearsipan	100,00	84,61	81,25	84,61	84,61	104,14	
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah								
1	Persentase alih media arsip tekstual permanen ke media elektronik (%)	20,00	18,00	17,50	18,00	18,00	102,86	
2	Jumlah Penyelamatan Arsip Tekstual	153.233	224.891	143.233	224.891	224.891	157,01	
3	Persentase PD yang melakukan pengelolaan arsip secara baik (%)	43,48	60,00	39,13	60,00	60,00	153,34	
3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan								
1	Persentase PD yang terfasilitasi sarana prasarana arsip (%)	100,00	95,50	95,00	95,50	95,50	100,53	
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
1	Jumlah pengunjung/pengguna arsip (kunjungan per tahun)	100,00	93	95	93	93	97,89	
2	Persentase SDM yang memiliki kompetensi pelayanan arsip sesuai standard (%)	88,89	71,00	66,67	71,00	71,00	106,49	

Sumber : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.25, capaian kinerja urusan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sebanyak 7 target indikator, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, dan 1 target indikator berstatus akan tercapai.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.26.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Perikanan Budidaya								
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tambak (ton)	8.160,67	7.129,89	7.626,80	7.129,89	7.129,89	93,48	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kolam (ton)	1.475,32	1.269,53	1.366,03	1.269,53	1.269,53	92,94	
3	Jumlah Produksi Benih BBI (ekor)	1.310.614	1.230.460	1.248.203	1.230.460	1.230.460	98,58	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.500,00	5.305,58	4.245,30	5.305,58	5.305,58	124,98	
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							
1	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	24,20	23,32	23,50	23,32	23,32	99,23	
4	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar							
1	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (ton)	293,50	212,23	276,90	212,23	212,23	76,64	
5	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan							
1	Prosentase pemenuhan Data Statistik Kelautan dan Perikanan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.26, capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 target indikator, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator berstatus akan tercapai.

2. Pariwisata

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.27.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
1	Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Program Pengembangan Kemitraan							
1	Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.27, capaian urusan Pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2020, terlihat bahwa dari 3 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai.

3. Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.28.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
1	Persentase penyelenggaraan pelatihan Gapoktan PUAP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan								
1	Produktivitas bahan pangan utama lokal:							
	- Padi (kuintal/ha)	52,54	52,86	52,52	52,86	52,86	100,65	
	- Jagung (kuintal/ha)	46,84	53,32	46,34	53,32	53,32	115,06	
	- Kedelai (kuintal/ha)	11,05	14,64	11,03	14,64	14,64	132,73	
2	Produksi komoditas hortikultura:							
	- Durian (kuintal)	105.979	102.961	104.881	102.961	102.961	98,17	
	- Mangga (kuintal)	124.614	125.824	120.984	125.824	125.824	104,00	
	- Pisang (kuintal)	224.052	182.647	219.659	182.647	182.647	83,15	
	- Rambutan (kuintal)	56.763	55.654,00	56.201	55.654,00	55.654,00	99,03	
	- Kentang (ton)	15.591	14.994,00	15.285	14.994,00	14.994,00	98,10	
	- Bawang daun (ton)	5.033	4.877,20	4.784	4.877,20	4.877,20	101,95	
	- Alpukat (kuintal)	2.568	5.719,00	2.543	5.719,00	5.719,00	224,89	
	- Manggis (kuintal)	8.051	7.710,00	7.971	7.710,00	7.710,00	96,73	
	- Cabe (kuintal)	11.444	5.670,00	11.348	5.670,00	5.670,00	49,96	
	- Jambu Air (kuintal)	12.482	3.219,00	12.359	3.219,00	3.219,00	26,05	
3 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan								
1	Persentase peningkatan pengetahuan pelaku agribisnis (%)	50,13	47,09	47,37	47,09	47,09	99,41	
2	Persentase penyelenggaraan event-event promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								
1	Produksi komoditas Perkebunan:							
	- Kelapa (butir)	21.719.509	20.972.836	20.884.143	20.972.836	20.972.836	100,42	
	- Tebu (kuintal)	1.417.226	401.316	1.362.718	401.316	401.316	29,45	
	- Cengkeh (ton)	229.72	550,47	220,88	550,47	550,47	249,22	
	- Kopi (ton)	543,00	493,57	522,00	493,57	493,57	94,55	
5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan								
1	Persentase Penerapan teknologi bagi petani(%)	42,11	31,58	36,84	31,58	31,58	85,72	
6 Program peningkatan produksi hasil peternakan								
1	Populasi produksi komoditas peternakan utama							
	- sapi potong (ekor)	22.682	22.619,00	22.617	22.619,00	22.619,00	100,01	
	- kambing (ekor)	51.247	51.073,00	51.070	51.073,00	51.073,00	100,01	
2	Produksi ternak							
	- daging (Kg)	9.357.567	8.892.964	9.072.772	8.892.964	8.892.964	98,02	
	- telur (Kg)	5.730.821	5.622.421	5.648.952	5.622.421	5.622.421	99,53	
	- susu (liter)	357.948	364.982	357.806	364.982	364.982	102,01	
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak								
1	Persentase penanganan penyakit hewan (%)	83,00	72,22	77,00	72,22	72,22	93,79	
8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan								
1	Persentase Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian/Perkebunan (%)	78,44	91,11	77,34	91,11	91,11	117,80	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :



: Telah Tercapai;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.28, capaian kinerja urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 28 target indikator sampai dengan tahun 2020 Triwulan II, sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai, dan 14 indikator akan tercapai.

4. Perdagangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.29.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							
1	Jumlah UTTP yang ditera	425	2.062	406	2.062	2.062	507,88	
2	Persentase penyelesaian sengketa konsumen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor							
1	Nilai Ekspor (US \$)	30.500	32.910,08	30.400	32.910,08	32.910,08	108,26	
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri							
1	Jumlah Unit Usaha Perdagangan (unit)	12.000	14.281	11.850	14.281	14.281	120,51	
4	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional							
1	Jumlah Pasar dengan kondisi sehat (pasar)	9	8	9	8	8	88,89	
2	Persentase realisasi retibusi pasar terhadap target (%)	100,00	80,82	100,00	80,82	80,82	80,82	

Sumber: Diperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.29, capaian kinerja urusan perdagangan sampai dengan tahun 2020 triwulan II, dari sebanyak 6 target indikator, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, dan 2 indikator berstatus akan tercapai.

5. Perindustrian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.30.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							
1	Cakupan Bina Kelompok (%)	81,00	101,27	80,00	101,27	101,27	126,59	
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
1	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang (%)	28,00	24,87	26,00	24,87	24,87	95,65	

Sumber: Diperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.30, capaian kinerja urusan perindustrian sampai dengan tahun 2020 triwulan II, dari sebanyak 2 target indicator, 1 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

6. Transmigrasi

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana tabel 2.31.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi								
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigran (KK)	5	2	5	2	2	40,00	
2	Jumlah calon transmigran/animo (KK)	14	12	12	12	12	100,00	

Sumber: Dinas PM, PTSP, dan Nakertrans, Kab. Pekalongan 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.31, capaian kinerja urusan Transmigrasi sampai dengan tahun 2020 triwulan II, dari sebanyak 2 target indikator, 1 indikator berstatus telah tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi Perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 2.32.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan Perkada (dokumen)	2	2	2	2	2	100,00	
2	Persentase wanita dalam partisipasi musrenbang (%)	30,00	38,09	30,00	38,09	38,09	126,97	
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
1	Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti PD (%)	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	
2	Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina	7:7	6:7	6:7	6:7	6:7	100,00	
3 Program Perencanaan Sosial Budaya								
1	Persentase hasil kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (%)	100,00	96,77	90,00	96,77	96,77	107,52	
2	Persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (%)	85,00	75,00	80,00	75,00	75,00	93,75	
4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang								
1	Persentase dokumen perencanaan penunjang prasarana wilayah SDA dan Tata Ruang yg ditindaklanjuti (%)	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 3.32, capaian kinerja fungsi penunjang Perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2020 terlihat bahwa dari sebanyak 7 indikator, diketahui bahwa 6 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

2. Keuangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 2.33.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase capaian PAD terhadap target	100,00	83,66	100,00	83,66	83,66	83,66	
3	Ketepatan penyusunan Raperda APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program Pengelolaan Aset Daerah								
1	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab. Pekalongan	60,00	42,54	57,00	42,54	42,54	74,63	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

 : Telah Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.33, capaian kinerja fungsi penunjang Keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari sejumlah 4 target indikator kinerja, 2 berstatus telah tercapai, dan 2 indikator akan tercapai.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 2.34.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
1	Persentase terpeliharanya aplikasi dan website kepegawaian selaras dengan terwujudnya pengelolaan arsip pegawai serta akurasi database yang tertib dan profesional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Terlayannya pengajuan Karis, karsu dan karpeg	4.100	3.530	4.100	3.530	3.530	86,10	
3	Tingkat pengelolaan arsip kepegawaian yang tertib dan profesional (OPD)	80,00	75,00	78,00	75,00	75,00	96,15	
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
1	Tertibnya urusan kepegawaian PD	237	279	237	279	279	117,72	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pahaminya PNS terhadap peraturan perundang - undangan	100,00	78	80	78	78	97,50	
3	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase penanganan pelanggaran disiplin dan ijin perceraian (%)	100,00	67,81	100,00	67,81	67,81	67,81	
6	Persentase PNS yang tepat untuk menduduki jabatan pimpinan tertinggi serta terwujudnya obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan, pemberhentian jabatan struktural	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	104,17	

Sumber: BKD Diklat Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.34, capaian kinerja fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari sebanyak 9 target indikator, 5 indikator telah tercapai dan 4 indikator akan tercapai.

4. Penelitian dan Pengembangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 2.35.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penelitian dan Pengembangan							
1	Jumlah hasil riset	6	11	6	11	11	183,33	
2	Persentase Penerapan Hasil Riset (%)	30,00	54	30,00	54	54	180,00	
3	Jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi masyarakat	5	6	5	6	6	120,00	
4	Persentase hasil tindak lanjut kerja sama kelitbangan	33,33	80	33,33	80	80	240,02	

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.35, capaian kinerja fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, sampai dengan triwulan II tahun 2020 terlihat bahwa dari sebanyak 4 indikator, diketahui bahwa 4 indikator berstatus tercapai.

5. Pengawasan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 3.36.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan								
1	Persentase pejabat fungsional P2UPD dan Auditor yang bersertifikat kompetensi (%)	100,00	82,86	93,33	82,86	82,86	88,78	
2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
1	Persentase jumlah perbub di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan (kebijakan, pemeriksaan, evaluasi, reviu, monitoring, asistensi) (%)	100,00	20,00	90,00	20,00	20,00	22,22	
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah								
	Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)							
	- BPK (%)	93,00	92,2	92,00	92,2	92,2	100,22	
	- Provinsi (%)	96,00	96,00	95,50	96,00	96,00	100,52	
	- Kabupaten (%)	98,00	91,01	97,50	91,01	91,01	93,34	

Sumber: Inspektorat Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :

: Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.36, capaian kinerja fungsi penunjang pengawasan, sampai dengan triwulan II tahun 2020 terlihat bahwa dari sebanyak 5 indikator, diketahui bahwa 2 indikator berstatus tercapai, dan 3 indikator akan tercapai.

6. Pemerintahan Umum

Evaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana tabel 2.37.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SETDA								
1 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM								
1	Persentase perkara yang terselesaikan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase perkara yang terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1	Persentase Raperda yang menjadi Perda tepat waktu (%)	100,00	88,00	100,00	88,00	88,00	88,00	
2	Persentase Raperbup yang menjadi Perbup tepat waktu (%)	100,00	167,00	100,00	167,00	167,00	167,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum								
1	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO	4	0	4	0	0	0,00	
2	Jumlah UPP yang melakukan pengukuran index Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	44	2	44	44	2200,00	
3	Persentase meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (%)	50	150	45	150	150	333,33	
4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah								
1	Tingkat pelayanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100,00	102,00	100,00	102,00	102,00	102,00	
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat								
1	Persentase Anak dari keluarga miskin yang dkhitan* (%)	100,00	45,50	82,14	45,50	45,50	55,39	
2	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur								
7 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam								
1	Jenis potensi SDA yang teridentifikasi	2	2	2	2	2	100,00	
8 Program Pengendalian Pembangunan								
1	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Kab, Bantuan Kab/Kota dan TP(%)	100,00	94,24	100,00	94,24	94,24	94,24	
2	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui ULP (%)	100,00	97,69	100,00	97,69	97,69	97,69	
3	Persentase pemahaman PD terkait peraturan pengadaan barang dan jasa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SEKRETARIAT DPRD								
9 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								
1	Persentase pencapaian peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	100,00	97,00	100,00	97,00	97,00	97,00	
KECAMATAN								
10 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan								
1	Persentase organisasi pemuda yang dibina di tingkat kecamatan(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase terlaksananya promosi produk unggulan lokal tingkat kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Terlaksananya Lomba tertib administrasi desa (%)	100,00	21,05	80,00	21,05	21,05	26,31	
4	Persentase terlaksananya fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangkec (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase terlaksananya pembinaan PKK di setiap desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan								
1	Persentase sarana dan prasarana di kelurahan yang terbangun(%)	70,00	50,00	60,00	50,00	50,00	83,33	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Tingkat Capaian Realisasi TW II terhadap target 2020	Status Capaian
				Target	Realisasi TW I	Realisasi TW II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase terlaksananya fasilitasi lembaga di kalurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Setda, Setwan, 19 Kecamatan Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Keterangan :



: Telah Tercapai;



: Akan Tercapai;



: Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel 2.37, capaian kinerja fungsi penunjang pemerintahan umum, sampai dengan triwulan II tahun 2020 terlihat bahwa dari sebanyak 24 indikator, diketahui bahwa 16 indikator berstatus tercapai, 7 indikator akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pada tahun 2020, kebijakan ekonomi Daerah diarahkan dan didorong untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan yaitu **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan"**, dengan prioritas pada penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM, percepatan penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang *good and clean governance*.

Tantangan dan prospek perekonomian yang dihadapi di tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terutama dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah dan nasional. COVID-19 telah merubah arah perekonomian global dan nasional secara drastis. Optimisme pemulihan global seketika berubah menjadi ancaman resesi pasca pandemi COVID-19. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2020 sebelum COVID-19 sebesar 3,30% (APBN 2020). Namun setelah pandemi COVID-19 proyeksi 2020 menjadi 2,30% (berat) dan minus 0,40% (sangat berat). Hal ini mengakibatkan timbulnya potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan baik kemiskinan dan pengangguran.

Sama halnya dengan dunia dan negara-negara lain, ancaman COVID-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan. Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus **dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan** melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*. Dengan berbagai langkah *extraordinary*, pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan tidak menuju **skenario sangat berat**.

1. Tatanan Baru Beradaptasi (New Normal) dengan COVID-19

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19 yang disebut dengan **"Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19"**

Definisi *new normal* menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Sampai dengan saat ini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Satu-satunya cara yang masyarakat dapat lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan harus dapat menjaga produktivitas agar dalam situasi seperti ini dapat tetap produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru.

Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis kepada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Pola kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Kepada setiap pengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah dan tempat ibadah harus melakukan memperhatikan aspek ini, dan diharapkan menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat.

Untuk merealisasikan skenario new normal, pemerintah pusat dan daerah telah bekerjasama dengan seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan.

2. Kondisi Perekonomian Daerah 2020 dalam masa Pandemi COVID-19

COVID-19 berimbas besar bagi ekonomi nasional, banyak masyarakat berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dukungan pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindari lonjakan pengangguran dan angka kemiskinan. Skenario berat lebih dari 2,92 juta orang akan menganggur. Sedangkan skenario paling berat akan ada lebih dari 5,23 juta orang akan menganggur di tahun 2020 (data Kementerian Keuangan). Tak hanya itu, meluasnya kekhawatiran masyarakat dan investor terhadap COVID-19, menyebabkan minat investasi juga akan turun signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Proyek-proyek investasi yang dikelola pemerintah dan BUMN akan tetap berlangsung, meskipun juga akan turun sejalan dengan himbuan *social distancing* bagi para pekerja.

Satu-satunya yang berpotensi menopang ekonomi domestik tahun ini adalah belanja pemerintah. Penanganan COVID-19 mengharuskan **pemerintah pusat dan daerah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien COVID-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif)**. Stimulus fiskal juga menjadi kunci utama dalam meredam dampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang terkena dampak paling besar

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dampak Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada sosial dan ekonomi. Beberapa daerah kabupaten/kota mulai memberlakukan karantina wilayah dan pembatasan pergerakan warga di wilayahnya. Beberapa aspek perekonomian di Jawa Tengah yang terdampak langsung dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah demi menanggulangi pandemi COVID-19 antara lain :

- 1) Dampak ekonomi makro antara lain :
 - a) Penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kehilangan pekerjaan/PHK;
 - b) Tingkat pengangguran terbuka meningkat;
 - c) Inflasi cenderung meningkat;
 - d) Kemungkinan besar angka kemiskinan meningkat;
 - e) Kontraksi ekonomi (pertumbuhan melambat, bahkan bisa negatif).
- 2) Dampak ekonomi mikro antara lain :
 - a) Jasa retail kehilangan pasar;
 - b) Industri pariwisata, hotel dan rumah makan terancam mengalami kebangkrutan;
 - c) Jasa transportasi mengalami penurunan drastis.

Di Kabupaten Pekalongan, COVID-19 berimbas besar bagi perekonomian daerah diantaranya :

- 1) Di sektor industri manufaktur, dari 21 perusahaan menengah dan besar (tekstil termasuk batik) dengan jumlah karyawan 9863 orang, data per 9 Mei 2020, jumlah karyawan yang di-PHK/dirumahkan sebanyak 6360 orang (64,50 persen). Data ini di luar karyawan yang bekerja dengan sistem *shift* misal 3

hari kerja 4 hari libur. Sedangkan identifikasi permasalahan utama antara lain sulitnya mendapatkan bahan baku, harga bahan baku naik, pasar atau permintaan yang menurun, tidak ada sparepart mesin dan tidak dapat mengirim produksi.

- 2) Di sektor pariwisata, dari 30 daerah tujuan wisata (DTW) yang umumnya berskala kecil dan menengah dan sebagian besar dikelola berbasis komunitas dengan jumlah tenaga kerja 375 orang, data per 9 Mei 2020, jumlah tenaga kerja yang di-PHK/dirumahkan sebanyak 78 orang (20 persen). Data ini di luar kegiatan ekonomi sampingan yang terdampak misalnya warung makan di sekitar obyek, penginapan dan pedagang asongan. Kerugian ekonomi langsung akibat tidak adanya pemasukan selama penutupan lebih dari 1.26 Milyar, di luar kerugian kegiatan ekonomi sampingan yang terdampak semisal warung makan di sekitar obyek, pedagang asongan dan penginapan;
- 3) Di sektor transportasi, lumpuhnya kegiatan dari 31 perusahaan transportasi umum swasta skala menengah dengan jumlah pengemudi sebanyak 968 orang, data ini di luar kegiatan kenek, usaha bengkel yang juga terdampak karena transportasi lokal terbatas atau tidak berjalan sama sekali. Dengan lumpuhnya sektor transportasi selain berdampak menurunnya pergerakan orang dan barang juga akan berpotensi menaikkan barang-barang kebutuhan.

Adanya Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam di Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di wilayahnya harus dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary* diantaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka pendek antara lain :

- 1) Pertanian bahan makanan, peternakan dan perikanan serta rangkaian rantai pasoknya meliputi kredit usaha (kemudahan memperoleh kredit usaha, keringanan bunga, kelonggaran cicilan), ketersediaan input dan jaminan harga produk;
- 2) Produsen/industri pengolahan bahan makanan dan rantai pasoknya meliputi kredit usaha, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, jaminan harga produk;
- 3) Menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan atau yang kehilangan pekerjaan/PHK melalui penciptaan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dari proyek-proyek pembangunan fisik.

Dari kondisi perekonomian daerah dapat dijelaskan bahwa perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 tumbuh sebesar **5,41 persen** naik dari tahun 2018 sebesar **5,32 persen**. Stabilitas ekonomi tersebut menjadi daya tarik utama bagi Jawa Tengah untuk optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam pencapaian potensi pembiayaan belanja pembangunan ke depan dengan menciptakan mekanisme pembiayaan inovatif khususnya dengan memanfaatkan mekanisme pasar baik di pasar modal, pasar keuangan dan perbankan serta sektor riil lainnya. Instrumen-instrumen yang dapat dipilih diantaranya skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPBU), skema suku bunga perbankan dan dana bergulir serta modal usaha produktif, skema penerbitan surat berharga (obligasi daerah).

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, analisis terkait asumsi dan skenario pertumbuhan ekonomi Jateng 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Asumsi dan Skenario Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2020

Waktu	Asumsi	Skenario 1: Berat	Keterangan
TW 1	Berat	2,50% - 3,80%	Fase Sakit
TW 2	Sangat Berat	1,60% - 2,10%	Fase Sakit berat
TW 3	Ringan	3,30% - 4,10%	Fase Pemulihan
TW 4	Normal	4,50% - 5,10%	Fase Normal
2020	Berat	2,70% - 3,90%	Tahun Sakit-Pulih

Dari tabel 3.1, target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 5,70-6,00% sangat sulit tercapai. Sangat mungkin hanya bertumbuh 1,90-3,90% dengan asumsi krisis COVID-19 berlangsung Pebruari-Juni 2020. Hal ini akan berakibat (1)dari sisi permintaan, ekonomi Jateng merosot, (2)jumlah penduduk miskin dan pengangguran akan meningkat signifikan, (3)perlu dilakukan revisi APBD 2020 dan (4)perlu dilakukan akselerasi APBD 2021 untuk upaya pemulihan ekonomi pulih (*demand side dan supply side*).

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2019 yang mencapai **5,35%**, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh **5,76%**. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 diproyeksikan mengalami perlambatan sebesar **2-3%**.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016- 2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Nasional (%)	5,02	5,07	5,17	5,02	2,30
2	Provinsi Jawa Tengah (%)	5,28	5,27	5,32	5,41	2,48
3	Kab. Pekalongan (%)	5,16	5,44	5,76	5,35	2,00-3,00

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) * Angka Proyeksi

Kondisi perekonomian Kabupaten Pekalongan tahun 2020 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter Negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, serta adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian Kabupaten Pekalongan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2018 mencapai **5,76%**, lebih besar dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh **5,44%**. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 tumbuh sebesar **5,35%** dan untuk Tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar **2,00-3,00%**. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 yang mengalami perlambatan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berlangsung dari bulan Februari sampai dengan Juni 2020, sehingga mempengaruhi perekonomian Kabupaten Pekalongan dengan penduduk miskin dan pengangguran yang meningkat secara signifikan.

b. Kemiskinan dan Pengangguran

Sejalan dengan melemahkan pertumbuhan ekonomi global, nasional dan daerah, pandemi COVID-19 juga berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah penduduk di sekitar garis kemiskinan yang masih sangat tinggi, meskipun persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan tren penurunan yang baik, namun **berpotensi meningkat akibat dampak ekonomi COVID-19.**

Berikut disampaikan angka capaian dan proyeksi jumlah dan persentase penduduk miskin nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 3.3, 3.4 dan 3.5.

Tabel 3.3
Proyeksi Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin 2020			Persentase Kemiskinan 2020		
		Kemenkeu : Berat 2,30%	BI : 4,2%	BI : 4,6%	Kemenkeu : Berat 2,30%	BI : 4,2%	BI : 4,6%
1.	Kab. Pekalongan	116.400	95.830	91.515	12,89	10,61	10,13
2.	Jawa Tengah	4.680.442	4.024.714	3.887.170	13,40	11,52	11,13

Ket : data berdasarkan bulan Maret 2019

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Kab. Pekalongan	113.310	111.580	89.540	87.010	95.830
2.	Prov. Jawa Tengah	4.506.890	4 450.720	3.897.200	3.743.230	4.625.861

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Kemenkeu (diolah), Data Maret 2015-2019

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Kab. Pekalongan	12,90	12,61	10,06	9,71	10,61
2.	Prov. Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	13,24

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Kemenkeu (diolah), Data Maret 2015-2019

Dari tabel 3.3, 3.4 dan 3.5, berdasarkan data dari Bank Indonesia dan BPS, adanya pandemi COVID-19 ini, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 diproyeksikan bertambah sebanyak 8.830 orang atau meningkat menjadi 95.830 orang (10,61%).

c. Inflasi

Sepanjang tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi sebesar 2,80 persen menurun dari sebesar 2,83 persen di tahun 2018. Menurunnya inflasi di daerah antara lain disebabkan terjaganya pemenuhan ketersediaan pasokan, pemenuhan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dengan mempertahankan kearifan lokal di masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2020, adanya penyebaran virus COVID-19 secara global telah "merusak" rantai permintaan dan suplai serta produksi barang sehingga menyumbang inflasi yang tinggi.

Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Nasional (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	3,90
2	Jawa Tengah (%)	2,36	3,71	2,82	2,81	3,00 ± 1
3	Kab. Pekalongan	2,96	4,01	2,83	2,80	3,00 ± 1

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) * Angka Proyeksi

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja pembangunan pemerintah di berbagai sektor pembangunan masih mempertimbangkan kemandirian dan kekuatan fiskal yang dimiliki serta adanya pengaruh dari pandemi COVID-19, sementara konsumsi rumah tangga akan meningkat jika pemerintah mampu untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar relatif stabil, dan mendukung peningkatan upah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dapat didorong melalui peningkatan pertumbuhan 3 (tiga) sektor unggulan Kabupaten Pekalongan yaitu (1) industri pengolahan; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan; serta (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lain yang juga diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah (1) jasa pendidikan; (2) konstruksi; dan (3) penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan yang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.7 dan 3.8.

Tabel 3.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 s.d 2020 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020*	
		(Rp)	%								
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.416.386,04	18,70	3.491.876,97	17,73	3.638.853,84	17,08	3.767.422,28	16,48	3.904.958,37	15,75
B	Pertambangan & Penggalian	640.611,28	3,52	797.190,25	4,05	914.872,42	4,29	997.946,51	4,37	1.165.093,43	4,70
C	Industri pengolahan	5.714.558,95	31,37	6.106.283,38	31,01	6.625.831,17	31,10	7.102.497,93	31,07	7.675.578,79	30,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25.658,41	0,14	28.668,94	0,15	31.067,82	0,15	32.819,31	0,14	36.495,37	0,15
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6.983,31	0,04	7.392,55	0,04	7.529,01	0,04	8.185,04	0,04	8.578,27	0,03
F	Konstruksi	1.148.001,98	6,30	1.314.975,53	6,68	1.488.508,36	6,99	1.589.755,34	6,96	1.795.858,61	7,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.441.393,07	13,40	2.636.675,00	13,39	2.856.931,40	13,41	3.086.285,19	13,50	3.352.693,05	13,52
H	Transportasi dan Pergudangan	441.088,52	2,42	481.792,59	2,45	499.830,37	2,35	556.439,53	2,43	592.607,88	2,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	945.809,13	5,19	1.020.685,12	5,18	1.111.345,08	5,22	1.212.678,69	5,31	1.327.110,07	5,35
J	Informasi dan Komunikasi	342.687,20	1,88	407.503,07	2,07	448.424,23	2,10	506.397,62	2,22	570.358,15	2,30
K	Jasa keuangan dan Asuransi	463.250,04	2,54	505.748,44	2,57	539.748,38	2,53	565.543,16	2,47	618.067,18	2,49
L	Real Estat	247.835,06	1,36	269.826,45	1,37	286.386,08	1,34	303.510,41	1,33	328.364,90	1,32
M,N	Jasa Perusahaan	52.481,57	0,29	59.399,15	0,30	67.212,43	0,32	76.016,78	0,33	85.566,16	0,35
O	Administrasi Pemerintahan,	610.329,23	3,35	651.705,32	3,31	689.073,38	3,23	717.233,71	3,14	767.470,20	3,10

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020*	
		(Rp)	%								
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
P	Jasa Pendidikan	1.117.407,76	6,13	1.236.802,46	6,28	1.361.804,90	6,39	1.520.663,23	6,65	1.664.881,66	6,72
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	244.098,45	1,34	269.839,03	1,37	295.719,26	1,39	320.311,14	1,40	352.652,03	1,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	369.115,67	2,02	405.191,45	2,06	440.580,43	2,07	493.357,73	2,16	542.642,86	2,19
	(PDRB)	18.216.695,67	100	19.691.555,70	100	21.303.721,56	100	22.857.063,60	100	24.788.976,98	100

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) *) Angka Proyeksi

Tabel 3.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 s.d 2020 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020*	
		(Rp)	%								
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.307.320,38	16,58	2.308.782,63	15,73	2.356.930,82	15,18	2.390.852,86	14,62	2.400.400,22	14,28
B	Pertambangan & Penggalian	424.571,40	3,05	515.228,93	3,51	572.036,43	3,68	623.600,70	3,81	716.804,96	4,26
C	Industri pengolahan	4.447.301,16	31,95	4.651.905,35	31,69	4.922.022,98	31,70	5.150.118,50	31,49	5.200.230,91	30,94
D	Penga. Listrik & Gas	24.530,37	0,18	25.752,73	0,18	27.160,19	0,17	28.580,06	0,17	29.281,56	0,17
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6.525,18	0,05	6.828,60	0,05	6.925,57	0,04	7.406,29	0,05	7.510,58	0,04
F	Konstruksi	874.502,65	6,28	976.784,58	6,65	1.059.213,80	6,82	1.107.473,11	6,77	1.144.887,67	6,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.068.674,87	14,86	2.177.767,85	14,84	2.309.667,37	14,88	2.441.492,14	14,21	2.569.202,17	15,28
H	Transportasi dan Pergudangan	388.206,46	2,79	412.989,96	2,81	422.582,50	2,72	464.279,40	2,84	464.979,64	2,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	736.106,30	5,29	785.629,02	5,35	846.471,56	5,45	910.006,35	5,56	942.225,81	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	381.650,64	2,74	426.739,37	2,91	464.251,82	2,99	524.677,12	3,21	543.828,68	3,24
K	Jasa keuangan dan Asuransi	340.184,82	2,44	357.783,65	2,44	371.949,42	2,40	384.021,32	2,35	410.843,77	2,44
L	Real Estat	218.012,18	1,57	231.598,13	1,58	240.734,60	1,55	250.930,66	1,53	260.411,07	1,55
M,N	Jasa Perusahaan	40.184,92	0,29	43.410,38	0,30	47.738,38	0,31	52.669,75	0,32	53.874,13	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453.813,14	3,26	464.972,11	3,17	484.746,87	3,12	499.436,96	3,05	500.034,17	2,97
P	Jasa Pendidikan	725.441,03	5,21	772.483,11	5,26	830.022,50	5,35	904.962,74	5,53	926.852,22	5,51
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	183.061,75	1,32	199.358,06	1,36	216.294,70	1,39	231.709,69	1,42	248.479,54	1,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	297.614,58	2,14	321.114,26	2,19	346.071,18	2,23	384.133,34	2,35	390.232,22	2,32
	(PDRB)	13.917.701,83	100	14.679.128,72	100	15.524.820,69	100	16.356.350,99	100	16.810.079,35	100

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) *) Angka Proyeksi

Struktur lapangan usaha bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 dan tahun 2020 diproyeksikan tidak banyak bergeser bila dibandingkan dengan 2018. Sumbangan terbesar dihasilkan dari dari lapangan usaha (1) industri pengolahan, kemudian (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (3) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (4) jasa pendidikan; (5) konstruksi; dan (6) penyediaan akomodasi dan makan minum.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Sementara itu pada tahun 2018, PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan mencapai Rp23.880.000,00 meningkat dari Tahun 2017 sebesar Rp22.300.000,00. Sedangkan untuk Tahun 2019 diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 22.831.128,00; Tahun 2019 sebesar Rp. 24.178.694,00 dan di Tahun 2020 sebesar Rp. 25.526.261,00.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rp)
1.	2016	20.711.226
2.	2017	22.300.000
3.	2018	23.880.128
4.	2019	24.178.694
5.	2020*	25.526.261*

Sumber : BPS, Bappeda Litbang Kab. Pekalongan (diolah *) Angka sementara

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Penanganan COVID-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja *all-out* untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien COVID-19 (*kuratif*) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (*preventif*). Stimulus fiskal juga menjadi kunci utama dalam meredam dampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang terkena dampak paling besar.

Selain itu berdasarkan analisis atas kondisi internal (*kekuatan dan kelemahan*) dan kondisi eksternal (*peluang dan ancaman*) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terkait gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2019, realisasi RPJMD 2016-2021, dan kondisi ekonomi tahun 2020 maka dapat disimpulkan tantangan dan peluang perekonomian Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dan 2021 yang meliputi :

- a. Tingginya kasus COVID-19 di ibukota, kota besar dan wilayah lain sejalan dengan Indeks Kerentanan Provinsi terhadap COVID-19 yang disusun oleh *Katadata Insight Center (KIC)*. Indeks ini mengukur kerentanan daerah terhadap penyebaran corona melalui tiga indikator risiko yaitu : *Pertama*, risiko terkait dengan karakteristik daerah seperti jumlah penduduk, kepadatan, hingga akses terhadap hunian yang layak, *kedua*, risiko kesehatan penduduk seperti jumlah penduduk lanjut usia, hingga persentase penduduk yang merokok dan *ketiga*, risiko terkait mobilitas penduduk seperti jumlah penumpang pesawat dan mobilitas pekerja;
- b. Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*. Dengan berbagai langkah *extraordinary*, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas perekonomian sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- c. Kabupaten Pekalongan perlu menyesuaikan rencana belanjanya dengan fokus/prioritas pada (1) aspek kesehatan (tenaga medis, rumah sakit dan alat kesehatan); (2) bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 dan (3) bantuan kepada dunia usaha mikro dan kecil untuk mengurangi PHK;
- d. Situasi ini juga sekaligus menjadi saat tepat bagi masyarakat untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi di tengah himbauan *social distancing*. Kegiatan bekerja dari rumah maupun belajar dari rumah mendorong pemanfaatan teknologi *online meeting* secara pesat. Masyarakat dapat belajar menggunakan teknologi secara produktif.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pekalongan saat ini serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel 3.6.

Tabel 3.10
Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET RPJMD 2016-2021	2019	2020*)
1.	PDRB (juta Rp.)			
	Harga Berlaku	24.065.358,25	22.857.063,60	24.788.976,98
	Harga Konstan	16.772.679,78	16.356.350,99	16.810.079,35
2.	PDRB per kapita ADHB	26.873.827	24.178.694	25.526.261
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,00	5,35	2,00-3,00
4.	Inflasi (%)	3,00-4,00	2,80	3,0 ± 1
5.	TPT (%)	3,90	4,43	4,55
6.	Kemiskinan (%)	7,10	9,71	10,61
7.	IPM	70,35	69,71	70,31
	▪ Angka Harapan Hidup (th)	73,85	73,57	73,78
	▪ Harapan Lama Sekolah (th)	12,25	12,40	12,60
	▪ Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7,60	6,88	7,40
	▪ Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.685	10.508	10.725
8.	Nilai Realisasi Investasi (Juta Rp.)	2.950.000,00	1,297 T	2,880 T

Sumber: BPS; Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2020 (Data diolah) *) Angka Proyeksi

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19) antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020, terutama sisi Pembiayaan. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan Negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

1. Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

COVID-19 sebagai bencana nasional non alam segera disikapi oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan keuangan daerah guna melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan melalui **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020** tanggal 30 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut dari Perpu tersebut maka ditetapkan **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020** tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; dan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020** tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang mengamanatkan Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah tahun anggaran 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 maka ditetapkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020** tanggal 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan Negara untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menyesuaikan postur APBD dengan regulasi tersebut.

Selang beberapa lama kemudian ditetapkan **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020** tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga kembali Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyesuaikan APBD Tahun 2020 dengan regulasi tersebut.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan *refocusing* terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan **Perubahan Struktur APBD 2020 dengan belanja difokuskan untuk :**

- a. Penanganan Kesehatan;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
- c. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*).

Adanya pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global harus disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan hati-hati. Hal tersebut harus mendapat perhatian serius dalam fokus belanja maupun pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan akibat yang sistemik dalam perekonomian. Sebagaimana arahan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan pemotongan/penghentian belanja tidak penting antara lain :

a. Belanja Pegawai

Arahan *refocusing* dan *realokasi* belanja pegawai di dalam SKB adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif **LEBIH BESAR** dari tunjangan kinerja di pusat, agar melakukan penyesuaian tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
- 2) Daerah yang memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif **LEBIH RENDAH** dari tunjangan kinerja di pusat, agar melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
- 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
- 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
- 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksana pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

b. Belanja Barang Jasa

Arahan *refocusing* dan *realokasi* belanja barang dan jasa di dalam SKB : Rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50%, terutama mengurangi belanja berikut :

- 1) Perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
- 3) Cetak dan penggandaan;
- 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
- 5) Pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor;
- 6) Sewa rumah/gedung/gudang/parker;
- 7) Sewa sarana mobilitas;
- 8) Sewa alat berat;
- 9) Jasa kantor dan sewa antara lain langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak dan peralatan;
- 10) Jasa konsultasi;

- 11) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
- 12) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
- 13) Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor;
- 14) Sosialisasi, workshop, bimtek, pelatihan, FGD, dan lain-lain yang mengundang banyak orang.

c. Belanja Modal

Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk :

- 1) Pengadaan kendaraan dinas operasional;
- 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
- 3) Pengadaan tanah;
- 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair dan perlengkapan perkantoran;
- 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
- 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya;

Penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai :

- a. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*sosial safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19;
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Pemerintah daerah diharapkan juga harus memiliki opsi dalam menanggulangi COVID-19. Pasalnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi ini berakhir. Dengan begitu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan penyebaran dampaknya. Fokus utama pada penanganan COVID-19, mulai dari mencegah penyebaran, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas sistem kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri alat kesehatan, juga mendukung sosial *safety net*, bantuan sosial kepada warga-warga sulit, dan menjaga agar iklim usaha berjalan meskipun ekonomi melambat dibanding sebelumnya, tidak mati sama sekali.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada :

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara perangkat daerah terkait;
- c. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran Daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan; dan
- d. Anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik dan tepat sasaran.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan respon yang diambil pemerintah dan pemerintah daerah menyebabkan APBN 2020 dan APBD 2020 mengalami perubahan besar. Belanja dan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mengatasi COVID-19. Penerimaan perpajakan turun akibat kondisi perekonomian melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun sebagai dampak jatuhnya harga komoditas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada Dana Transfer Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3.11
Perubahan Dana Transfer Daerah
sesuai PMK No. 35/2020 Kabupaten Pekalongan

NO	URAIAN	APBD 2020	PMK 35/2020	SELISIH	%
	DANA PERIMBANGAN	1.658.362.523.000	1.502.153.576.000	(156.208.947.000)	-9,42%
1	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	26.704.775.000	27.912.225.000	1.207.450.000	4,52%
1.01	BAGI HASIL PAJAK	25.566.050.000	25.917.780.000	351.730.000	1,38%
1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.363.486.000	7.660.798.000	(1.702.688.000)	-18,18%
1.01.02	Bagi Hasil dari PPh 21 dan PPh 25/29	9.833.624.000	11.861.267.000	2.027.643.000	20,62%
1.01.03	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Tembakau	6.368.940.000	6.395.715.000	26.775.000	0,42%
1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	1.138.725.000	1.994.445.000	855.720.000	75,15%
1.02.01	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	311.725.000	378.917.000	67.192.000	21,55%
1.02.02	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000	1.418.361.000	915.571.000	182,10%
1.02.03	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	43.847.000	-	(43.847.000)	-100,00%
1.02.04	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	249.347.000	154.934.000	(94.413.000)	-37,86%
1.02.05	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000	41.543.000	11.165.000	36,75%
1.02.06	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	638.000	690.000	52.000	8,15%
2	DANA ALOKASI UMUM	979.933.360.000	890.703.494.000	(89.229.866.000)	-9,11%
	Dana Alokasi Umum	979.933.360.000	890.703.494.000	(89.229.866.000)	-9,11%
	a. DAU Formula	962.698.102.000	880.387.414.000	(82.310.688.000)	-8,55%
	b. Pendanaan Kelurahan	4.758.000.000	4.758.000.000	-	0,00%
	c. PPPK	12.477.258.000	5.558.080.000	(6.919.178.000)	-55,45%
3	DANA ALOKASI KHUSUS	340.114.098.000	279.213.665.000	(60.900.433.000)	-17,91%
3.01	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	118.243.983.000	68.804.814.000	(49.439.169.000)	-41,81%
3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	32.445.500.000	32.441.410.000	(4.090.000)	-0,01%
3.01.02	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	10.466.861.000	10.466.861.000	-	0,00%
3.01.03	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	15.004.532.000	15.004.532.000	-	0,00%
3.01.04	DAK Infrastruktur Jalan	16.587.884.000	-	(16.587.884.000)	-100,00%
3.01.05	DAK Infrastruktur Sanitasi	5.710.028.000	-	(5.710.028.000)	-100,00%
3.01.06	DAK Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.869.910.000	2.869.910.000	-	0,00%
3.01.07	DAK Keluarga Berencana	1.026.800.000	1.026.800.000	-	0,00%
3.01.08	DAK Perumahan dan Permukiman	2.638.389.000	-	(2.638.389.000)	-100,00%
3.01.09	DAK Penugasan Bidang Air Minum	5.702.025.000	1.931.172.000	(3.770.853.000)	-66,13%
3.01.10	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	7.740.654.000	-	(7.740.654.000)	-100,00%
3.01.11	DAK Penugasan Bidang Pasar	7.599.999.000	-	(7.599.999.000)	-100,00%
3.01.12	DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.890.000.000	3.433.118.000	(456.882.000)	-11,75%
3.01.13	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	375.000.000	-	(375.000.000)	-100,00%
3.01.14	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	1.875.996.000	-	(1.875.996.000)	-100,00%
3.01.15	DAK Penugasan Bidang Pertanian	1.295.000.000	-	(1.295.000.000)	-100,00%
3.01.16	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.151.468.000	287.867.000	(863.601.000)	-75,00%
3.01.17	DAK Penugasan Bidang Keselamatan Jalan	506.101.000	-	(506.101.000)	-100,00%
3.01.18	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.270.010.000	1.270.010.000	-	0,00%
3.01.19	DAK Bidang Sosial	87.826.000	73.134.000	(14.692.000)	-16,73%
3.02	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	221.870.115.000	210.408.851.000	(11.461.264.000)	-5,17%
3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	20.889.600.000	19.807.800.000	(1.081.800.000)	-5,18%
3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	161.918.486.000	152.608.806.000	(9.309.680.000)	-5,75%
3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	273.258.000	-	(273.258.000)	-100,00%
3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	18.910.043.000	18.910.043.000	-	0,00%
3.02.05	Akreditasi Puskesmas	466.472.000	466.472.000	-	0,00%
3.02.06	Jaminan Persalinan	4.912.708.000	4.912.708.000	-	0,00%
3.02.07	Bantuan Operasional KB	5.738.998.000	5.684.658.000	(54.340.000)	-0,95%
3.02.08	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000	417.358.000	-	0,00%
3.02.09	Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.113.173.000	2.958.841.000	(154.332.000)	-4,96%

NO	URAIAN	APBD 2020	PMK 35/2020	SELISIH	%
3.02.10	Pelayanan Kepariwisata	785.004.000	344.050.000	(440.954.000)	-56,17%
3.02.11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	4.197.400.000	4.050.500.000	(146.900.000)	-3,50%
3.02.12	Pengawasan Obat dan Makanan	247.615.000	247.615.000	-	0,00%
4	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	45.273.680.000	40.927.086.000	(4.346.594.000)	-9,60%
4.01	Dana Insentif Daerah	45.273.680.000	40.927.086.000	(4.346.594.000)	-9,60%
	a. Kategori Kemandirian Daerah	11.911.705.000	10.389.878.000	(1.521.827.000)	-12,78%
	b. Kategori Mandatory Spending	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	c. Kategori Persentase Penduduk Miskin	11.555.571.000	10.079.243.000	(1.476.328.000)	-12,78%
	d. Kategori Persentase Persalinan di Faskes	11.001.849.000	11.001.849.000	-	0,00%
	e. Kategori Rata-Rata Nilai Ujian Nasional	10.554.555.000	9.206.116.000	(1.348.439.000)	-12,78%
5	DANA DESA	266.336.610.000	263.397.106.000	(2.939.504.000)	-1,10%
5.01	Dana Desa	266.336.610.000			

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

Adanya perubahan dana transfer ini menyebabkan adanya perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pekalongan sebagai dampak COVID-19 yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.12.

Tabel 3.12
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

NO.	URAIAN	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020
A.	PENDAPATAN	2.422.348.910.400	2.318.988.832.870	2.073.307.685.728
1.	Pendapatan Asli Daerah	500.000.000.000	466.818.349.724	344.496.913.582
1.1	Hasil Pajak Daerah	161.833.613.005	90.091.441.802	81.55.950.350
1.2	Hasil Retribusi Daerah	19.927.543.101	27.289.085.368	18.105.404.210
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.556.474.600	13.231.474.600	10.122.914.114
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	309.682.369.294	336.206.374.954	234.912.644.908
2.	Dana Perimbangan	1.354.915.321.000	1.346.752.233.000	1.210.049.248.000
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.523.454.000	26.704.775.000	27.912.225.000
2.2	Dana Alokasi Umum	967.286.335.000	979.933.360.000	890.03.494.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	358.105.532.000	340.114.098.000	291.433.529.000
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	567.433.589.400	505.418.250.146	518.661.524.146
3.1	Pendapatan Hibah	78.563.040.000	83.563.040.000	83.563.040.000
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	107.255.235.400	115.244.920.146	115.244.920.146
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	294.935.985.000	311.610.290.000	304.324.192.000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	86.679.329.000	-	15.529.372.000

Sumber: Bappeda Litbang, BPKD Kab. Pekalongan, 2020

Dari tabel 3.12, jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2020, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp245.681.147.142,00. Penurunan ini disebabkan penurunan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari sebesar Rp466.818.349.724 menjadi Rp344.496.913.582, dana perimbangan dari Rp1.346.752.233.000 menjadi Rp1.210.049.248.000. Di sisi lain, penerimaan pendapatan dari pos Lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan dari Rp505.418.250.146 menjadi Rp518.661.524.146.

Kemudian dibandingkan dengan RKPD Tahun 2020, total pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp349,041,224,672.00. Penurunan ini disebabkan penurunan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari sebesar Rp500.000.000.000 menjadi Rp344.496.913.582, dana perimbangan dari Rp1.354.915.321.000 menjadi

Rp1.210.049.248.000 dan Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan dari Rp567.433.589.400 menjadi Rp518.661.524.146

3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 dalam rangka penanganan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan **Perubahan Struktur APBD 2020 dengan Belanja yang difokuskan untuk :**

- a. Penanganan Kesehatan;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
- c. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*).

Sampai dengan saat ini Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp2.446.656.142.301 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp11.356.458.634.040 atau 55,44% dan Belanja Langsung sebesar Rp1.090.197.508.261 atau 44,56%.

Secara lengkap rencana perubahan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

NO.	U R A I A N	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020
B	BELANJA	3.269.956.078.622	2.446.656.142.301	2.234.259.280.671
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.350.069.921.800	1.356.458.634.040	1.309.991.701.929
2.1.1	Belanja Pegawai	865.193.806.200	852.074.394.913	812.844.996.347
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	61.700.000.000	80.020.379.375	80.885.220.830
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.000.000.000	15.939.939.000	21.312.750.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	18.176.115.600	10.690.713.652	9.390.713.652
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	385.000.000.000	394.733.207.100	377.558.021.100
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	8.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.919.886.156.822	1.090.197.508.261	924.267.578.742
2.2.1	Belanja Pegawai	455,833,694,250	183.751.865.921	177.481.252.378
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	710,780,651,514	489.121.313.842	446,793,591,725
2.2.3	Belanja Modal	753,271,811,058	417.324.328.498	299,992,734,639
	SURPUS/DEFISIT	(10.000.000.000)	(127.667.309.431)	(154.856.594.943)

Sumber: Bappeda Litbang, BPKD Kab. Pekalongan, 2020

Dari tabel 3.13, Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2020, Belanja Tidak Langsung turun dari sebesar Rp1.350.069.921.800,- menjadi Rp1.309.991.701.929 yang berasal dari Pos Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan pos Belanja Tidak Terduga.

Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan karena adanya pengurangan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) THR dan ke-14. Kenaikan bantuan keuangan

parpol dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Pada Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan karena adanya pengembalian anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Pemerintah Pusat.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD 2020 ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah :

- a. Memenuhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
- b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antar program;
- d. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- e. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- f. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- g. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- h. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundangundangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
- i. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Pekalongan pada perubahan RKPD Tahun 2020 berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp170.561.700.769,00. Jika dibandingkan dengan RKPD 2020, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp170.561.700.769,00 dan apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp42.099.558.769,00.

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2019 meliputi :

- 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2019 adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD.
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
- 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan sebagai 3.14.

Tabel 3.14
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

NO.	U R A I A N	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020
	PEMBIAYAAN NETTO	10.000.000.000	127.667.309.431	154.856.594.943
1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	127.667.309.431	159.856.594.943
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000	127.667.309.431	159.856.594.943
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		-	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	5.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	SiLPA	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bappeda Litbang, BPKD Kab. Pekalongan, 2020

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan **TAHUN KEEMPAT** pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2020 dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021. Visi pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL”

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Rumusan visi tersebut terdiri dari 4 unsur frasa kalimat yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera

merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedia sarana prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik

2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Religius

merupakan kondisi masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang diyakininya. Kondisi masyarakatnya saling menghormati agama, kepercayaan dan keyakinan agama lain, beriman dan bertakwa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari

3. Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan

yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

4. Potensi Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Religius dan Berkelanjutan

yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi

ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.**

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
- 2) Menurunnya angka gizi buruk.
- 3) Menurunnya angka kesakitan penduduk.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
- 5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.

- b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.

Sasaran tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal.
- 2) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan.
- 3) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.
- 4) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik.
- 5) Meningkatnya minat baca masyarakat.

- c. Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja.
- 2) Meningkatnya penanganan PMKS.

- d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
- 2) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana. Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim.
- f. Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata. Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - 1) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM.
 - 2) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil.
 - 3) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
 - 4) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD.
- g. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan. Sasaran dari tujuan ini adalah:
 - 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan
 - 2) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

2. Misi 2 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat.

Tujuan misi tersebut adalah menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
- 2) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.
- 3) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3. Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik.

Tujuan misi tersebut adalah menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama

4. Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak.

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

5. **Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.**

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sasaran tujuan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Perdesaan.
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi
- 5) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

6. **Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah**

Tujuan misi tersebut adalah merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah.

7. **Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi Daerah**

Tujuan misi tersebut adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi Daerah.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya iklim investasi Daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi Daerah;
- 2) Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Religius Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.	a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.	1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak	a) Optimalisasi capaian SPM di Puskesmas b) Optimalisasi pelaksanaan Posyandu dan Desa Siaga Aktif. c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita.	(1) Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin; (2) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis. (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif.
2) Menurunnya angka gizi buruk			a) Peningkatan penjangkaran kesehatan bayi, balita dan anak sekolah		
3) Menurunnya angka kesakitan penduduk			a) Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan jiwa b) Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang c) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap sanitasi dasar d) Optimalisasi pengawasan dan pemantauan makanan		
4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda			a) Penerbitan KARTU KAJEN SEHAT sebagai jaminan kesehatan, persalinan, khitan dan santunan kematian. *) b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan c) Pemerataan SDM tenaga kesehatan di Fasyankes d) Peningkatan sistem logistik dalam pengelolaan ketersediaan obat dan vaksin e) Peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi dan mengintegrasikan praktek dokter swasta dan puskesmas f) Peningkatan rasio Rumah Sakit g) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas BLUD		

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif	a) Optimalisasi pelayanan KB.	
	b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.		6) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal	a) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal	(1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar; (2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; (3) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; (4) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan pemberian bantuan siswa miskin dan atau berprestasi.
			7) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan	a) Penguatan akses dan mutu pendidikan; b) Penerbitan KARTU KAJEN CERDAS sebagai jaminan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; *)	
			8) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal	a) Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.	
			9) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik	a) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi; b) Penempatan dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	
			10) Meningkatnya minat baca masyarakat	a) Peningkatan budaya baca masyarakat; b) Penyediaan tenaga perpustakaan dan kearsipan yang memenuhi standar kompetensi; c) Peningkatan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan.	
	c. Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan.		11) Meningkatnya kesempatan kerja	a) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. b) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja. c) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. d) Peningkatan pelayanan ketransmigrasian	(1) Menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja
			12) Meningkatnya penanganan PMKS.	a) Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.	(1) Memfasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
		d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.	13) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	a) Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni, olah raga dan event-event kebudayaan lokal	(1) Melestarikan seni dan budaya; *)
			14) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah	a) Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang seni dan budaya	
		e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.	15) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim	a) Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat; b) Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam penanggulangan bencana; c) Peningkatan kemampuan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dalam penanggulangan bencana; d) Peningkatan sarana prasarana pengendalian banjir, penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai.	(1) Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi); (2) Melakukan rekayasa/penataan sosial dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob.
		f. Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata.	16) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM	a) <u>Peningkatan ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan pemodal, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten;</u> *) b) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal; c) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster.	(1) Mendorong Pertumbuhan Koperasi dan UMKM*); (2) Mengembangkan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; (3) Memperkuat jejaring sentra dan klaster.
			17) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil	a) Peningkatan kualitas SDM IKM ; b) Peningkatan Iptek sistem produksi. c) Peningkatan fasilitasi bagi pelaku industri kecil dalam permodalan, pelatihan dan pembinaan.	(1) Meningkatkan produktivitas industri Kecil dan Menengah;

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			18) Meningkatnya aktivitas perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan berbasis teknologi informasi (IT); b) Peningkatan promosi produk perdagangan. 	(1) Mengembangkan iklim perdagangan yang kondusif.
			19) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD	<ul style="list-style-type: none"> a) Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata; b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata; c) Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui pokdarwis. 	(1) Meningkatkan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata;
		g. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan.	20) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organik dan anorganik) tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain). *) b) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang berwawasan lingkungan; c) Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal; d) Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta antisipasi rawan bencana alam; e) Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian; f) Peningkatan sarana prasarana pertanian; g) Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak; h) Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Mendorong kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian; *) (2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan; (3) Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. *) (4) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			21) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	a) Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal; b) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; c) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan.	(1) Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal
2	Misi 2 : Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat	a. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.	22) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)	a) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan nilai-nilai HAM; b) Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan aparatur. c) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal	(1) Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum; (2) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah.
			23) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat.	a) Penguatan peran lembaga keswadayaan masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah; b) Peningkatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik; c) Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.	(1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan
			24) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	a) Pengarusutamaan gender dan hak anak; b) Peningkatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak; c) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; d) Peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking.	(1) Mendorong percepatan implementasi PUG dan Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); (2) Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik	a. Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik.	25) Meningkatnya kegiatan fasilitas pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama	a) Peningkatan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan hari besar keagamaan lainnya	(1) Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya
4	Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak	a. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.	26) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i> .	a) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi (IT); b) Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; c) Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat; d) Pengembangan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat; e) Peningkatan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK); f) Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); g) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur; h) Peningkatan pengelolaan dan keterbukaan pengembangan sistem karier kepegawaian; i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi; penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; j) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan; k) Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah; l) Pelaksanaan revitalisasi BUMD.	(1) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; (2) Mewujudkan birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih; *) (3) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. (4) Mengimplementasikan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; (5) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; (6) Meningkatkan pengelolaan, pendapatan, aset daerah dan penataan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; (7) Meningkatkan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi serta implementasi sistem informasi teknologi perencanaan pembangunan daerah.
			27) Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD.	a) Peningkatan perencanaan yang handal yang berbasis IT dan peningkatan alokasi pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.	
5	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.	28) Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi.	a) Percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan listrik dan bantuan aspal dan semen *); b) Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga	(1) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kuantitas jalan dan jembatan; (2) Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial,

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;</p> <p>c) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan system informasi jasa konstruksi.</p>	<p>ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana).</p>
			29) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.	<p>a) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;</p> <p>b) Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan embung;</p> <p>c) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi berbasis pemberdayaan</p>	(1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan
			30) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	a) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan	(1) Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infratraktur perdesaan
			31) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi.	<p>a) Peningkatan prasarana sarana dan pengembangan antar moda transportasi publik;</p> <p>b) Peningkatan prasarana sarana keselamatan transportasi.</p>	(1) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota sekitar;
			32) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman.	<p>a) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lingkungan permukiman.</p> <p>b) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman</p> <p>c) Pembangunan sumur bor dan sumur dalam serta embung baru. *)</p> <p>d) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan;</p>	<p>(1) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana dasar permukiman</p> <p>(2) Menjamin ketersediaan air bersih; *)</p> <p>(3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;</p>

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			33) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	a) Peningkatan dan pengembangan kondisi sarana prasarana lingkungan hidup; b) Penanaman kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan. *) c) Pembangunan Petungkriyono sebagai kawasan <i>Cultural Techno Forestry Park</i> .	(1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
6	Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah	a. Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah.	34) Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah..	a) Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Iptek; b) Pengembangan potensi kepemudaan dan olah raga; c) Peningkatan partisipasi kearifan lokal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah	(1) Meningkatkan keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah
7	Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah	a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.	35) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah 36) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal	a) Peningkatan mekanisme pelayanan perijinan melalui SOP, perizinan online, perizinan dengan jemput bola, fasilitas pengaduan, SDM aparatur yang handal, penyederhanaan prosedur dan koordinasi antar lembaga dan dukungan infrastruktur; *) b) Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah. c) Penyediaan 1.600 hektar lahan investasi; *)	(1) Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global. (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; (3) Membuka kesempatan investasi*)

Keterangan : *) 12 Mandat Rakyat

B. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan **tahun keempat** dari pembangunan Daerah jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 juga disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, yang tertuang dalam RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan Pusat dan Daerah.

Selanjutnya untuk menentukan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Pekalongan disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu: Kelembagaan politik dan hukum yang mantap, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 adalah :

- a. **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, diarahkan melalui kebijakan: Pengelolaan sumberdaya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. **Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan**, diarahkan melalui kebijakan: pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
- c. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, diarahkan melalui kebijakan : pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d. **Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**, diarahkan melalui kebijakan revolusi mental dalam sistem pendidikan, revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- e. **Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**, diarahkan melalui kebijakan: menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, peningkatan pengaturan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

- f. **Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**, diarahkan melalui kebijakan : peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan pembangunan rendah karbon
- g. **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**, diarahkan melalui kebijakan: reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi, mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Penyusunan RKP 2020 yang mengusung tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas" dilakukan dengan penguatan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (*THIS*). Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP tahun 2020 dilakukan dengan penguatan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (*THIS*). a. Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas; b. Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta Pemerintah Daerah; c. Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; dan d. Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan untuk mewujudkan sinergi antara RKP dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dalam rangkaian Penyusunan RKP 2020.

Empat prinsip di atas melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi dalam pembahasan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN), yaitu: 1. PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; 2. PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; 3. PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; 4. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan 5. PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Tema : Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan Prioritas :

- 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan; dengan kebijakan :**
 - a) Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;
 - b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - c) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
 - d) Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; dan
 - e) Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.
- 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; dengan kebijakan :**
 - a) Meningkatkan akses hunian, air minum dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
 - b) Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda dan mendukung kawasan yang lebih maju;
 - c) Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;

- d) Membangun konektivitas transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik;
- e) Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah di akses dan berkelanjutan; dan
- f) Membangun infrastuktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; dengan kebijakan :

- a) Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM;
- b) Mempercepat transformasi struktural;
- c) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;
- d) Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; dan
- e) Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4) Ketahanan pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dengan kebijakan

- a) Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi;
- b) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
- c) Meningkatkan kuantitas kualitas dan aksesibilitas air;
- d) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim; dan
- e) Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan; dengan kebijakan :

- a) Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan;
- b) Meningkatkan stabilitas kawasan dan diplomasi ekonomi;
- c) Menegakkan hukum dan anti korupsi;
- d) Menekan peredaran gelap dan peyalahgunaan narkoba serta gangguan kamtibmas; dan
- e) Menangkal aksi terorisme, ancaman kejahatan siber serta kejahatan di laut dan perbatasan.

Target pembangunan Nasional Tahun 2020 :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar **5,30%-5,60%**;
- 2) Tingkat Kemiskinan sebesar **8,50%-9,00%**;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar **72,50**;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar **4,8%-4,51%**;
- 5) Gini Ratio (indeks) sebesar **0,375-0,380**.

2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

Visi pembangunan Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu : **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKP Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada "**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**" dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dan
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam focus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:

1) Pengurangan Kemiskinan :

- a) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya antara lain melalui: akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School* melalui pembangunan asrama SMKN di 15 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera bagi fakir miskin non produktif; stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dalam panti; peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin;
- b) Penguatan *sustainable livelihood* melalui : fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas 446 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta peningkatan akses ekonomi perempuan; peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia); dan
- c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program "*Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan*" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.

- 2) Menurunkan angka pengangguran :
 - a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*;
 - b) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum; dan
 - c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada:

- 1) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude dan learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat;
- 2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui : Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanggulangan stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; dan
- 3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; serta pencegahan perdagangan manusia.

c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, difokuskan pada :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan pertanian terintegrasi melalui agriculture estate yaitu integrasi hulu-hilir dan kerjasama antara kelompok tani dengan BUMD pangan dalam bentuk korporasi, dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit; Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya;
- 2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui : Peningkatan kapasitas usaha perikanan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; Perbaiki tata niaga perikanan;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil

- hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- 4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui operasional sistem logistik daerah oleh BUMD Pangan yaitu penyerapan produk hasil pertanian dari petani pada saat harga panen rendah dan menjual produk pada saat harga di konsumen tinggi, sehingga tercipta stabilitas harga dan stok; memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industry kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung;
 - 6) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan : Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - 7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui : Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; Pengembangan digital investment promotion; Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha;
 - 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui: peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara berupa pengadaan tanah Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga (Tahap II), dan Ngloram Cepu (Tahap I), pengembangan pelabuhan pengumpang regional; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Reaktivasi jalur Kereta Api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang (berupa FGD Tahap II), Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Magelang dan Purwokerto-Wonosobo; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor;

- 9) Peningkatan kualitas lingkungan melalui : pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan; konservasi lingkungan; pemulihan kembali lingkungan; dan
- 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui: pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*) melalui: kunjungan lapangan (*road show*) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government" (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik);
- 2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
- 3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menuju level 3,2, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian dan penegakan produk hukum;
- 4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: manajemen pengelolaan ASN berdasarkan *merit system* secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/*talent scouting*, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi;
- 5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA; dan
- 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah Tahun 2020 yaitu :

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar **15,00%**;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar **77**;
- c. Angka Kemiskinan turun menjadi **9,81%- 8,81%**;
- d. Indeks Gini sebesar **0,34**;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar **4,33%**;
- f. Pertumbuhan Ekonomi antara **5,4% – 5,7%**;
- g. Inflasi pada angka **3,0±1**;

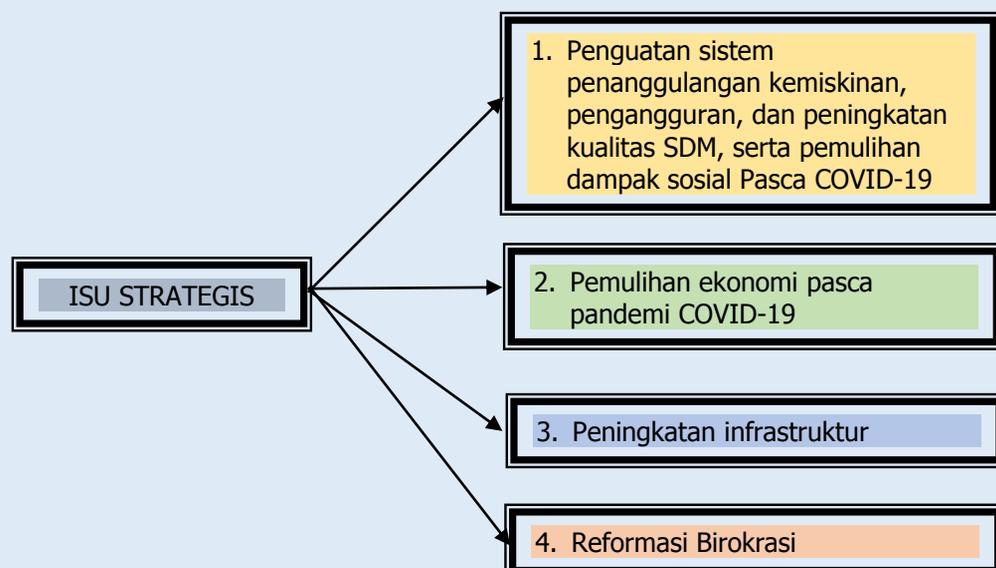
- h. PDRB per kapita sebesar **Rp.39,5 juta;**
- i. Indeks Williamson sebesar **0,59;**
- j. Nilai Tukar Petani **102,42;**
- k. Indeks Pembangunan Manusia sebesar **72,00;**
- l. Indeks Pembangunan Gender sebesar **92,06; dan**
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar **66,87.**

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi **normal yang baru** dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19 yang disebut dengan ‘Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19’.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan perubahan **isu strategis** Kabupaten Pekalongan terkait dengan Penyesuaian Prioritas dan Fokus Pembangunan pada RKPd 2020 (**Pasca Pandemi COVID-19**) dan RPJMD 2016-2021 yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut di bawah ini :

- a. Penguatan sistem penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas SDM, serta pemulihan dampak sosial Pasca COVID-19;
- b. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui pembangunan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah;
- c. Peningkatan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, berbasis pengurangan risiko bencana dan mendorong peningkatan investasi;
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, fleksibel, transparan dan akuntabel.



Gambar 4.1
Isu Strategis Pasca Pandemi COVID-19
Kabupaten Pekalongan

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Kabupaten Pekalongan, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD 2020 dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020 maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 diarahkan pada proses pemulihan dampak COVID-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus COVID-19.

Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Pembangunan Daerah tahun 2020 disamping melanjutkan arah pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan"**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi, dengan fokus kepada :
 - 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - 2) Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi.
- b. Meningkatkan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi, dengan fokus kepada :
 - 1) Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan;
 - 2) Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - 3) Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 4) Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan.
- c. Meningkatkan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif, dengan fokus kepada :
 - 1) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 2) Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha;
 - 2) Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
 - 3) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 4) Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru.
- d. Meningkatkan aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata, dengan fokus kepada:
 - 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2) pengembangan Pemasaran pariwisata;
 - 3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata; dan
 - 4) Pengembangan ekonomi kreatif.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (akses wisata, pembangunan perkotaan dan perdesaan, jalan kabupaten dan daerah rawan bencana);
- g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta sistem penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; dan
- h. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, kondusivitas dan demokratisasi, sebagai langkah perwujudan pelayanan publik yang prima dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Arah Kebijakan Pembangunan tersebut maka **Prioritas Pembangunan Tahun 2020** adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan dasar, dengan fokus pada :
 - a) Keterjangkauan biaya pendidikan;
 - b) Pemberian beasiswa miskin melalui penerima Kartu Kajian Cerdas;
 - c) Penguatan pendidikan kejuruan;
 - d) Peningkatan manajemen mutu pendidikan;
 - e) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik;
 - f) Peningkatan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - g) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
 - h) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan
 - i) Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata sehari-hari.
- 2) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, dengan fokus pada :
 - a) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pasca pandemi COVID-19 melalui upaya *Promotif* dan *Preventif* Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diantaranya :
 - (1) Peningkatan kualitas lingkungan;
 - (2) Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - (3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi;
 - (4) Peningkatan aktivitas fisik masyarakat; dan
 - b) Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - c) Pemenuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan jangkauan pelayanan kesehatan berupa pembangunan/rehabilitasi Puskesmas, Rumah Sakit khususnya Pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Kesesi; dan
 - d) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan,

b. Penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pemenuhan *basic life access* untuk mengurangi beban pengeluaran, dan *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk miskin dan rentan miskin, serta penduduk terdampak COVID-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi COVID-19.

- 1) Jaminan Perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;
- 2) Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS;
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, pemberdayaan UKM, Permodalan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dan UKM, pelatihan dan ketrampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja, Pemberdayaan, Pelatihan dan Pemberian modal bagi keluarga rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi;

- 4) Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis UKM; dan
- 5) Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, kondisi kerja yang kompetitif, perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

c. Pemulihan dan penguatan perekonomian daerah

Kebijakan pemulihan dan penguatan perekonomian daerah ini menjadi prioritas pembangunan di tahun 2020 terutama untuk memulihkan perekonomian daerah yang melambat akibat pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah sebagai pondasi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi dan upaya pemerataan pendapatan secara memadai, dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri mikro dan kecil, perdagangan dan jasa dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri mikro dan kecil (fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan standarisasi produk, fasilitasi penyediaan bahan baku industri unggulan), peningkatan promosi pariwisata, perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif, serta peningkatan ekspor produk unggulan.
- 2) Penguatan kemampuan teknologi informasi terutama bagi masyarakat dan UKM terdampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, serta pengembangan *e-commerce* produk-produk industri kreatif Kabupaten Pekalongan.
- 3) Peningkatan promosi dan penyelenggaraan event melalui peningkatan peran komunitas, swasta dan dunia pendidikan;
- 4) Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk guna peningkatan nilai tambah, pemberian bibit, benih dan pupuk, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, pengembangan teknologi tepat guna pertanian dan perkebunan serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok; dan
- 5) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; pemberian benih dan pakan ikan serta penyediaan lahan perikanan budidaya;
- 6) Peningkatan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan; peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui peningkatan pelayanan kemudahan berusaha (*doing bussiness*), mendorong realisasi investasi, optimalisasi promosi investasi, penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan industri mikro kecil, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya industry mikro kecil.

d. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada :

- 1) Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan Kabupaten, ruas jalan rawan bencana, ruas penghubung wilayah kabupaten/kota, peningkatan akses ke wilayah atas, serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian;
- 2) Peningkatan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lumbung pangan dan daerah rawan kekeringan; dan
- 3) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, dan drainase di wilayah kumuh serta pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air, udara dan tanah.

e. Tata kelola pemerintahan, ketahanan fiskal dan kondusivitas wilayah untuk menjaga dinamika pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada :

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi seperti saat terjadinya pandemi COVID-19. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain dalam masa pemulihan COVID-19 untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, ditengah melambatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi.

Adapun fokus kebijakannya meliputi :

- 1) Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi COVID-19 melalui :
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat dengan penerapan pelayanan *daring/online* dan atau pelayanan keliling kepada masyarakat;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
 - c) Mendorong kesiapan pemerintah desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain untuk membangun jejaring sosial komunitas sebagai gerakan perjuangan bersama;
 - d) Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
 - e) Penataan kelembagaan/organisasi, serta penyusunan peta proses bisnis (*cascading*) organisasi perangkat daerah. *Cascading* dibangun dalam kerangka penyalarsan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan. *Cascading* dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan. Sasaran IKU (Pemda), sasaran perangkat daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan masuk dalam aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi.

- f) Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); perkuatan kapabilitas APIP, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, optimalisasi SIMWAS-Online guna percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 - g) Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka untuk mewujudkan aparatur yang semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan.
 - h) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah dengan mendorong kesiapan dunia usaha, dengan penerapan protokol baru dalam menjalankan usaha serta diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakat seragam dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain yang dikeluarkan setiap perangkat daerah.
- 2) Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama seperti pajak dan retribusi, serta mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan (KPBU, CSR dan Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP));
- 3) Peningkatan kemandirian dan ketertiban guna menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan Daerah tahun 2020 merupakan upaya dalam rangka pencapaian target sasaran tahun 2020 yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar **2,00-3,00%**;
- b. Laju Inflasi diprediksi pada **3,0 ± 1 %**;
- c. PDRB Perkapita diprediksi sebesar **Rp. 25.526.261,00**;
- d. Persentase Penduduk Miskin diprediksi sebesar **10,61%**;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar **70,31** dengan komponen :
 - 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar **73,78 tahun**;
 - 2) Angka Harapan Lama Sekolah sebesar **12,21 tahun**;
 - 3) Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar **7,40 tahun**; dan
 - 4) Pengeluaran Perkapita disesuaikan sebesar **Rp. 10.575.000** orang/tahun.
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksi pada angka **4,55%** :

**BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

A. Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab III, maka kerangka pendanaan Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 5.1.

**Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Perubahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020**

NO.	URAIAN	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020
A	PENDAPATAN DAERAH	2.422.348.910.400	2.318.988.832.870	2.073.307.685.728
1	Pendapatan Asli Daerah	500.000.000.000	466.818.349.724	344.496.913.582
1.2	Hasil Pajak Daerah	161.833.613.005	90.091.441.802	81,355,950,350
1.3	Hasil Retribusi Daerah	19.927.543.101	27.289.085.368	18,105,404,210
1.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.556.474.600	13.231.474.600	10,122,914,114
1.5	Lain-lain PAD yang Sah	309.682.369.294	336.206.374.954	234,912,644,908
2	Dana Perimbangan	1.354.915.321.000	1.346.752.233.000	1,210,049,248,000
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.523.454.000	26.704.775.000	27,912,225,000
2.2	Dana Alokasi Umum	967.286.335.000	979.933.360.000	890,703,494,000
2.3	Dana Alokasi Khusus	358.105.532.000	340.114.098.000	291,433,529,000
3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	567.433.589.400	505.418.250.146	518,661,524,146
3.1	Pendapatan Hibah	78.563.040.000	83.563.040.000	83,563,040,000
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	107.255.235.400	115.244.920.146	115,244,920,146
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	294.935.985.000	311.610.290.000	304,324,192,000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	86.679.329.000	-	15,529,372,000
B	BELANJA DAERAH	3.269.956.078.622	2.446.656.142.301	2.234.259.280.671
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.350.069.921.800	1.356.458.634.040	1.309.991.701.929
2.1.1	Belanja Pegawai	865.193.806.200	852.074.394.913	812.844.996.347
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	61.700.000.000	80.020.379.375	80.885.220.830
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.000.000.000	15.939.939.000	21.312.750.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	18.176.115.600	10.690.713.652	9.390.713.652
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	385.000.000.000	394.733.207.100	377.558.021.100
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	8.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.919.886.156.822	1.090.197.508.261	924.267.578.742
2.2.1	Belanja Pegawai	455,833,694,250	183.751.865.921	177.481.252.378
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	710,780,651,514	489.121.313.842	446,793,591,725
2.2.3	Belanja Modal	753,271,811,058	417.324.328.498	299,992,734,639
	SURPLUS/DEFISIT	(10.000.000.000)	(127.667.309.431)	(154.856.594.943)
C	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	127.667.309.431	154.856.594.943
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	127.667.309.431	159.856.594.943
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000	127.667.309.431	159.856.594.943
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-

NO.	U R A I A N	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	5.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
SILPA		0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan dan BAPPEDA LITBANG Kab. Pekalongan, 2020

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah (Pagu anggaran 182.747.924.573)					
	a. Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Siwalan dan Wonokerto	a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	530,000,000	321,222,000	28.688.150	-292.533.850
	b. Pembangunan Pasar Kedungwuni	b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	26,200,000,000	12,059,399,600	9.964.759.200	-2.094.640.400
	c. Pembangunan Pusat UMKM di Kedungwuni	c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;	750,000,000	198,896,650	52.662.606	-146.234.044
	a. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penangan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, dan rawan banjir	a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	48,225,492,500	8,923,603,500	6.653.299.400	-2.270.304.100
	a. Pemenuhan layanan dasar pendidikan berupa penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB), dan ruang Kelas Baru SMP/MTs untuk meningkatkan daya tampung siswa lulusan SD/MI	a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	170,570,616,000	159,326,994,900	165.568.715.217	6.241.720.317
	b. Pemberian beasiswa miskin melalui penerima Kartu Kajian Cerdas	a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
	c. Penyediaan pendampingan BOS peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Dasar	a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
	d. Peningkatan kuantitas dan	a. Program Manajemen Pelayanan	1,888,000,000	1,418,916,000	479.800.000	-939.116.000

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	Pendidikan				
2.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM (Pagu anggaran 53.327.897.739)					
	a. Pemenuhan layanan dasar kesehatan berupa jaminan kesehatan masyarakat non kuota APBN, pemberian layanan penerima kartu Kajein Sehat, Jamkesda	a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	810,540,000 20,920,760,000	526,168,850 40,706,131,629	497.538.850 27.295.001.429	-28.630.000 -13.411.130.200
	b. Pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit khususnya Pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Kesesi , serta peningkatan Tenaga Kesehatan yang memenuhi sertifikasi	a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	12,550,000,000 25,500,000,000	12,880,390,800 12,700,378,000	12.899.975.000 11.614.072.000	19.584.200 -1.086.306.000
	a. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM, Permodalan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dan UKM, pelatihan dan ketrampilan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja, Pemberdayaan, Pelatihan dan Pemberian modal bagi keluarga rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan kesempatan Kerja c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2,550,000,000 230,000,000 305,000,000	1,890,903,000 228,263,950 216,345,000	869.340.710 108.665.050 43.304.700	-1.021.562.290 -119.598.900 -173.040.300

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran (Pagu anggaran 30.080.173.724)					
	b. Jaminan Perlindungan sosial, utamanya bagi kepala rumah tangga miskin non produktif;	a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,360,000,000	838,221,700	770.000.000	-68.221.700
		b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	951,000,000	212,156,400	113.275.300	-98.881.100
		c. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;	593,000,000	311,139,700	18.738.600	-292.401.100
		d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	934,666,000	423,227,100	291.226.100	-132.001.000
		e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;	1,142,617,000	839,913,700	330.846.400	-509.067.300
	c. Verifikasi dan validasi sasaran program Kartu Kajian Sehat dengan data BDT	a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20,920,760,000	40,706,131,629	27.295.001.429	-13.411.130.200
	d. Penyediaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi Nomor Induk Kependudukan guna memenuhi akses layanan sosial dasar	a. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)	630,627,000	413,610,600	239.775.435	-173.835.165
	e. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal, pemberdayaan UMKM, Permodalan bagi kelompok usaha bersama (KUBE), dan UKM, pelatihan dan ketrampilan kerja	a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,550,000,000	1,890,903,000	869.340.710	-1.021.562.290
		b. Program Peningkatan kesempatan Kerja	230,000,000	228,263,950	108.665.050	-119.598.900

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	di berbagai Balai Latihan Kerja, Pemberdayaan, Pelatihan dan Pemberian modal bagi keluarga rawan sosial ekonomi dan wanita rawan sosial ekonomi	c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	305,000,000	216,345,000	43.304.700	-173.040.300
	f. Pengembangan kewirausahaan pemuda untuk meningkatkan ketrampilan serta menumbuhkan jiwa wirausaha pemuda dan wirausaha baru berbasis UKM					
	g. Perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, kondisi kerja yang kompetitif, perbaikan iklim dan penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja					
4.	Peningkatan kualitas infrastruktur (Pagu anggaran 100.944.250.565)					
	b. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang merupakan ruas alternatif jalan Kabupaten, ruas jalan rawan bencana, ruas penghubung wilayah kabupaten/kota, peningkatan akses ke wilayah atas, serta ruas pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian	a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	381,358,995,000	115,635,049,400	56.782.886.038	-58.852.163.362
	c. Penanganan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan keselamatan pada	a. Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum	46,225,000,000	13,953,351,390	11.498.151.390	-2.455.200.000

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah rawan kecelakaan dan Konektifitas wilayah	b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	6,550,000,000	1,585,603,300	530.750.000	-1.054.853.300
		c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,970,000,000	568,156,400	267.570.300	-300.586.100
		d. Program Peningkatan Pengamanan dan pengendalian Lalu Lintas	2,950,000,000	1,161,847,000	67.793.957	-1.094.053.043
	d. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi, penanganan bangunan penampungan air pada daerah lumbung pangan, dan rawan banjir	a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	48,225,492,500	8,923,603,500	6.653.299.400	-2.270.304.100
	e. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, dan drainase di wilayah kumuh serta pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air, udara dan tanah	a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4,784,215,000	9,102,267,100	5.434.514.100	-3.667.753.000
		b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,139,200,000	7,339,534,800	6.427.778.069	-911.756.731
		c. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	4,469,065,000	1,633,142,700	573.896.311	-1.059.246.389
	f. Pengembangan <i>Early Warning system</i> bencana berbasis masyarakat dan pengembangan masyarakat tangguh bencana	a. Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob	289,836,247,400	13,787,478,500	12.707.611.000	-1.079.867.500
		b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam				
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang <i>good and clean governance</i>					
	(Pagu anggaran 28.767.886.389)					
	a. Penguatan pengawasan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penanganan	a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	39,000,000	38,196,000	11.016.000	-27.180.000

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengaduan masyarakat melalui berbagai media dan percepatan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan	b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3,222,500,000	3,151,857,000	1.539.051.100	-1.612.805.900
	b. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penggunaan elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	a. Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur	1,270,000,000	1,147,387,950	3.304.650.200	-1.145.544.800
	c. Penataan sistem perencanaan dan penganggaran yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai melalui integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran (<i>E-Planning and Budgeting</i>)	a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3,470,000,000	2,656,421,764	2.889.004.164	232.582.400
	d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi	a. Program Penataan Administrasi Kependudukan b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan d. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	3,922,220,100 872,000,000 7,233,326,750 18,014,750,000	4,073,978,600 483,961,900 5,799,408,290 15,394,859,350	3.139.571.100 137.728.900 2.352.055.575 15.394.809.350	-934.407.500 -346.233.000 -3.447.352.715 -50.000

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah 2020	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2020	RKPD 2020	APBD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 (Pagu Anggaran 48.633.402.900)					
	a. Penanganan Kesehatan	a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	74.000.000.000	83.385.038.864	97.231.115.264	13.846.076.400
	b. Penanganan Kesehatan	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.385.550.000	3.726.427.000	10.451.349.500	6.724.922.500
	c. Penanganan Kesehatan	a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.335.500.615	628.681.800	3.884.931.800	3.256.250.000
	d. Penanganan Kesehatan	a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.550.000.000	12.880.390.800	14.276.344.800	1.395.954.000
	e. Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan <i>Social Safety Net</i> /Jaring Pengaman Sosial	a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	200.000.000	187.961.800	23.598.161.800	23.410.200.000
	TOTAL PAGU 444.501.535.890					

Sumber : BAPPEDA LITBANG dan BPKD Kab. Pekalongan, 2020

Tabel 5.3
REKAP RKPD PERUBAHAN BERDASARKAN OPD
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

NO	SKPD	Jumlah Usulan	Penetapan RKPD	Anggaran Penetapan	Pagu Perubahan	Tambah/Kurang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81	256,766,163,000	187,262,331,190	183,401,391,349	-3,860,939,841
2	Dinas Kesehatan	48	163,931,344,715	172,241,639,143	166,893,770,566	-5,347,868,577
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	2	173,441,999,000	194,321,340,706	157,713,701,296	-36,607,639,410
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	2	77,442,000,000	78,123,399,294	79,847,276,524	1,723,877,230
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	111	757,820,334,002	146,884,546,600	82,540,528,538	-64,344,018,062
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	56	99,033,295,000	43,805,134,060	40,006,857,874	-3,798,276,186
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23	7,857,549,800	5,938,688,200	3,144,864,600	-2,793,823,600
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	19	4,461,366,250	3,745,928,150	1,529,222,444	-2,216,705,706
9	Dinas Sosial	34	9,865,802,000	4,644,735,266	25,541,316,470	20,896,581,204
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	3,626,710,000	1,988,977,250	1,993,057,300	4,080,050
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	60	41,751,317,400	15,004,635,800	8,791,626,677	-6,213,009,123
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16	6,709,644,100	6,199,079,400	4,264,585,400	-1,934,494,000
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	52	20,634,212,450	16,040,863,300	13,940,916,850	-2,099,946,450
14	Dinas Perhubungan	19	18,936,450,000	5,336,432,800	2,524,808,857	-2,811,623,943
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	22	8,229,300,000	6,120,756,000	3,765,660,999	-2,355,095,001
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	25	6,506,800,000	4,621,150,150	2,257,876,148	-2,363,274,002
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata	26	30,484,000,000	12,149,805,900	3,881,147,376	-8,268,658,524
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22	12,999,760,000	2,916,441,900	1,747,632,251	-1,168,809,649
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22	8,692,300,000	4,055,260,700	2,571,628,642	-1,483,632,058

NO	SKPD	Jumlah Usulan	Penetapan RKPD	Anggaran Penetapan	Pagu Perubahan	Tambah/Kurang
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	43	41,475,110,000	25,671,185,100	15,089,067,411	-10,582,117,689
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan	24	7,865,880,000	7,144,068,964	5,860,104,497	-1,283,964,467
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	47	44,735,536,600	41,302,415,400	37,169,398,378	-4,133,017,022
23	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	20	10,090,523,000	8,183,393,920	2,215,202,655	-5,968,191,265
24	Inspektorat	22	4,901,800,000	4,663,535,900	2,102,376,675	-2,561,159,225
25	Bagian Umum	20	14,571,400,000	13,984,644,200	11,241,130,210	-2,743,513,990
26	Bagian Tata Pemerintahan	5	1,220,000,000	1,080,828,200	882,930,700	-197,897,500
27	Bagian Hukum	13	1,420,000,000	1,232,218,500	378,934,650	-853,283,850
28	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	8	2,263,920,000	2,040,445,250	722,827,332	-1,317,617,918
29	Bagian Pembangunan	5	845,000,000	732,164,500	419,587,043	-312,577,457
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	5,671,250,000	4,963,978,050	4,685,187,800	-278,790,250
31	Bagian Perekonomian	5	870,000,000	618,558,800	307,600,000	-310,958,800
32	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	5	2,317,000,000	2,134,092,200	1,127,565,830	-1,006,526,370
33	Sekretariat DPRD	25	32,281,936,755	36,013,180,418	31,462,520,090	-4,550,660,328
34	Kecamatan Kajen	17	2,228,513,550	1,943,099,900	1,682,414,600	-260,685,300
35	Kecamatan Sragi	19	3,107,152,000	2,291,996,500	1,760,139,450	-531,857,050
36	Kecamatan Wiradesa	35	8,436,900,000	6,679,072,180	6,382,268,280	-296,803,900
37	Kecamatan Kedungwuni	26	5,719,630,000	4,818,189,130	4,409,450,130	-408,739,000
38	Kecamatan Buaran	25	4,605,150,000	4,035,722,450	3,843,814,750	-191,907,700
39	Kecamatan Tirto	20	1,130,703,200	709,278,300	458,279,100	-250,999,200
40	Kecamatan Bojong	23	927,000,000	784,527,340	492,216,240	-292,311,100
41	Kecamatan Wonopringgo	19	2,282,400,000	691,716,200	461,656,800	-230,059,400
42	Kecamatan Karanganyar	29	1,320,000,000	732,325,300	494,704,300	-237,621,000
43	Kecamatan Doro	24	766,674,000	586,163,700	374,732,600	-211,431,100
44	Kecamatan Talun	26	1,216,960,000	745,202,400	495,597,400	-249,605,000

NO	SKPD	Jumlah Usulan	Penetapan RKPD	Anggaran Penetapan	Pagu Perubahan	Tambah/Kurang
45	Kecamatan Lebakbarang	21	1,075,930,000	659,731,300	446,181,600	-213,549,700
46	Kecamatan Kandangserang	31	716,150,000	579,211,200	390,801,300	-188,409,900
47	Kecamatan Paninggaran	22	1,221,000,000	601,416,760	388,639,960	-212,776,800
48	Kecamatan Kesesi	21	1,268,100,000	688,835,500	494,767,300	-194,068,200
49	Kecamatan Petungkriyono	20	950,200,000	636,732,500	418,859,300	-217,873,200
50	Kecamatan Wonokerto	23	1,285,050,000	556,426,450	349,649,150	-206,777,300
51	Kecamatan Siwalan	20	767,600,000	665,730,540	516,852,450	-148,878,090
52	Kecamatan Karangdadap	20	1,141,340,000	626,275,400	384,250,600	-242,024,800
	TOTAL	1,343	1,919,886,156,822	1,090,197,508,261	924,267,578,742	-165,929,929,519

Sumber : BAPPEDA LITBANG dan BPKD Kab. Pekalongan, 2020

**Tabel 5.4
REKAP RKPD PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

Kode	URUSAN / BIDANG / PROGRAM		JUMLAH USULAN	PAGU INDIKATIF RKPD TH 2020	Penetapan APBD 2020	Perubahan APBD 2020	Tambah/Kurang
10101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
00		NON URUSAN					
00	00	NON URUSAN					
00	00	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	2.512.200.000	2.530.202.340	2.084.564.240	-445.638.100
00	00	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2.023.000.000	1.743.176.750	1.393.323.008	-349.853.742
00	00	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100.000.000	72.040.000	20.000.000	-52.040.000
01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	01	PENDIDIKAN					
01	01	15 Program Pendidikan Anak Usia Dini	30	38.166.700.000	10.161.965.300	6.729.389.600	-3.432.575.700
01	01	16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31	170.570.616.000	159.326.994.900	165.568.715.217	6.241.720.317
01	01	18 Program Pendidikan Non Formal	2	7.111.000.000	6.969.480.900	6.734.416.684	-235.064.216
01	01	20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3	30.554.980.000	1.966.909.200	240.524.600	-1.726.384.600
01	01	22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3	1.888.000.000	1.418.916.000	479.800.000	-939.116.000
02		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	16	KEBUDAYAAN					
02	16	16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3	2.223.377.000	1.745.602.200	100.658.000	-1.644.944.200
02	16	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	1.616.290.000	1.327.043.600	50.000.000	-1.277.043.600

Sub Total			81	256.766.163.000	187.262.331.190	183.401.391.349	-3.860.939.841	
10201 Dinas Kesehatan								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	2.702.700.000	2.427.113.100	1.799.288.627	-627.824.473
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	4.321.000.000	4.266.823.000	4.407.061.900	140.238.900
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	730.000.000	264.951.800	28.800.000	-236.151.800
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	02		KESEHATAN					
01	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5	10.385.550.000	3.726.427.000	11.122.383.500	7.395.956.500
01	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	355.300.000	299.018.000	200.000.000	-99.018.000
01	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	1.618.053.100	1.280.835.100	1.144.351.000	-136.484.100
01	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	1.250.000.000	1.412.303.000	1.187.440.500	-224.862.500
01	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1	800.000.000	772.635.000	6.130.000	-766.505.000
01	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4	1.335.500.615	628.681.800	993.999.800	365.318.000
01	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	810.540.000	526.168.850	497.538.850	-28.630.000
01	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	20.920.760.000	40.706.131.629	27.295.001.429	-13.411.130.200
01	02	25	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	5	12.550.000.000	12.880.390.800	12.899.975.000	19.584.200

01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	2	25.500.000.000	12.700.378.000	11.614.072.000	-1.086.306.000
01	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	100.000.000	33.384.000	-	-33.384.000
01	02	31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1	30.000.000	277.495.000	263.985.000	-13.510.000
01	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	4	5.665.923.000	6.099.246.900	5.803.842.000	-295.404.900
01	02	33	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1	581.018.000	421.199.300	119.397.600	-301.801.700
01	02	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2	74.000.000.000	83.385.038.864	87.496.180.360	4.111.141.496
01	02	37	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	2	275.000.000	133.418.000	14.323.000	-119.095.000
Sub Total				48	163.931.344.715	172.241.639.143	166.893.770.566	-5.347.868.577
10202 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton								
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	02		KESEHATAN					
01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1	20.441.999.000	11.857.132.706	11.857.132.706	0
01	02	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1	153.000.000.000	182.464.208.090	145.856.568.590	-36.607.639.500
Sub Total				2	173.441.999.000	194.321.340.796	157.713.701.296	-36.607.639.500
10203 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen								
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					

01	02		KESEHATAN					
01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1	2.702.000.000	3.163.399.294	3.163.399.294	0
01	02	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1	74.740.000.000	74.960.000.000	76.683.877.230	1.723.877.230
Sub Total				2	77.442.000.000	78.123.399.294	79.847.276.524	1.723.877.230
10301				Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	3.095.000.000	2.529.154.000,0	2.232.512.200	-296.641.800
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1.305.000.000	489.730.000,0	347.804.700	-141.925.300
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	145.000.000	50.000.000,0	-	-50.000.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	70.000.000	35.000.000,0	-	-35.000.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
01	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan	3	3.050.000.000	283.419.000,0	200.000.000	-83.419.000
01	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6	48.225.492.500	8.923.603.500,0	6.653.299.400	-2.270.304.100
01	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8	25.544.599.102	2.166.992.800,0	246.532.800	-1.920.460.000

01	03	32	Program Perencanaan Teknis Infrastruktur	4	1.550.000.000	1.185.875.400,0	903.674.700	-282.200.700
01	03	35	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	1.000.000.000	266.350.600,0	115.514.200	-150.836.400
01	03	37	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	69	381.358.995.000	115.635.049.400,0	56.782.886.038	-58.852.163.362
01	03	38	Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob	6	289.836.247.400	13.787.478.500,0	12.707.611.000	-1.079.867.500
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	04		PERTANAHAN					
02	04	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	2	2.640.000.000	1.531.893.400,0	2.350.693.500	818.800.100
Sub Total				111	757.820.334.002	146.884.546.600	82.540.528.538	-64.344.018.062
10401		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	2.502.000.000	1.503.476.770	1.178.983.778	-324.492.992
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8	22.285.000.000	6.774.542.000	4.325.891.775	-2.448.650.225
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	50.000.000	43.340.000	-	-43.340.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
01	03	32	Program Perencanaan Teknis Infrastruktur	4	720.000.000	478.787.200	251.073.045	-227.714.155
01	03	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	2	46.225.000.000	13.953.351.390	11.498.151.390	-2.455.200.000

01	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
01	04	15	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	4	750.000.000	588.360.800	310.929.800	-277.431.000
01	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4	6.968.815.000	1.786.096.900	325.079.800	-1.461.017.100
01	04	21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3	4.784.215.000	9.102.267.100	5.434.514.100	-3.667.753.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	05		LINGKUNGAN HIDUP					
02	05	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6	9.139.200.000	7.339.534.800	6.427.778.069	-911.756.731
02	05	16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	13	4.469.065.000	1.633.142.700	573.896.311	-1.059.246.389
02	05	19	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	2	240.000.000	111.503.400	60.562.450	-50.940.950
02	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2	900.000.000	490.731.000	143.198.500	-347.532.500
Sub Total				56	99.033.295.000	43.805.134.060	40.006.857.874	-3.798.276.186
10501								
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	1.518.978.800	1.213.385.500	1.124.035.500	-89.350.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	2.894.500.000	1.922.656.800	452.232.000	-1.470.424.800
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2	295.063.800	289.183.800	189.392.100	-99.791.700

00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	382.000.000	317.022.600	34.771.000	-282.251.600
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
01	05	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	3	1.623.377.200	1.528.269.300	974.225.400	-554.043.900
01	05	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	1	77.000.000	63.611.200	20.475.200	-43.136.000
01	05	26	Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa	1	40.000.000			
01	05	27	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2	425.000.000	304.046.200	143.790.000	-160.256.200
01	05	28	Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup	3	601.630.000	300.512.800	205.943.400	-94.569.400
Sub Total				23	7.857.549.800	5.938.688.200	3.144.864.600	-2.793.823.600
10502 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	451.456.250	424.086.950	320.781.537	-103.305.413
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	586.000.000	315.644.900	117.562.200	-198.082.700
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	40.000.000	29.940.000	-	-29.940.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					

01	05	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1	1.332.270.000	1.202.833.000	647.336.007	-555.496.993
01	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3	1.011.640.000	1.021.472.800	37.960.000	-983.512.800
01	05	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	3	635.000.000	553.886.300	340.355.800	-213.530.500
01	05	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1	155.000.000	106.524.200	17.764.000	-88.760.200
01	05	24	Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil	1	250.000.000	91.540.000	47.462.900	-44.077.100
Sub Total				19	4.461.366.250	3.745.928.150	1.529.222.444	-2.216.705.706
10601				Dinas Sosial				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	742.892.000	675.539.596	527.336.505	-148.203.091
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	826.000.000	392.803.000	236.964.700	-155.838.300
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	20.000.000	20.000.000	-	-20.000.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	06		SOSIAL					
01	06	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	4	3.360.000.000	838.221.700	770.000.000	-68.221.700
01	06	16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4	951.000.000	212.156.400	113.275.300	-98.881.100
01	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	934.666.000	423.227.100	291.226.100	-132.001.000

01	06	22	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	2	465.000.000	330.161.180	252.953.430	-77.207.750
01	06	23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3	1.142.617.000	839.913.700	330.846.400	-509.067.300
01	06	26	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1	200.000.000	187.961.800	22.760.200.000	22.572.238.200
01	06	27	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)	4	630.627.000	413.610.600	239.775.435	-173.835.165
01	06	28	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	4	593.000.000	311.139.700	18.738.600	-292.401.100
Sub Total				34	9.865.802.000	4.644.734.776	25.541.316.470	20.896.581.694
10602				Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	542.350.000	365.551.700	199.274.400	-166.277.300
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	400.000.000	313.048.200	94.670.400	-218.377.800
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	5.000.000	5.000.000	-	-5.000.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	06		SOSIAL					
01	06	26	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	6	2.679.360.000	1.305.377.350	1.699.112.500	393.735.150
Sub Total				15	3.626.710.000	1.988.977.250	1.993.057.300	4.080.050
20301				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					

00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	1.693.500.000	1.395.108.900	1.093.309.581	-301.799.319
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	613.894.000	301.443.000	166.922.000	-134.521.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	03		PANGAN					
02	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	4	780.000.000	507.592.400	287.233.000	-220.359.400
02	03	16	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	1	425.000.000	290.658.200	33.476.800	-257.181.400
03			URUSAN PILIHAN					
03	03		PERTANIAN					
03	03	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	300.000.000	240.350.000	79.345.400	-161.004.600
03	03	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	1	145.000.000	130.000.000	26.525.200	-103.474.800
03	03	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	1	50.000.000	50.000.000	25.882.000	-24.118.000
03	03	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	6	2.537.678.400	1.293.541.800	937.198.800	-356.343.000
03	03	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	2	957.000.000	400.110.800	27.041.000	-373.069.800
03	03	21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1	200.000.000	150.000.000	35.339.600	-114.660.400
03	03	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	7	1.530.000.000	805.697.100	203.584.496	-602.112.604
03	03	23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	27	32.519.245.000	9.440.133.600	5.875.768.800	-3.564.364.800
Sub Total				60	41.751.317.400	15.004.635.800	8.791.626.677	-6.213.009.123

20601			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	1.057.079.600	943.719.800	695.458.300	-248.261.500
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1.730.344.400	1.144.781.000	429.556.000	-715.225.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	36.600.000	36.600.000	-	-36.600.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	06		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
02	06	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	7	3.922.220.100	4.073.978.600	3.139.571.100	-934.407.500
Sub Total				16	6.709.644.100	6.199.079.400	4.264.585.400	-1.934.494.000
20701			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga					
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	810.640.000	692.917.550	530.189.550	-162.728.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	375.000.000	251.472.900	70.550.000	-180.922.900
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	35.000.000	35.000.000	1.800.000	-33.200.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					

02	02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
02	02	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	1	300.000.000			
02	02	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	3	510.784.450	409.761.850	93.035.000	-316.726.850
02	02	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	2	255.000.000	54.493.600	-	-54.493.600
02	02	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	2	351.393.000	480.946.100	216.500.000	-264.446.100
02	07		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
02	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	255.000.000	179.241.200	113.800.200	-65.441.000
02	07	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	200.000.000	136.594.400	21.435.400	-115.159.000
02	07	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4	3.863.209.000	3.379.204.700	2.599.249.100	-779.955.600
02	07	22	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1	135.000.000	127.013.100	2.920.000	-124.093.100
02	07	23	Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	2	365.000.000	161.176.000	12.261.000	-148.915.000
02	07	24	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	790.000.000	164.900.000	65.785.000	-99.115.000
02	07	25	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	7	2.630.000.000	1.288.251.000	2.480.519.300	1.192.268.300
02	07	26	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	1	80.000.000	56.953.600	-	-56.953.600
02	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

02	08	26	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	15	9.678.186.000	8.622.937.300	7.732.872.300	-890.065.000
Sub Total				52	20.634.212.450	16.040.863.300	13.940.916.850	-2.099.946.450
20901				Dinas Perhubungan				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	1.303.950.000	1.254.051.300	1.086.363.800	-167.687.500
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	3.772.500.000	642.524.800	495.177.300	-147.347.500
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	240.000.000	74.250.000	72.580.000	-1.670.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	150.000.000	50.000.000	4.573.500	-45.426.500
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	09		PERHUBUNGAN					
02	09	16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	3	6.550.000.000	1.585.603.300	530.750.000	-1.054.853.300
02	09	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4	3.970.000.000	568.156.400	267.570.300	-300.586.100
02	09	19	Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas	1	2.950.000.000	1.161.847.000	67.793.957	-1.094.053.043
Sub Total				19	18.936.450.000	5.336.432.800	2.524.808.857	-2.811.623.943
21001				Dinas Komunikasi Dan Informatika				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	2.050.000.000	1.580.681.800	1.413.770.591	-166.911.209
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	757.500.000	557.131.800	519.636.972	-37.494.828

02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
02	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	3	3.184.550.000	2.477.920.100	1.256.908.487	-1.221.011.613
02	10	19	Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi	3	947.250.000	791.784.800	432.225.100	-359.559.700
02	10	20	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	3	590.000.000	355.133.900	101.486.633	-253.647.267
02	10	21	Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah	2	350.000.000	188.141.600	30.694.350	-157.447.250
02	14		STATISTIK					
02	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	2	350.000.000	169.962.000	10.938.866	-159.023.134
Sub Total				22	8.229.300.000	6.120.756.000	3.765.660.999	-2.355.095.001
21201	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja							
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	1.142.800.000	991.890.500	824.545.338	-167.345.162
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	692.000.000	333.799.200	233.526.000	-100.273.200
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	70.000.000	47.500.000	4.591.000	-42.909.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	01		TENAGA KERJA					
02	01	15	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5	2.550.000.000	1.890.903.000	869.340.710	-1.021.562.290
02	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	230.000.000	228.263.950	108.665.050	-119.598.900

02	01	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2	305.000.000	216.345.000	43.304.700	-173.040.300
02	12		PENANAMAN MODAL					
02	12	15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	2	530.000.000	321.222.000	28.688.150	-292.533.850
02	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	4	872.000.000	483.961.900	137.728.900	-346.233.000
03			URUSAN PILIHAN					
03	08		TRANSMIGRASI					
03	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	115.000.000	107.264.600	7.486.300	-99.778.300
Sub Total				25	6.506.800.000	4.621.150.150	2.257.876.148	-2.363.274.002
21301		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata						
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	1.321.000.000	1.227.279.100	1.016.376.400	-210.902.700
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	5.270.000.000	198.167.600	57.768.800	-140.398.800
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	30.000.000	30.000.000	-	-30.000.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
02	13	15	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	4	2.845.000.000	1.423.949.300	205.324.000	-1.218.625.300
02	13	20	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	8	12.570.000.000	3.276.314.500	672.084.776	-2.604.229.724

03			URUSAN PILIHAN					
03	02		PARIWISATA					
03	02	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	4.218.000.000	2.597.262.800	790.343.600	-1.806.919.200
03	02	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3	4.130.000.000	3.149.975.600	790.689.600	-2.359.286.000
03	02	17	Program Pengembangan Kemitraan	1	100.000.000	246.857.000	348.560.200	101.703.200
Sub Total				26	30.484.000.000	12.149.805.900	3.881.147.376	-8.268.658.524
21801 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	829.300.000	765.900.900	544.653.657	-221.247.243
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	258.500.000	252.838.000	106.785.200	-146.052.800
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	30.000.000	30.000.000	2.047.444	-27.952.556
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	17		PERPUSTAKAAN					
02	17	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	8	10.738.960.000	984.786.100	432.666.700	-552.119.400
02	18		KEARSIPAN					
02	18	16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	3	563.000.000	579.780.000	500.281.700	-79.498.300
02	18	17	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan	1	195.000.000	158.037.300	151.136.950	-6.900.350
02	18	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	1	210.000.000	93.124.600	6.924.000	-86.200.600

02	18	19	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	175.000.000	51.975.000	3.136.600	-48.838.400
Sub Total				22	12.999.760.000	2.916.441.900	1.747.632.251	-1.168.809.649
30101 Dinas Kelautan Dan Perikanan								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	698.300.000	633.598.000	462.299.200	-171.298.800
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	249.000.000	194.178.000	124.810.242	-69.367.758
03			URUSAN PILIHAN					
03	01		KELAUTAN DAN PERIKANAN					
03	01	20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	8	3.610.000.000	2.003.277.400	982.836.000	-1.020.441.400
03	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3	3.375.000.000	978.978.000	928.438.500	-50.539.500
03	01	23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	510.000.000	203.229.300	72.052.200	-131.177.100
03	01	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	1	250.000.000	42.000.000	1.192.500	-40.807.500
Sub Total				22	8.692.300.000	4.055.260.700	2.571.628.642	-1.483.632.058
30701 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	3.740.000.000	3.658.483.200	2.957.290.042	-701.193.158

00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	1.557.110.000	592.242.250	363.194.909	-229.047.341
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	150.000.000	72.500.000	-	-72.500.000
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	11		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
02	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	7	2.845.000.000	1.195.611.300	610.117.000	-585.494.300
02	11	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	750.000.000	198.896.650	52.662.606	-146.234.044
02	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	850.000.000	558.491.000	244.142.060	-314.348.940
02	11	19	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	2	775.000.000	392.631.200	12.678.600	-379.952.600
02	11	20	Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi	1	125.000.000	122.572.000	30.196.000	-92.376.000
03			URUSAN PILIHAN					
03	04		PERDAGANGAN					
03	04	15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	4	805.000.000	263.025.300	54.384.597	-208.640.703
03	04	17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	1	950.000.000	656.189.800	64.424.072	-591.765.728
03	04	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	4	1.440.000.000	5.139.697.800	362.707.075	-4.776.990.725
03	04	20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional	4	26.200.000.000	12.059.399.600	9.964.759.200	-2.094.640.400

03	07		PERINDUSTRIAN					
03	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	3	538.000.000	325.250.000	57.391.200	-267.858.800
03	07	17	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	3	750.000.000	436.195.000	315.120.050	-121.074.950
Sub Total				43	41.475.110.000	25.671.185.100	15.089.067.411	-10.582.117.689
40101				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	1.225.880.000	1.094.977.100	874.977.100	-220.000.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	417.000.000	453.250.000	439.385.000	-13.865.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	75.000.000	56.646.000	-	-56.646.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	01		PERENCANAAN					
04	01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5	3.470.000.000	2.656.421.764	2.889.004.164	232.582.400
04	01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	175.000.000	166.358.200	138.726.200	-27.632.000
04	01	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	4	805.000.000	739.162.200	496.679.694	-242.482.506
04	01	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	3	883.000.000	1.102.352.200	446.232.839	-656.119.361
04	04		PENELITIAN PENGEMBANGAN					
04	04	15	Program Penelitian dan Pengembangan	3	815.000.000	874.901.500	575.099.500	-299.802.000
Sub Total				24	7.865.880.000	7.144.068.964	5.860.104.497	-1.283.964.467

40201				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	29.671.374.500	26.385.093.800	24.329.929.928	-2.055.163.872
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	2.948.982.100	2.930.651.500	2.621.785.500	-308.866.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	130.000.000	84.000.000	42.000.000	-42.000.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	02		KEUANGAN					
04	02	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	23	9.388.000.000	9.343.044.200	8.082.246.700	-1.260.797.500
04	02	16	Program Pengelolaan Aset Daerah	11	2.597.180.000	2.559.625.900	2.093.436.250	-466.189.650
Sub Total				47	44.735.536.600	41.302.415.400	37.169.398.378	-4.133.017.022
40301				Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	507.523.000	493.743.000	359.368.800	-134.374.200
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	1.483.000.000	338.020.920	248.323.500	-89.697.420
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	110.000.000	67.882.500	30.047.500	-37.835.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	110.000.000	57.430.000	8.985.000	-48.445.000

04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	03		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
04	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	8	7.680.000.000	7.107.432.500	1.520.218.800	-5.587.213.700
04	03	18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2	200.000.000	118.885.000	48.259.055	-70.625.945
Sub Total				20	10.090.523.000	8.183.393.920	2.215.202.655	-5.968.191.265
40501								
Inspektorat								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	638.000.000	577.769.900	308.683.575	-269.086.325
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	537.800.000	452.473.800	190.939.000	-261.534.800
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	05		PENGAWASAN					
04	05	15	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2	464.500.000	443.239.200	52.687.000	-390.552.200
04	05	16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	39.000.000	38.196.000	11.016.000	-27.180.000
04	05	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	9	3.222.500.000	3.151.857.000	1.539.051.100	-1.612.805.900
Sub Total				22	4.901.800.000	4.663.535.900	2.102.376.675	-2.561.159.225

4060301				Bagian Umum				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	6.446.950.000	6.316.057.400	6.012.928.210	-303.129.190
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	4.815.450.000	4.450.195.000	3.304.650.200	-1.145.544.800
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	3	3.237.000.000	3.147.551.800	1.923.551.800	-1.224.000.000
04	06	34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	72.000.000	70.840.000	-	-70.840.000
Sub Total				20	14.571.400.000	13.984.644.200	11.241.130.210	-2.743.513.990
4060302				Bagian Tata Pemerintahan				
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4	920.000.000	846.333.200	708.448.700	-137.884.500
04	06	41	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	300.000.000	234.495.000	174.482.000	-60.013.000
Sub Total				5	1.220.000.000	1.080.828.200	882.930.700	-197.897.500
4060303				Bagian Hukum				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					

00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	25.000.000	14.255.000	13.000.000	-1.255.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	110.000.000	86.238.100	-	-86.238.100
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	7	815.000.000	673.440.400	134.535.400	-538.905.000
04	06	28	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	3	470.000.000	458.285.000	231.399.250	-226.885.750
Sub Total				13	1.420.000.000	1.232.218.500	378.934.650	-853.283.850
4060304	Bagian Organisasi dan Kepegawaian							
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	356.420.000	299.098.100	113.062.600	-186.035.500
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	637.500.000	593.959.200	144.855.400	-449.103.800
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	35	Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur	5	1.270.000.000	1.147.387.950	464.909.332	-682.478.618
Sub Total				8	2.263.920.000	2.040.445.250	722.827.332	-1.317.617.918
4060305	Bagian Pembangunan							
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					

00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	110.000.000	102.035.000	79.560.343	-22.474.657
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	32	Program Pengendalian Pembangunan	3	735.000.000	630.129.500	340.026.700	-290.102.800
Sub Total				5	845.000.000	732.164.500	419.587.043	-312.577.457
4060306				Bagian Kesejahteraan Rakyat				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	220.000.000	200.901.000	176.736.000	-24.165.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	38	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	3	5.451.250.000	4.763.077.050	3.443.536.656	-1.319.540.394
Sub Total				5	5.671.250.000	4.963.978.050	4.685.187.800	-278.790.250
4060307				Bagian Perekonomian				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	80.000.000	45.560.000	-	-45.560.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	33	Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam	2	270.000.000	188.501.000	135.000.000	-53.501.000

04	06	34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2	520.000.000	384.497.800	172.600.000	-211.897.800
Sub Total				5	870.000.000	618.558.800	307.600.000	-310.958.800
4060308				Bagian Pengadaan Barang/Jasa				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	100.000.000	47.142.100	-	-47.142.100
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	32	Program Pengendalian Pembangunan	4	2.217.000.000	2.086.950.100	1.127.565.830	-959.384.270
Sub Total				5	2.317.000.000	2.134.092.200	1.127.565.830	-1.006.526.370
40604				Sekretariat DPRD				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	2.230.349.000	2.006.335.450	1.949.745.122	-56.590.328
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	5.120.842.800	4.779.436.668	3.159.318.668	-1.620.118.000
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	471.730.000	507.100.000	493.100.000	-14.000.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	353.430.000	321.140.000	156.115.000	-165.025.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10	24.105.584.955	28.399.168.300	25.704.241.300	-2.694.927.000

Sub Total			25	32.281.936.755	36.013.180.418	31.462.520.090	-4.550.660.328	
40605		Kecamatan Kajan						
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	337.479.000	322.913.100	322.633.100	-280.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	84.621.000	67.049.900	45.235.800	-21.814.100
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	5	426.663.550	383.136.900	144.545.700	-238.591.200
04	06	40	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	2	1.379.750.000	1.170.000.000	1.170.000.000	0
Sub Total			17	2.228.513.550	1.943.099.900	1.682.414.600	-260.685.300	
40606		Kecamatan Sragi						
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	335.130.000	306.861.500	334.277.600	27.416.100
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	1.171.000.000	553.858.600	104.158.600	-449.700.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	6	301.022.000	262.917.850	153.344.700	-109.573.150

04	06	40	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	2	1.300.000.000	1.168.358.550	1.168.358.550	0
Sub Total				19	3.107.152.000	2.291.996.500	1.760.139.450	-531.857.050
40607				Kecamatan Wiradesa				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	320.900.000	250.310.580	288.270.380	37.959.800
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	384.500.000	157.953.400	114.018.800	-43.934.600
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	10	456.500.000	420.808.200	129.979.100	-290.829.100
04	06	40	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	11	7.275.000.000	5.850.000.000	5.850.000.000	0
Sub Total				35	8.436.900.000	6.679.072.180	6.382.268.280	-296.803.900
40608				Kecamatan Kedungwuni				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	625.360.000	569.324.230	545.317.430	-24.006.800
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	437.270.000	211.590.400	36.590.400	-175.000.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					

04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	7	347.000.000	340.773.700	131.041.500	-209.732.200
04	06	40	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6	4.310.000.000	3.696.500.800	3.696.500.800	0
Sub Total				26	5.719.630.000	4.818.189.130	4.409.450.130	-408.739.000
40609 Kecamatan Buaran								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	230.410.000	224.639.150	192.243.950	-32.395.200
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	396.340.000	94.817.400	79.630.200	-15.187.200
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	7	228.400.000	206.265.900	61.990.600	-144.275.300
04	06	40	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6	3.750.000.000	3.510.000.000	3.509.950.000	-50.000
Sub Total				25	4.605.150.000	4.035.722.450	3.843.814.750	-191.907.700
40610 Kecamatan Tirto								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9	283.565.000	297.681.600	326.563.600	28.882.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	428.447.000	66.746.000	-	-66.746.000

04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	8	418.691.200	344.850.700	131.715.500	-213.135.200
Sub Total				20	1.130.703.200	709.278.300	458.279.100	-250.999.200
40611 Kecamatan Bojong								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	287.500.000	279.997.640	263.497.640	-16.500.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	332.000.000	204.045.200	60.775.700	-143.269.500
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	9	307.500.000	300.484.500	167.942.900	-132.541.600
Sub Total				23	927.000.000	784.527.340	492.216.240	-292.311.100
40612 Kecamatan Wonopringgo								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	300.900.000	241.259.100	254.446.100	13.187.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	1.536.500.000	114.874.100	98.497.100	-16.377.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	7	445.000.000	335.583.000	108.713.600	-226.869.400
Sub Total				19	2.282.400.000	691.716.200	461.656.800	-230.059.400
40613 Kecamatan Karanganyar								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	310.000.000	215.820.500	193.820.500	
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	473.000.000	134.176.000	118.176.000	-16.000.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	15.000.000	7.500.000	2.750.000	-4.750.000
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
01	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
01	04	15	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	2	17.000.000			
01	05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
01	05	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	25.000.000			
02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
02	05		LINGKUNGAN HIDUP					
02	05	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	50.000.000			
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	10	430.000.000	374.828.800	179.957.800	-194.871.000
Sub Total				29	1.320.000.000	732.325.300	494.704.300	-237.621.000
40614				Kecamatan Doro				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	183.680.000	175.306.400	174.056.400	-1.250.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	208.694.000	112.745.800	72.716.100	-40.029.700
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	3.700.000	3.700.000	-	-3.700.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	12	370.600.000	294.411.500	127.960.100	-166.451.400
Sub Total				24	766.674.000	586.163.700	374.732.600	-211.431.100
40615				Kecamatan Talun				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	264.960.000	227.089.400	208.689.400	-18.400.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	399.000.000	130.883.800	115.455.800	-15.428.000
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	10.000.000	10.000.000	-	-10.000.000

04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	13	543.000.000	377.229.200	171.452.200	-205.777.000
Sub Total				26	1.216.960.000	745.202.400	495.597.400	-249.605.000
40616 Kecamatan Lebakbarang								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	231.300.000	186.392.700	170.933.800	-15.458.900
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	450.880.000	200.657.000	175.067.000	-25.590.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	8	393.750.000	272.682.000	100.180.800	-172.501.200
Sub Total				21	1.075.930.000	659.731.700	446.181.600	-213.550.100
40617 Kecamatan Kandangserang								
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	344.250.000	264.629.300	226.914.300	-37.715.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	159.500.000	96.990.000	55.690.000	-41.300.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	12	212.400.000	217.591.900	108.197.000	-109.394.900
Sub Total				31	716.150.000	579.211.200	390.801.300	-188.409.900
40618				Kecamatan Paninggaran				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7	498.000.000	254.321.560	249.155.560	-5.166.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	357.000.000	78.460.300	41.425.400	-37.034.900
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	6.000.000	6.000.000	-	-6.000.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	9	360.000.000	262.634.900	98.059.000	-164.575.900
Sub Total				22	1.221.000.000	601.416.760	388.639.960	-212.776.800
40619				Kecamatan Kesesi				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	200.500.000	131.835.500	196.084.200	64.248.700
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	627.600.000	240.000.000	208.374.500	-31.625.500
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	5.000.000	5.000.000	-	-5.000.000

04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	8	435.000.000	312.000.000	90.308.600	-221.691.400
Sub Total				21	1.268.100.000	688.835.500	494.767.300	-194.068.200
40620				Kecamatan Petungkriyono				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	340.200.000	284.637.300	247.611.550	-37.025.750
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	225.000.000	68.411.400	20.941.400	-47.470.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	9	385.000.000	283.683.800	150.306.350	-133.377.450
Sub Total				20	950.200.000	636.732.500	418.859.300	-217.873.200
40621				Kecamatan Wonokerto				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	264.300.000	213.966.850	170.217.850	-43.749.000
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	465.750.000	32.146.000	52.956.000	20.810.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	8	555.000.000	310.313.600	126.475.300	-183.838.300
Sub Total				23	1.285.050.000	556.426.450	349.649.150	-206.777.300
40622				Kecamatan Siwalan				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8	185.600.000	179.791.100	166.880.625	-12.910.475
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	344.000.000	278.547.000	263.822.400	-14.724.600
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	7	238.000.000	207.392.440	86.149.425	-121.243.015
Sub Total				20	767.600.000	665.730.540	516.852.450	-148.878.090
40623				Kecamatan Karangdadap				
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	243.740.000	216.937.000	255.389.800	38.452.800
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5	514.500.000	114.219.000	45.125.200	-69.093.800
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	3.300.000	3.300.000	-	-3.300.000
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

04	06		PEMERINTAHAN UMUM					
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan	8	379.800.000	291.819.400	83.735.600	-208.083.800
Sub Total				20	1.141.340.000	626.275.400	384.250.600	-242.024.800
								0
TOTAL				1.343	1.919.886.156.822	1.090.197.508.261	924.267.578.742	-165.929.929.519

Sumber : BAPPEDA LITBANG dan BPKD Kab. Pekalongan, 2020

B. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dijabarkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan diarahkan pada Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah; Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan; Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi; DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik); Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD; Penyelenggaraan Apresiasi Bunda PAUD, Gugus PAUD dan Lomba Sekolah Sehat PAUD; dan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Gedung Sekolah; Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Guru Sekolah; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa; Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB; Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP; Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP; Peningkatan Penguasaan Materi UN; Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M); Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan; Bintek Tiga Mata Pelajaran Ujian Sekolah; Lomba Jenjang Pendidikan Dasar; Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI; Pengadaan Tanah dan Pembangunan SD; Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah; Beasiswa Siswa Berprestasi; Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SD; Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK; Pelatihan Guru Inklusi; Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP; Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah; Penambahan Ruang Guru Sekolah; Pengadaan Mebeluer Sekolah; Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pembinaan Olympiade Sains (OSN); Review Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah; Pengadaan Aplikasi PPDB Online; Kegiatan Gala Siswa; DAK SD; DAK SMP; dan DAK SKB.

3) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal

Kegiatan diarahkan pada Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal; Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA; dan Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal.

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan diarahkan pada Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas; Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah; Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya; Penunjang Proses Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru PNS; Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi; Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS; Pengelolaan Media Publikasi Ilmiah; Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta; Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru; Fasilitasi Pengawasan; dan Kegiatan Pemberian Tambahan Penghasilan

Bagi Guru PNS didaerah yang memiliki tingkat Kesulitan tinggi dan daerah Terpencil.

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional; Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; Pelatihan Pengolahan Data Pokok Pendidikan; Fasilitasi Akreditasi Sekolah; Penyediaan Bea Siswa bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Keluarga tidak Mampu; Sosialisasi Perundang-undangan Pendidikan; dan Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi).

b. Kesehatan

1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan, Penunjang dan Alat Laboratorium; Pemeliharaan Rutin/Berkala Coldchain; Pemenuhan Kebutuhan Obat Penunjang Puskesmas; Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik); Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Intaslasi Farmasi; pengadaan obat-obatan, BMHP, dan Perbekalan Kesehatan (DBHCHT).

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan; Peningkatan Upaya kesehatan Khusus; Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan; Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

3) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat; Revitalisasi Posyandu; Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK Non Fisik).

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Gizi Masyarakat

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi).

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan diarahkan pada Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin); Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung); Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik); Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES); Rekrutment Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas.

9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kegiatan diarahkan pada Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK); Pengembangan sistem Informasi

Kesehatan Online; Pembangunan Puskesmas; dan Pengadaan Rumah Sakit Rujukan Lini 4 Penanganan COVID-19 (DBHCHT).

11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah.

12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik).

13) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Profil Kesehatan; Pengembangan Sistem Kesehatan Online.

14) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD; Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK); Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.

15) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Gudang Obat/Apotik; Pembangunan RSUD Kesesi; Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK); Pembangunan Gedung NICU/PICU; Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP; Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran; Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis.

16) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Jembatan; Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan; Peningkatan Jalan; Rehabilitasi Jalan (DAK Penugasan Jalan Prioritas Daerah); Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi; Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong; Penataan Lingkungan Pedesaan; Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan Kabupaten

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan; Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan; Pengadaan alat berat; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat.

3) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Teknis Infrastruktur; Pengkajian dan Pengujian Infrastruktur; Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan; Fasilitas IJJK; Pelatihan Bina Konstruksi.

4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Perkotaan Kabupaten Pekalongan

5) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan diarahkan pada Penataan Lingkungan Pusat Pemerintahan; Fasilitas dan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang.

6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan; Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten; Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana kota; Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam;

Penataan Lingkungan Perbatasan; Penyiapan Lahan Kawasan Madukaran; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

7) Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan LPJU; Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU

8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan); Optimalisasi fungsi jaringan irigasi; Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; Peningkatan Jaringan irigasi; Penyusunan Pola Tata Tanam

9) Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai; Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai; Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali; Pembangunan Saluran Pembuangan; Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob; Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai; Operasional Pompa Air Rob; Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air; Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir; Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan; Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK); Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa; Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); DAK Perumahan.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan diarahkan pada Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi; Penunjang Hibah Air Limbah Setempat; Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh); Pembangunan Sanitasi DAK SLBM; Hibah Air Limbah Setempat; Penunjang Kegiatan PLPBK

3) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan

Tidak ada karena dilimpahkan ke kecamatan.

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)

5) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Kegiatan diarahkan pada Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS; Penunjang Hibah Air Minum Perdesaan; Pembangunan PAMSIMAS; Hibah Air Minum

6) Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman.

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan TPA Bojonglarang; Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang; Pembangunan Pool/Garasi Truk Sampah; Pembangunan Landasan Kontainer; Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan; Pengadaan Kontainer; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kontainer; Pembangunan TPST; Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Kegiatan diarahkan pada Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Pusat dan Daerah; Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah; Patroli Wilayah; Operasional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan; PAM Pilkades; Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima); Pengamanan Pemilihan Umum.

2) Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa

Kegiatan diarahkan pada Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Trantib); Pembinaan Pelindungan Masyarakat (Linmas) Desa.

3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatan diarahkan pada Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

4) Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup

Kegiatan diarahkan pada Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT); Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain; Penertiban Periklanan; Operasi Pemberantasan Miras dan Minuman Beralkohol Lainnya; Operasi Penertiban Pelajar; Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda dan Perbup.

5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa; Peningkatan Kesadaran Bela Negara; Pengawasan Orang Asing; Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat; Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan antar Umat Beragama serta antar kepercayaan; Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah; Pengembangan Aplikasi wawasan dan nilai-nilai kebangsaan; Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara; Fasilitasi Pemasarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila; Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila; Pembinaan dan Pelatihan Anggota Korsik.

6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB); Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI); Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI dan FKDM.

7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan diarahkan pada Antisipasi Pengamanan Wilayah; Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten Pekalongan; Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Umum (PEMILU).

8) Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil

Kegiatan diarahkan pada Pengawasan dan Pembinaan Ormas/LSM di Kabupaten Pekalongan.

9) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik Terwakili; BinteK Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol.

10) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran; Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran.

f. Sosial**1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

Kegiatan diarahkan pada Bimbingan Pemantapan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin; Fasilitasi Bantuan bagi Keluarga Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat; Penguatan Kapasitas Keluarga Penyandang Disabilitas Intelektual; Kegiatan Pelayanan Sosial Anak.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)

Kegiatan diarahkan pada Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan; Update Data Kemiskinan; Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu PMKS.

4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

Kegiatan diarahkan pada Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah dengan Hukum; Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

5) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Kegiatan diarahkan pada Penyuluhan Anti Kekerasan/Narkoba dan Anti Pornografi; Penjangkauan, Bimbingan Sosial dan Resosialisasi bagi Eks Psikotik Berbasis Keluarga; Fasilitasi Pelayanan Rujukan bagi PMKS.

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kinerja TKSK Kab. Pekalongan; Penguatan Kelembagaan Karang Taruna; Fasilitasi bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial; Kegiatan Bimbingan Manajemen PSM dan Karang Taruna.

7) Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama"; Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo; Rehabilitasi TMP Bhakti Wiratama.

8) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir; Fasilitasi Kelompok Usaha e-Warung PKH; Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif; Fasilitasi Pelaksanaan Santunan Kematian.

9) Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sudah tercapai sehingga sudah tidak dilaksanakan lagi.

10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam

Kegiatan diarahkan pada Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa; Pengadaan Logistik Bencana; Kesiapsiagaan Pelajar di Sekolah Daerah Rawan Bencana; Pelatihan Kemampuan Pendataan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam (DALA/Disaster and Losses Assessment); Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan; Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana;; Pelatihan Masyarakat Daerah Rawan Bencana; Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga; Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana; Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana; Gladi Manajemen Bencana; Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana; Pengurangan Resiko Bencana

11) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**a. Tenaga Kerja****1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Pengawasan TKI ke Luar Negeri; Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis kompetensi; Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Warga Binaan; Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU); Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT); Pelatihan Manajemen LPKS; Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan diarahkan pada Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja; Pameran Kesempatan Kerja Untuk Percepatan Penempatan Tenaga Kerja (Job Fair); Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja; Padat Karya.

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit; Fasilitasi Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan Penyusunan Struktur Skala Upah; Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Kegiatan diarahkan pada Perumusan Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Perumusan kebijakan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan (Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum, Reintegrasi Sosial dan Pemulangan) Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA); Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender; Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak; Fasilitasi Forum Anak; Fasilitasi Bagi Perempuan di Bidang Politik; Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan bagi Konselor Kecamatan; Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; Pelayanan Pendampingan (Layanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Bantuan Hukum, Reintegrasi Sosial dan Pemulangan) Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Perempuan di Lembaga Pemerintah; Fasilitasi Perempuan di Lembaga Swasta; Sosialisasi dan Pendataan Tenaga Kerja di Bawah Umur; Pelatihan kader perempuan berpolitik; TOT Peningkatan Kualitas Keluarga Bagi Fasilitator / Champion Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; Pengembangan KIE Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

4) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Organisasi Perempuan; Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Bimbingan Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha; Fasilitasi Lansia Perempuan; Pemberdayaan pembangunan perempuan desa.

c. Pangan

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan; Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Untuk Penguatan Ketahanan Pangan; Pemantauan Perkembangan Harga Pangan Strategis; Fasilitasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat; Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah; Pembuatan dan atau Perbaikan Lantai Jemur; Tunda Jual Gabah Kering Giling; Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG); Pemantauan Hari Besar dan Keagamaan, Nasional Desa Mandiri Pangan, Pembinaan Kelompok Afnitas Desa mandiri pangan dan pembuatan Buku Neraca Bahan makanan.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

d. Pertanahan

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.

e. Lingkungan Hidup**1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan diarahkan pada Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER); Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara; Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup; Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sampah; Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan; Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan; Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen; Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Sampah; Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat; Biaya Operasional Instalasi Pengolah Limbah; Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air.

2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan diarahkan pada Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH; Sosialisasi Mobil Hijau; Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**1) Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Kegiatan diarahkan pada Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK; Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik); Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan (DAK Non Fisik); Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik); Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA); Fasilitasi Pelayanan Mobile Adminduk; Fasilitasi Itsbat Nikah; Penerapan Arsip Digital; Re entri Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Kapasitas Kader PKK; Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK; Fasilitasi Dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelompok Masyarakat; Pelatihan Bagi Pengurus Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS); Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDes.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kelembagaan Posyandu; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; Evaluasi Perkembangan Desa; Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong; Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti; Pembinaan BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi).

4) Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Kelembagaan Desa; Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); Fasilitasi Pengisian Kepengurusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa); Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

5) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

6) Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelestarian Adat dan Budaya Lokal

7) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Petunjuk Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan; Bintek Pengelolaan Kerjasama Desa.

8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan diarahkan pada Bintek Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Bidang Informasi dan Teknologi; Pelatihan bagi Kepala Desa; Pelatihan Penyusunan APBDesa; Pembinaan aparatur desa; Pelatihan pengelolaan aset desa; Pembinaan Data Base Profil Desa; Fasilitasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

9) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa; Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD); Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Pengembangan Sistem Informasi Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Pengelolaan Aset Desa; Fasilitasi dan Monitoring Pendataan Aset Desa; Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Penyusunan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa.

h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**1) Program Kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga**

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin; Pengembangan dan Pengelolaan Data Dan Informasi Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KB-KS); Pembinaan KB Pria; Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB; Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia); Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; Pembentukan Dan Pendampingan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Pelayanan Konseling KB htera; Peningkatan Advokasi Dan KIE Program KKBPK; Fasilitasi Pelayanan KB MKJP; Pengadaan Obat-obatan Habis Pakai dan Peralatan Medis; Pendampingan Pendataan Keluarga Dan Pemutakhiran Data Keluarga; Pembinaan Pembantu Pembina KB Desa; Pembinaan Ketahanan Remaja; Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi; Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja; Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana; Pengadaan Genre Kit (DAK); Pengadaan Sarana Prasarana Petugas Lapangan KB (DAK); Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (DAK Non Fisik);

Pengadaan BKB Kit (DAK); Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK); Operasional Pembinaan Program KKBPK oleh Kader (DAK); Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK); Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan BKB Holistik Integratif (HI); Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA); Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS

i. Perhubungan

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan; Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas; Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan diarahkan pada Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamatan Penumpang; Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan; Forum Lalulintas Angkutan Jalan; Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten; Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan; Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru; Pengadaan Pos Knockdown dan Gudang; Kegiatan Penyuluhan bagi para Supir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang; Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan; Pembangunan Taman Lalu Lintas.

3) Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas; Pengadaan Marka Jalan; Pengadaan Warning Lamp; Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas; Pengadaan APILL.

4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.

j. Komunikasi dan Informatika

1) Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi

Kegiatan diarahkan pada Penerbitan Majalah Gema Kota Santri; Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio; Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID); Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk; Pembuatan Audio Visual Profil Daerah Kabupaten Pekalongan; Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Media Tradisional; Penyelenggaraan Iklan layanan Masyarakat; Press Tour.

3) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi; Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot area di Ruang Publik; Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK; Pemeliharaan Jaringan, Aplikasi dan Operasional LPSE; Pengadaan Server, UPS dan Server dan Cpanel; Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah; Pengelolaan SMS Center/Gateway; Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik *www.pekalongankab.go.id*; Pembuatan Buku Agenda dan Kalender; Pemeliharaan dan Pengembangan Kajian Cyber City dan CCTV Publik; Pengelolaan dan Penataan Dokumen Kehumasan.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Usaha UMKM.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan diarahkan pada fasilitasi Pengembangan Batik (Warna Alam); Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM; Pelaksanaan Batik Carnival; Penataan Pedagang Kaki Lima; Pengembangan Usaha Produk Makanan; Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Kawasan Gemek; Pembangunan Pusat UMKM.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; Pelatihan Ketrampilan Usaha Koperasi; Penilaian Kesehatan Koperasi dan Fasilitasi Hari Koperasi; Fasilitasi Pembentukan Koperasi Baru; Identifikasi dan Validasi Data Koperasi dan LKM.

5) Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Tata Kelola Perkoperasian.

l. Penanaman Modal**1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Pameran Investasi; Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi; Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur di bidang perizinan dan non perizinan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan; Koordinasi dan Evaluasi RUPM; Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan.

m. Kepemudaan Dan Olah Raga**1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda; Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Pemilihan Pemuda Pelopor; Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP); Pengiriman Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Pengiriman Kegiatan Kepemudaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Pengembangan Kapasitas Pemuda Cinta Tanah Air; Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba; Pembinaan Kewirausahaan Pemuda; Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka, Lomba Tata Upacara Bendera dan

Baris Berbaris; Fasilitasi Pengembangan Kelompok; Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan.

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga; Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional; Penyelenggaraan kompetisi tingkat Kabupaten; Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat; Pemberdayaan Penyelenggaraan/kegiatan Olahraga Masyarakat; Olahraga Masal dan Pembudayaan Olahraga; Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga; Liga Pendidikan; Pembinaan Peningkatan Prestasi Pelajar (POPDA); Bintek Keolahragaan; Penataan Sarana Prasarana Olahraga; Penghargaan Atlet dan Pelatih Berprestasi; Pembinaan Peningkatan Prestasi Olahraga (O2SN); Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga; Pembentukan PPLOPD Kab Pekalongan (Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)

n. Statistik

1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan; Analisis Data Statistik Daerah

o. Persandian

1) Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan, Pengawasan dan Pengamanan Informasai melalui Persandian; Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengelolaan Persandian Daerah.

p. Kebudayaan;

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan diarahkan pada Parade Seni Budaya Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Pengiriman Tim Kesenian Ke Luar Provinsi; dan Penyelenggaraan Lomba Kreatifitas Seni Budaya Pelajar (FLS2N).

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan diarahkan pada Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK); Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI); Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)

q. Perpustakaan

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan diarahkan pada Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca; Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah; Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah; Pameran Buku dan Arsip Daerah; Operasional Layanan Perpustakaan Keliling; Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah; Lomba Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah; Pembentukan IPI dan PMBM; Peningkatan dan Pengembangan Gedung Perpustakaan Umum; Pengadaan Mobil Perpustakaan; Pengembangan Sistem Digitalisasi Layanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi; Penyediaan Mebelair, Peralatan Kantor dan Jaringan Internet untuk Pengembangan Gedung Perpustakaan; Seminar Membangun Komitmen Pembentukan dan Pengembangan Perpustakaan.

r. Kearsipan**1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Kegiatan diarahkan pada Pembangunan Database Informasi Kearsipan; Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan; Sistem Katalog Data; Sosialisasi, Kerjasama dan Pengawasan Kearsipan.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip; Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah; Pembinaan Kearsipan bagi OPD/BUMD/Desa/ Kelurahan; Penduplikasian Dokumen/Arsip dalam Bentuk Informasi; Pembangunan Sistem Keamanan dan Penyimpanan Data; Fasilitasi Percontohan Tertib Arsip (Desa Binaan); Pemeliharaan Arsip yang Belum Diolah.

3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Bagi Pengelola Arsip OPD; Lomba Tertib Arsip Desa; Bintek Kearsipan; Sosialisasi/Penyuluhan Arsip pada Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga lainnya; Pameran Arsip; Penyusunan Naskah Sumber Arsip; Pembentukan Asosiasi Arsiparis Indonesia.

3. Urusan Pilihan**a. Kelautan dan Perikanan****1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan; Pengembangan Industrialisasi Tambak Udang; Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK); Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK); Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar; Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak; Peningkatan Produksi BBIAT; Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan; Pengembangan & Peningkatan BBI AT; Pembinaan Masyarakat Kelompok Pembuat Pakan Ikan, Perbenihan dan Monitoring Kesehatan Lingkungan; Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air tawar; Penunjang Program Pengembangan Budidaya Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; Budidaya Ikan Nila dan Padi (MINAPADI); Pengembangan Budidaya Ikan di Ponpes/Sekolah/Madrasah; Pengembangan Kawasan Vaname.

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Peningkatan PPI Jamean (DAK); Pengembangan PPP Wonokerto; Pembinaan Masyarakat Pesisir; Penunjang Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bagi Nelayan Kab. Pekalongan.

3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Promosi Produk Perikanan; Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan;; Penyediaan Saranan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran.

4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

Sudah tercapai sehingga sudah tidak dilaksanakan lagi.

5) Program Pengembangan Statistik Perikanan

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

b. Pariwisata**1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Event Syawalan; Pengadaan Media Promosi Pariwisata; Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara; Penyelenggaraan Festival Rogojembangan; Penyelenggaraan Lomba dan Pameran Burung Berkicau Tingkat Nasional; Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata; Kajian Art & Performance Fest.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata; Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata; Peningkatan dan Penataan Bumi Perkemahan Linggoasri; Pembuatan Gapura Selamat Datang Masuk Kawasan Objek Wisata; Penataan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Linggoasri; Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan; Pengadaan Panggung Hiburan.

3) Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis, dan Saka Pariwisata; Pemilihan Duta Wisata; Bukaan Bendungan Gumbiro; Festival Durian Kabupaten Pekalongan; Pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata; Fasilitasi Desa Wisata; Penyelenggaraan Petungkriyono Trail Run; Penyelenggaraan Rally Wisata Jeep; Festival Kuliner Kabupaten Pekalongan.

c. Pertanian**1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES); Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP); Penguatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Posluhdes.

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian; Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agenia Hayati dan Pestisida Nabati; Gerakan Pengendalian OPT Komoditas Cabe; Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah dan Jahe); Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian; Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi; Monitoring Alat dan Mesin Pertanian; Pembangunan Dam Parit; Pembangunan Jalan Usaha Tani; Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian.

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Pendidikan, Pelatihan Petugas dan Pelaku Agribisnis; Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat; Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kopi; Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pemupukan Tanaman Tembakau (DBHCHT); Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Semusim; Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh; Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Kopi; Pengendalian Hama

Oryctes pada Tanaman Kelapa; SLPHT Tebu; Pengembangan Tanaman Penyegar.

- 5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**
Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi.
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Mutu Ternak; Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal; Pemantauan Hewan Qurban; Pengadaan Sarana Prasarana Alat RPH; Peningkatan Produksi Ternak dan SDM Peternakan.
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- 8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**
Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Program Penyuluhan; Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP); Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU); Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyulu Swadaya; Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani.

d. Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kemetrolgian Daerah (DBHCHT); Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT).
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis); Pelatihan dan Pembuatan Toko Online serta Pelatihan Expor Impor;
- 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**
Kegiatan diarahkan pada Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis; Optimalisasi Pendapatan Pasar; Pembinaan Pedagang Pasar; Fasilitasi Pekan Raya Kajen.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional**
Kegiatan diarahkan pada Renovasi Pasar Tradisional; Renovasi Pasar Kedungwuni; Pembangunan Pasar Sragi.

e. Perindustrian

- 1) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi**
Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Desain Bordir
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan dan Minuman; Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Bambu; Sosialisasi Sertifikasi HAKI (merk) dan Sertifikasi Halal; Penyusunan Masterplan Kawasan Industri; Pelatihan Diverfikasi Olahan Teh.

f. Transmigrasi.

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**
Kegiatan diarahkan pada Penyuluhan, Penjajagan, Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan; Penyusunan KUA dan PPAS; Penyusunan RKPD; Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG); Penunjang Koordinasi Bidang Ekonomi Dan Fisik Prasarana; Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan.

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan diarahkan pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD); Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Pekalongan; Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

3) Program Perencanaan Sosial Budaya

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya; Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi); Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi); Fasilitasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); Penyusunan Pemutakhiran Data dan Informasi Analisis Situasi Ibu dan Anak; Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals.

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat; Koordinasi Penanganan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah.

b. Keuangan

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Raperda Tentang APBD; Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD; Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD; Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Administrasi Pengendalian Anggaran; Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer; Administrasi Penatausahaan SKPKD; Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Elektronik Audit; Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan; Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji; Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah; Updating Data Base dan Cetak Masal PBB; Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah; Optimalisasi Pendapatan Daerah; Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemeliharaan Sistem Informasi Rekonsiliasi Instansi Pemerintah; Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah; Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah; Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W); Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis; Updating Sistem Informasi Manajemen APBD; Penanganan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah; Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House to House dan SMS Gateway; Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD.

2) Program Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD); Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; Lelang Barang Daerah; Penunjang Penghapusan Aset Daerah; Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah; Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan; Penyediaan Papan Nama Identitas; Penunjang Pengamanan Aset; Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah; Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA); Penilaian Barang Milik Daerah; Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD); Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Operasional Pengelolaan SIMPEG, SAPK dan Website; Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian; Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan diarahkan pada Operasional Kegiatan Baperjakat/Tim Penilai Kinerja; Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun; Promosi dan Mutasi Pegawai; Penyusunan Formasi Pegawai; Pembinaan Kepegawaian SKPD; Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN); Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Penganugerahan Penerimaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah; Diklat Kepemimpinan; Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara; Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN); Administrasi Mutasi Kepegawaian; Diklat Teknis Pemerintahan; Penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai ASN dan Penyusunan Laporan Penilaian Prestasi Kerja ASN.

d. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan; Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); Lomba Kreatifitas Dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI); Fasilitasi Peayanan Perijinan Penelitian dan Penyusunan Jurnal Ilmiah; Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan.

e. Pengawasan

1) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian; Pengiriman Peserta Diklat / Ujian / Sosialisasi / Bintek / Pelatihan / Kursus / Seminar ke Luar Daerah.

2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD); Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB); Review RKA SKPD dan PPKD; Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Daerah; Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); Reviu RKPD; Reviu laporan penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa, hibah/bansos dan dana desa; Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD; Implementasi Zona Integritas; Kordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi; Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN); Bina Mitra Wilayah (BMW); Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

f. Pemerintahan Umum

1) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Kegiatan diarahkan pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin; Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan diarahkan pada Publikasi Peraturan Perundang-undangan; Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah; Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Penyuluhan Hukum; Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi; Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah; Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda).

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati; Inventarisasi Nama Rupa Bumi Unsur Buatan; Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan; Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat; Desk Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif; Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhatian dan Pengangkatan Anggota DPRD,BPD dan Kepala Desa; Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya; Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

6) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta; Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan; Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji; Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji; Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS; Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim Panti/Non Panti dan Tokoh Masyarakat; Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan; Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Keyakinan Masyarakat; Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan; Fasilitasi Survei Pemohon Hibah/Bantuan Sosial; Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan.

7) Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur

Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemkab) dan Rencana Kinerja Tahunan; Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah; Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; Analisis Jabatan; Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah; Pengembangan e-SAKIP; Evaluasi Kelembagaan; Evaluasi Kinerja OPD; Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; Analisis Beban Kerja; Bintek Analisis Jabatan; Evaluasi Pelaksanaan SOP; Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan Pelaksana.

8) Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup; Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT); Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT); Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kemitraan, Pengelolaan dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam; Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah; Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro; Pendampingan Pupuk Bersubsidi dan LPG; Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi; Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); Fasilitasi TPID.

9) Program Pengendalian Pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan; Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan; Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait; Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan; Fasilitasi Percepatan Pembangunan; Sewa Bandwidth; Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP); Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan; Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi.

10) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan diarahkan pada Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama; Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan; Rapat-rapat Paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah; Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah; Penerbitan Himpunan SK dan Risalah DPRD; Penerbitan Buletin DPRD; Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD; Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD; Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD; Pengiriman Peserta

Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Quotient (ESQ); Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan; Pengelolaan dan Penataan Kehumasan; Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD; Iklan layanan Masyarakat; Rapat Paripurna Istimewa Hari jadi; Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; Pembuatan Buku Memory DPRD Kabupaten Pekalongan.

11) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Promosi Industri Lokal; Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL); Pembinaan dan Pengawasan Desa; Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan; Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat; Lomba Tertib Administrasi Desa; Pendampingan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD); Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara; Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan; Fasilitasi Promosi Pariwisata, Pembinaan Produsen Industri Rumah Tangga; Pendataan Kegiatan Usaha Yang Belum Berijin, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa; Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan; Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan; Fasilitasi Kewenangan Urusan Pendidikan di Kecamatan; Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Ujian Sekolah; Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Fasilitasi Pusat Informasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan; Koordinasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Informasi Masyarakat; Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Surat dan Arsip; Fasilitasi Pengembangan Desa Siaga; Fasilitasi Penanganan Bencana; Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Berbasis Stelsel Aktif Petugas; Fasilitasi Pembangunan Jamban; Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Fasilitasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tingkat Kecamatan.

12) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan

Kegiatan diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Penataan Sarana Prasarana Kelurahan

5. Non Urusan (Program Setiap Perangkat Daerah)

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah; Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional; Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Website;

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan Pelatihan Formal

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN); Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dan Pembinaan PNS.

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020 Triwulan I dan II serta dampak pandemi COVID-19, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi perubahan prioritas dan sasaran daerah, penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan lokasi kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat penyesuaian-an tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan partisipatif antara lain dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

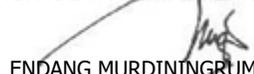
Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pekalongan selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 dapat terwujud secara optimal.

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk I
NIP. 19631005 199208 2 001

Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.512.200.000	2.084.564.240		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Pekalongan	- Jumlah bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pajak mobil, pemeliharaan peralatan kantor, honor PA dll, cetak ganda dan honor Outsorcing	12 Bulan	1.724.200.000	1.760.169.240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya ATK, Alat Listrik dan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	253.000.000	127.867.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kab Pekalongan	Jumlah bulan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan tersedianya makan minum rapat/kantor	12 Bulan	535.000.000	196.527.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.023.000.000	1.393.323.008	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	285.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dan mobil dinas jabatan	12 Bulan	88.000.000	62.374.258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	02	099 Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kab Pekalongan	Jumlah bulan pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Bulan	1.400.000.000	1.330.948.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pekalongan	Jumlah/jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 scanner pemindaian LJK, AC, Laptop, Komputer dll Unit	250.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000	20.000.000	
00	00	05	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab Pekalongan	Jumlah SDM yang mengikuti diklat formal	100 Orang	100.000.000	20.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	01		PENDIDIKAN						
01	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				38.166.700.000	8.559.389.600	
01	01	15	003 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kelurahan Gumawang	Pembangunan Gedung TK dan PAUD	2 Lokal	600.000.000	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Desa Bondansari	Pembangunan Gedung PAUD	1 Unit	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Desa Werdi	Ruang kelas baru (RKB) KB-PAUD ABA	1 Ruang	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

					Desa Semut	Pengurangan halaman gedung RA/TK	1 Unit	60.000.000	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Werdi	Penataan lingkungan PAUD Pelangi	1 Unit	75.000.000	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Oesa Kaliombo	Pembangunan Pos PAUD	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Pamutuh	Pembangunan Gedung	1 Unit	300.000.000	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					RT 01 Desa Wonopringgo	Pembangunan Gedung TK	200 m2	400.000.000	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU Kwagean Wonopringgo	Spilut	1 Ruang	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Kab Pekalongan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	52 PAUD, RKB Madin Desa Rowolaku, Ruang Asrama Pondok Desa Rowolaku, TPQ Desa Kayugeritan, TPQ Al Falah Desa Rembun, PAUD Muslimat DK Plurahan, TK Muslimat NU Ds Krompeng, TPQ Kranji -	23.008.750.000	1.569.889.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Bhakti Prasetya Praja	Spilut	1 Ruang	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU Wonorejo	Pemagaran Keliling	1 Ruang	100.000.000	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Dharmawanita Wonopringgo	Gedung Baru	4 Ruang	600.000.000	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pos PAUD Cahaya Ibu Kel. Bener Kec. Wiradesa	Pembangunan RKB	1 Ruang	140.000.000	140.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	045	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	TK Pertiwi Wonorejo Wonopringgo	Lantai	3 Ruang	50.000.000	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK MUSlimat NU Gebruk	Atap Ternit	2 Ruang	60.000.000	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU Pegaden Tengah	MCK Guru Baru	1 Ruang	50.000.000	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU Puton Sastroirjan	Atap Ruangan Dan Ternit	5 Ruang	125.000.000	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Lambangelun	Rehab Gedung PAUD	1 Unit	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU Legokgunung	Rehab Gedung	4 Ruang	240.000.000	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Muslimat NU 01 Galangpengampon	Rehab Ruang Kelas	2 Ruang	200.000.000	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					TK Kyai Betoro Sebethok	Rehab Aula TK	1 Ruang	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

					Kab Pekalongan	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	41 PAUD Sekolah	7.223.800.000	1.337.166.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	069	Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan	Kab Pekalongan	Jumlah Guru PAUD (KB/TPA/SPS) Kabupaten Pekalongan yang mengikuti pelatihan tingkat lanjut	100 Orang	200.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	085	Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	Kab Pekalongan	Jumlah cabang/jenis lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi serta jumlah kegiatan apresiasi Bunda PAUD, Gugus PAUD dan Lomba Sekolah Sehat PAUD	8 lomba dan 4 keg Keg	226.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	097	DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	Kab Pekalongan	Jumlah Lembaga Penerima Operasional DAK Non Fisik	3 TKN Lokasi	139.200.000	139.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	098	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD	Kab Pekalongan	Jumlah lembaga penerima Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD	26 lembaga/sekolah -	2.183.450.000	109.999.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					15 Desa se Kecamatan Paninggaran	Pengadaan APE Luar TK,RA,PAUD	42 Unit	84.000.000	84.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					3 Desa se Kecamatan Paninggaran	Pengadaan Mabelair TK,PAUD,RA	3 Paket	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	166	Operasional Penyelenggaraan PAUD	Kab Pekalongan	Jumlah penerima Operasional penyelenggaraan PAUD, penerima DAK non fisik dan siswa penerima PMTAS	109 TK/RA, 3 TK N, 1500 siswa PAUD/TK -	851.500.000	378.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	15	170	DAK PAUD	Kab Pekalongan	Jumlah penerima Operasional penyelenggaraan PAUD, penerima DAK non fisik dan siswa penerima PMTAS	109 TK/RA, 3 TK N, 1500 siswa PAUD/TK -	0	691.134.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				170.570.616.000	164.931.738.917	
01	01	16	001	Pembangunan Gedung Sekolah	Kab Pekalongan	Jumlah prasarana yang dibangun	57 Sekolah	7.915.875.000	1.918.656.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	003	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	SDN 03 Lebakbarang	Penataan Lingkungan SDN 03 Lebakbarang/Saluran Drainase	30 m	20.000.000	20.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					SDN Surobayan	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Surabayan	6m x 6 m	90.000.000	90.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Kab Pekalongan	Jumlah ruang kelas sekolah yang bertambah	48 SDN 12 SD S, MI Kranji 2 -	3.881.750.000	1.819.216.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					RT 06 RW 03 Ds. Kwagean	Pembangunan Pagar SDN Kwagean	3m x 60 m	270.000.000	270.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Pungangan	Pembangunan Gedung SDN	2 Lokal	500.000.000	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					SDN Mulyorejo, SDN Jeruksari, SDN Karangjampo, SDN Kranding	Pembangunan sarana MCK di SD dampak rob	60 m2	60.000.000	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					SD N.02 Werdi	Ruang kelas baru	1 Unit	100.000.000	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	041	Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah yang direhab sedang/berat	24 Sekolah Sekolah	3.583.000.000	2.207.625.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	070	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Kab Pekalongan	Jumlah cabang lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa dan jumlah guru inklusi yang mengikuti pelatihan	9 cabang Lomba Kreatifitas dan 50 Guru Inklusi -	333.000.000	106.619.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

01	01	16	101	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah pelaksana Ujian Sekolah/Madrasah (US/M), jumlah peserta bintek tiga mapel US dan pelatihan kurtilas SD	632 sekolah US/M, Bintek 3 mapel US dan Pelatihan Kur 2013 SD -	1.643.000.000	275.630.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	102	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan	Kab Pekalongan	Jumlah jasa perencanaan dan pengawasan yang terlaksana	6 perencanaan, 6 pengawasan dan 1 Dokumen Identifikasi kondisi prasarana sekolah -	797.650.000	768.287.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	105	Lomba Jenjang Pendidikan Dasar	Kab Pekalongan	Jumlah cabang Lomba Jenjang Pendidikan Dasar dan jumlah peserta OSN/OGN	4 cabang Lomba Jenjang Dikdas, 250 OSN Siswa dan Guru -	394.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	107	Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI	Desa Getas	Rehab Berat SDN Getas	4 Ruang	450.000.000	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Kab Pekalongan	Jumlah SD/MI yang direhabilitasi	15 sekolah -	10.258.000.000	995.465.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Pegaden Tengah	Rehab Berat SDN 01 Pegaden Tengah	1 Ruang	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Kauman	Pembangunan/Pemasangan Eternit dan keramik SD Kauman	168 m2	62.160.000	62.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Wonopringgo	Rehab Berat SDN 01 Wonopringgo	3 Ruang	450.000.000	450.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Kwayangan	Rehab Sekolah SDN Kwayangan	1 Unit	100.000.000	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	114	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaraan UN dan UNPK, jumlah peserta 3 mapel UN dan updating PPDB Online	126 SMP/MTs, Bintek 3 Mapel UN dan 1 PPDB Online -	898.000.000	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	116	Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah yang dibangun talud n peninggian halaman	6 SD, 6 SMP, 1 MI -	4.525.875.000	1.676.335.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Karangjampo	Peninggian halaman dan paving block SDN Karangjampo	400 m2	80.000.000	80.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Desa Depok	Pembangunan pagar bumi halaman SDN Depok	35 m	150.000.000	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	120	Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah penerima alat TIK dan CBT	13 SMP/MTs -	9.214.584.000	2.404.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	121	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah	Pengadaan Perleng Sekolah, CBT, Alper dan Meubelair -	1.635.000.000	2.908.434.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	125	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Kab Pekalonga	Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP dan jumlah sekolah yang di fasilitasi pengelolaan BOS	520 SD, 83 SMP -	80.698.800.000	115.613.725.317	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	146	Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)	-	-	- -	200.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	154	DAK SD	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah yang direhab sedang/berat dan yang di bangun	- -	20.963.429.000	20.477.539.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	155	DAK SMP	Kab Pekalongan	Jumlah sekolah yang direhab sedang/berat dan yang di bangun	- -	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

					-	Jumlah sekolah yang direhab sedang/berat	--	18.262.155.000	9.054.327.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	16	156	DAK SKB	-	Jumlah sekolah yang direhab sedang/berat	--	2.884.338.000	2.022.819.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	18		Program Pendidikan Non Formal				7.111.000.000	6.734.416.684	
01	01	18	015	Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal	Kab Pekalongan	Jumlah lembaga dan ustad/ustadzah penerima operasional	1285 Lembaga TPQ/Madin/Non Islam , 7951 Ustad/ustadzah	6.610.000.000	6.598.191.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	18	020	Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal	Kab Pekalongan	Jumlah peserta pelatihan non formal n informal serta jumlah lembaga penyelenggara paket (ABC)	Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal = 300 Peserta dan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP = 200 x 500.000,-= 100.000.000,- dan Paket C Setara SMA = 300 x 500.000,-= 150.000.000,- -	501.000.000	136.225.484	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				30.554.980.000	325.686.600	
01	01	20	038	Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah cabang lomba yang dilaksanakantest	12 Jenis Lomba TK Kabupaten Pekalongan Paket	147.000.000	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	20	039	Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	Kab Pekalongan	Jumlah PTK Non PNS penerima kesejahteraan dan insentif serta jumlah peserta pembinaan	Kesejahteraan 1913 orang x 600rb x 12 bl + BPJS @15rbx1913x12 bl + AP 100jt serta Insentif 3857 org x 300rb x 12 bl + AP 80jt dan Keg Pembinaan Bupati kpd slrh penerima manfaat bantuan Kesra, Insentif, KKC, Beasiswa Mahasiswa -	28.731.549.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	20	041	Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru	Kab Pekalongan	Jumlah guru penerima tunjangan profesi yang difasilitasi	3572 orang TPG, 52 Cakasek, 3600 guru 70 pengawas PAK 27 Lomba Kreatifitas, 26 Jurnal Ilmiah, 50 Guru Seni Budaya, 246 Guru Induksi (CPNS baru) -	1.676.431.000	275.686.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				1.888.000.000	479.800.000	

01	01	22	010	Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional	Kab Pekalongan	Jumlah jaringan pendidikan yang dikelola, jumlah peserta pelatihan Dapodik dan SIM, JUmlah sekolah yang difasilitasi akreditasi	1 tower utama, 14 tower relay, 96 client, 630 Pelatihan Dapodik dan SIM (SD/SMP), 845 Dapodik PAUD serta Fasilitas Akreditasi SD/SMP dan PAUD -	640.000.000	248.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	22	031	Fasilitasi Penyediaan Bea Siswa bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Keluarga tidak Mampu	Kab Pekalongan	Jumlah siswa yang terfasilitasi beasiswa dan terlaksananya Program KUDU Sekolah	7609 siswa, 200 mahasiswa, 1400 anak putus sekolah (KUDU Sekolah), Beasiswa siswa Berprestasi -	1.178.000.000	149.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	22	037	Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi)	Kab Pekalongan	-	--	70.000.000	82.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	16			KEBUDAYAAN						
02	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				2.223.377.000	100.658.000	
02	16	16	030	Lomba kreativitas Seni Budaya	Kab Pekalongan	Jumlah cabang lomba yang diadakan	5 cabang lomba Kreatifitas, Keg Parade Seni Budaya, Pengiriman Tim Kesenian dan Kemah Seni Budaya + 1 kali Pentas Seni di PRPP -	672.177.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	16	16	032	Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah	Kab Pekalongan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 kegiatan 1 dokumen Pelestarian cagar Budaya, Rumah Peradaban dan Pengembangan Batik -	1.056.200.000	100.658.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	16	16	033	Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa	Kab Pekalongan	Jumlah cabang lomba yang diadakan	18 cabang lomba FAS TPQ se Kab, Mapsi 12 Lomba SD dan SMP, Peng Mulok B jawa SD, SMP SMA dan SMK -	495.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.616.290.000	50.000.000	
02	16	17	001	Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	Kab Pekalongan	Jumlah kegiatan dan sanggar kesenian yang terlaksana	Pengembangan Kesenian 2 keg, 16 sanggar, Pentas Seni Budaya, FLS2N dan pengdaan Alkes -	1.616.290.000	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL								256.766.163.000	184.679.577.049	

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.702.700.000	1.832.311.527		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, listrik, air dan internet	12 Bulan	467.500.000	376.997.000	Dinas Kesehatan
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Pekalongan	Jumlah mobil yang diperpanjang pajak kendarannya	17 Unit	13.200.000	13.200.000	Dinas Kesehatan
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya ATK rutin dan cetakan/penggandaan Dinkes	12 Bulan	160.000.000	33.591.200	Dinas Kesehatan
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga, kebersihan dan komponen listrik	12 Bulan	142.000.000	33.040.000	Dinas Kesehatan
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaporkan dan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	290.000.000	109.680.000	Dinas Kesehatan
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terbayarnya gaji tenaga kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	12 Bulan	1.630.000.000	1.265.803.327	Dinas Kesehatan
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.321.000.000	4.405.952.000	
00	00	02	003 Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Pekalongan	Terbangunya Gedung Kantor	1 Unit	4.000.000.000	4.250.000.000	Dinas Kesehatan
00	00	02	007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	60.000.000	18.370.000	Dinas Kesehatan
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	141.000.000	68.596.000	Dinas Kesehatan
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan tersedianya mobil dinas operasional siap pakai	12 Bulan	120.000.000	68.986.000	Dinas Kesehatan
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				730.000.000	11.521.300	
00	00	05	013 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	10 Keg	730.000.000	11.521.300	Dinas Kesehatan
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	02		KESEHATAN						

01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				10.385.550.000	3.493.671.000	
01	02	15	007	Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda	Kabupaten Pekalongan	Persentase pelayanan laboratorium klinik	100%	331.700.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	009	Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kebutuhan obat dan BMHP untuk kegiatan program dinkes, puskesmas dan jaringannya	80 Paket	9.612.850.000	2.919.500.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	017	Pemenuhan Kebutuhan Obat Penunjang Puskesmas	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya operasional UPT Farmasi	12 Bulan	216.000.000	313.920.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	018	Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten Pekalongan	Pengawasan dan pembinaan apotik dan toko obat	65 Unit	75.000.000	10.251.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	019	Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Pelaksanaan dukungan manajemen e-logistik serta terdistribusinya vaksin, obat dan BMHP ke puskesmas	12 Bulan	150.000.000	150.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	021	Pengadaan Obat-Obatan, BMHP dan Perbekalan Kesehatan (DBHCHT)	Kabupaten Pekalongan			0	5.000.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	15	022	Operasional Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19	Kabupaten Pekalongan			0	2.624.512.500	Dinas Kesehatan
01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				355.300.000	200.000.000	
01	02	16	017	Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelayanan kasus kegawatdaruratan	12 Bulan	355.300.000	200.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.618.053.100	1.144.351.000	
01	02	19	006	Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Desa Siaga yang ditingkatkan strata nya	26 Desa	304.053.100	17.351.000	Dinas Kesehatan
01	02	19	007	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya UKM promotif dan prefentif	1 Tahun	1.314.000.000	1.127.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				1.250.000.000	1.187.440.500	
01	02	20	008	Peningkatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Pekalongan	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT dan perawatan	50 Kasus	250.000.000	17.429.500	Dinas Kesehatan
01	02	20	009	Pengadaan Alat Antropometri (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya alat antropometri	1 Tahun	500.000.000	1.170.011.000	Dinas Kesehatan
01	02	20	010	Feeding Center (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya feeding center	12 Bulan	500.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				800.000.000	6.130.000	
01	02	21	005	Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi)	Kabupaten Pekalongan	Persentase akses air minum yang layak	85%	800.000.000	6.130.000	Dinas Kesehatan
01	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				1.335.500.615	964.000.000	
01	02	22	012	Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin)	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Pelacakan kasus HIV AIDS	30 Kali	485.940.615	125.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	22	014	Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi	Kabupaten Pekalongan	Persentase anak sekolah dasar yang diimunisasi campak-rubllea	95%	207.060.000	739.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	22	015	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya vaccine carrier	285 Unit	142.500.000	100.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	22	021	Pengadaan Barang Habis Pakai	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya barang medis habis pakai	100%	500.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				810.540.000	495.348.850	

01	02	23	015	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Puskesmas re-akreditasi	9 Unit	630.000.000	466.472.000	Dinas Kesehatan
01	02	23	017	Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES)	Kabupaten Pekalongan	JUmlah bulan pelayanan kesehatan swasta yang mendapatnya ijin operasional	12 Bulan	180.540.000	28.876.850	Dinas Kesehatan
01	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				20.920.760.000	27.295.001.429	
01	02	24	013	Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah masyarakat miskin yang terintegrasi layanan JKN BPJS tahun 2019	73658 Orang	20.920.760.000	27.295.001.429	Dinas Kesehatan
01	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				12.550.000.000	10.391.521.000	
01	02	25	024	Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK)	Pustu Batusari-Talun, Pustu Lemahabang-Doro, Pustu Dadirejo-Tirto, Pustu Legokgunung-Wonopringgo	Jumlah Pustu yang direhab	4 Unit	1.250.000.000	0	Dinas Kesehatan
					Puskesmas Talun, Puskesmas Tirto 1, Puskesmas Doro 1, Puskesmas Siwalan, Kedungwuni 2	Rehab Berat Puskesmas	5 Unit	7.300.000.000	7.281.861.000	Dinas Kesehatan
01	02	25	032	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DBHCHT)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Mobil untuk Fogging	1 Unit	1.000.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	25	034	Rahab Puskesmas Pembantu (DBHCHT)	-	Terehabnya Puskesmas Pembantu	6 Buah	2.700.000.000	75.680.000	Dinas Kesehatan
01	02	25	035	Pengadaan Konstruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK)	Puskesmas Talun	Jumlah IPAL	1 Unit	300.000.000	3.033.980.000	Dinas Kesehatan
01	02	25	039	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pusling (DAK)				0	150.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	25	040	Pengadaan Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19 (DBHCHT)				0	8.553.454.000	Dinas Kesehatan
01	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				25.500.000.000	11.650.378.000	
01	02	26	075	Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya alat kesehatan medis dan non medis	12 Bulan	500.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	26	076	Pembangunan RSUD Kesesi	Kabupaten Pekalongan	JUmlah RSUD yang terbangun	1 Unit	25.000.000.000	11.650.378.000	Dinas Kesehatan
01	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				100.000.000	0	
01	02	28	011	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah	Kabupaten Pekalongan	JUmlah Petugas UKS yang terbina	200 Orang	100.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				30.000.000	11.640.000	
01	02	31	008	Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana yang diduga terdapat produk ilegal yang diawasi/dipantau	15 Lokasi	30.000.000	11.640.000	Dinas Kesehatan
01	02	31	010	Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)				0	247.615.000	

01	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				5.665.923.000	5.753.832.000	
01	02	32	004	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya AMP	30 Kasus	500.000.000	31.815.000	Dinas Kesehatan
01	02	32	008	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya jaminan persalinan untuk ibu melahirkan	1766 Orang	3.514.923.000	4.912.708.000	Dinas Kesehatan
01	02	32	009	Biaya Operasional Kesehatan Jampersal (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya dukungan manajemen kegiatan BOK dan Jampersal	1 Tahun	901.000.000	59.309.000	Dinas Kesehatan
01	02	32	010	Penurunan Stunting (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan upaya penurunan stunting	1 Tahun	750.000.000	750.000.000	Dinas Kesehatan
01	02	33		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				581.018.000	159.577.100	
01	02	33	002	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posbindu PTM	285 Desa	581.018.000	159.577.100	Dinas Kesehatan
01	02	34		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				74.000.000.000	87.486.180.360	
01	02	34	005	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelayanan Puskesmas BLUD	12 Bulan	60.000.000.000	70.671.437.360	Dinas Kesehatan
01	02	34	006	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan terlaksananya program UKM Puskesmas	12 Bulan	14.000.000.000	16.814.743.000	Dinas Kesehatan
01	02	37		Program Manajemen Pelayanan Kesehatan				275.000.000	14.323.000	
01	02	37	001	Penyusunan Profil Kesehatan Daerah, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan	Kabupaten Pekalongan	Persentase pelaporan kinerja tahunan yang dilaporkan	100%	150.000.000	0	Dinas Kesehatan
01	02	37	002	Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Puskesmas yang mempunyai pengelola SIK	27 Unit	125.000.000	14.323.000	Dinas Kesehatan
TOTAL								163.931.344.715	156.503.179.066	

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab	
		Lokasi	Keluaran Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	10	12	
01								
01	02							
01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			20.441.999.000	11.857.132.706	

01	02	26	069	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK)	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1 Paket	20.441.999.000	11.857.132.706	Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
01	02	34		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				153.000.000.000	145.856.568.590	
01	02	34	004	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar	1 Tahun	153.000.000.000	145.856.568.590	Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
TOTAL								173.441.999.000	157.713.701.296	

Rumah Sakit Umum Daerah Kaien

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab			
		Lokasi	Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
01	02		KESEHATAN							
01	02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			40.387.342.000	40.387.342.000			
01	02	26	075 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK)	RSUD Kajen	Tersedianya alat kesehatan ICU, Rawat Inap, Ruang Operasi, IGD, Laboratorium, dan CSSD	1 Paket	2.702.000.000	3.163.399.294	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
01	02	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				74.740.000.000	74.740.000.000		
01	02	34	004 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	RSUD Kajen	Tersedianya tenaga/pegawai BLUD, tersedianya barang/jasa BLUD, dan tersedianya sarana/prasarana BLUD	12 Bulan	74.740.000.000	76.683.877.230	Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
TOTAL								115.127.342.000	115.127.342.000	

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.095.000.000	2.232.512.200		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terbayarnya jasa listrik, telepon, air, internet dan surat kabar	12 Bulan	240.000.000	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terbayarnya jasa KIR dan STNK Kendaraan dinas/operasional	105 Unit	125.000.000	90.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPU TARU Kab. Pekalongan	Tersedianya ATK	12 Bulan	160.000.000	70.748.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPU TARU Kab. Pekalongan	Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	220.000.000	80.936.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	330.000.000	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	DPU TARU Kab. Pekalongan	Tenaga Outsourcing Kebersihan dan Tenaga Lainnya	60 Orang	2.020.000.000	1.680.827.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.305.000.000	347.804.700	
00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terbelinya Perlengkapan gedung Kantor	100%	470.000.000	16.905.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terpeliharanya Gedung Induk DPU TARU dan Kantor UPT DPU TARU	8 Lokasi	200.000.000	34.610.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan penyediaan BBM bagi kendaraan dinas/operasional	10 Unit	540.000.000	146.081.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor (AC 25 unit, Genset 1 unit, Mesin Absensi 11 unit)	37 Unit	95.000.000	150.208.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				145.000.000	0	
00	00	03	003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terbelinya Pakaian Kerja lapangan	1 Paket	145.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				70.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terlaksananya diklat formal	15 Kali	70.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
01	03	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan				3.050.000.000	200.000.000	
01	03	23	014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan	DPU TARU Kab. Pekalongan	Terpeliharanya peralatan laboratorium	5 Unit	350.000.000	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	23	021	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	DPU TARU Kab. Pekalongan	1 Excavator (mini), Tandem Roller	3 Unit	2.200.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	23	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat	DPU TARU Kab. Pekalongan	Pemeliharaan terhadap Walls (12 unit), Bacho loader (1 unit), Exavator (2 Unit), Mini Exavator (2 Unit)	17 Unit	500.000.000	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				48.225.492.500	6.653.299.400	
01	03	24	018	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Optimalisasi jaringan irigasi	8 Paket	20.709.492.500	4.014.786.100	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01	03	24	019	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi	Desa Lumeneng	Pembangunan Irigasi Wangan gede	1500 m	500.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Kaliombo	Pembangunan /Rehabilitas saluran Irigasi Jalan	1600 m	1.150.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	24	025	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Kabupaten Pekalongan	Pembersihan dan pemeliharaan jaringan irigasi	6 KM	800.000.000	20.349.700	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	24	044	Peningkatan Jaringan irigasi	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya peningkatan Jaringan Irigasi	67 Paket	24.846.000.000	2.562.427.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	24	048	Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Devel & Managemen Irigation Project)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya peningkatan Jaringan Irigasi	-5 D.I.	220.000.000	55.735.700	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				25.544.599.102	246.532.800	
01	03	29	004	Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan	Penataan Kawasan Gemek (Lanjutan) Kec. Kedungwuni	Terbangunnya Infrastruktur Ibukota Kecamatan	1 Paket	6.764.600.602	184.205.800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Penataan Kawasan Surobayan - Sedayu (Lanjutan) Sebelah barat dan timur Kec. Wonopringgo	Terbangunnya Infrastruktur Ibukota Kecamatan	2 Paket	3.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Pacar Kecamatan Tirto	Penataan lingkungan ibu kota kecamatan (pelebaran jalan kabupaten, normalisasi saluran air dan pembuatan trotoar)	500 m	2.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	29	008	Penataan Sarana Prasarana Ibu Kota Kabupaten	Green Office (Lanjutan)	Pembangunan Koridor hijau Jalan Alun-alun Barat - Jalan Krakatau dan Jalan Alun-alun Timur ke Jalan Rinjani	1 Paket	10.779.998.500	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Penataan Kawasan	-	1 Paket	600.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Penataan Taman Plaza Depan Rumah Jabatan Bupati (Plaza tengah, Taman Tematik dan Taman Bermain Anak)	Terbangunnya Taman Plaza Depan Rumah Jabatan Bupati	1 Paket	2.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	29	023	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Kabupaten Pekalongan	Penanggulangan bencana alam yang menutupi infrastruktur (Jalan,Jembatan)	12 Bulan	300.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	29	028	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan	12 Bulan	100.000.000	62.327.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	32		Program Perencanaan Teknis Infrastruktur				1.550.000.000	903.674.700	
01	03	32	001	Perencanaan Teknis Infrastruktur	DPU TARU Kab.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis	8 Paket	950.000.000	784.116.700	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	32	034	Pengkajian dan Pengujian Infrastruktur	DPU TARU Kab. Pekalongan	Kualitas Bangunan Kontruksi yang sesuai dengan perencanaan	100%	200.000.000	17.902.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	32	035	Penyusunan Analisis Harga Satuan	DPU TARU Kab.	Dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan	1 Dokumen	200.000.000	77.702.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

01	03	32	036	Fasilitas IUJK	DPU TARU Kab. Pekalongan	IUJK dan Pelatihan Bina Kontruksi	100 Dokumen	200.000.000	23.952.800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	35		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1.000.000.000	115.514.200	
01	03	35	014	Fasilitas dan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	Kabupaten Pekalongan	Sosialisasi Penataan ruang, Tersusunnya RDR, Tersusunnya Sistem informasi Tata Ruang	100%	1.000.000.000	115.514.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37		Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				381.358.995.000	60.957.886.038	
01	03	37	001	Pembangunan Jembatan	karanganyar	terbangunya jembatan	1 Buah	20.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	002	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	15 Paket	4.300.000.000	5.024.169.200	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	003	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	Desa Salit	Perbaikan Jembatan Utama	25 m2	200.000.000	874.195.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Kabupaten Pekalongan (19 Kecamatan)	Bertambahnya Kualitas dan kapasitas Jembatan	19 Kec	9.500.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wates Kec. Kandangserang (Penguat Jembatan)	Terpeliharanya Jembatan	30 m	120.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	004	Peningkatan Jalan	Jalan Kutorjo - Tambakroto Kec. Kajen (P: 750 M ,L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	973.500.000	32.081.640.438	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Lingkar Kebonagung Kec. Kajen (P : 1.300 M, L : 5 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	2.109.250.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan LC Arrayan Kec. Kajen (P: 877 M, L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.138.346.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Kebonagung - Gejlig kec. Kajen (P : 2.293 M , L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	2.976.314.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Sangkanjoyo - Bukur (P: 1.500 M, L : 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.460.250.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Tengeng Wetan - Tegalontar Kec. Siwalan - Kec. Sragi (P : 700 M , L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	908.600.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan TPI - Pantai Kec. Wonokerto (P: 2.100 M, L: 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.534.300.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Api-api - Pecakaran Kec. Wonokerto (P : 1.100 M, L : 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.851.300.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jalan Wonokerto - TPI Kec. Wonokerto (P: 4.270 M , L: 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	7.581.880.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Wonokerto - Semut Kec. Wonokerto (P: 1.330, L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	2.984.520.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Kwasen - Kaibahan Kec. Kesesi (P: 3100 M, L: 6,5 M)	Memperlancar akses transportasi masyarakat/ Mobilitas masyarakat menjadi lancar	1 Paket	6.538.675.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Kajen - Kebonagung Kec. Kajen (P: 4.000 M, L : 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.894.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Gamblok - Loragung Kec. kandangserang (P: 2.724 M , L : 4 M)	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.857.148.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Kwasen - Windurojo Kec. Kesesi (P : 7.750 M , L : 3,5 M)	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Pekalongan	1 Paket	7.602.250.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Sragi - Bulakpelem Kec. Sragi (P : 2.000 M , L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	2.596.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Yosorejo - Curug Muncar Kec. Petungkriyono (P : 5.370 M L: 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	5.702.940.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Dororejo - Rogoselo Kec. Doro (P: 7.500 M, L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	8.735.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Rowolaku - Jetakidul (P: 4.781 M , L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	5.205.738.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jalan Bubak - Wiyoro - Cangkring Kec. Kandangserang (P: 5.380 M, L : 4 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	7.618.080.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Ruas Jalan Karangjampo - Mulyorejo (P : 1.600 M; L : 3 M)	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	6.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan Jl. Sragi - Bulakpelem (Depan PG Sragi)	Terpeliharanya jalan Kabupaten	1 Paket	1.500.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan jalan Batusari-Krompeng	Peningkatan jalan Batusari-Krompeng	1 Paket	1.700.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Peningkatan Jalan Timbangsari-Songgodadi	Peningkatan Jalan Timbangsari-Songgodadi	12000 m2	4.000.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

					Pengaspalan jalan curugmuncar- songgodadi	Pengaspalan jalan curugmuncar- songgodadi	2000 m2	1.600.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan jalan Sengare-Jolotigo	Peningkatan jalan Sengare-Jolotigo	1 Paket	1.700.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Kalirejo-Batursari	Peningkatan jalan Kalirejo-Batursari	1 Paket	1.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Larikan - Rogoselo	Peningkatan Jalan Larikan - Rogoselo	4000 x 4 m2	2.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					peningkatan jalan Dororejo - Lemahabang	Pengaspalan Jalan	4000 X 3.5 m2	2.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan jalan Batursari-Siicis	Peningkatan jalan Batursari-Siicis	1 Paket	1.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan jalan sikucing - gumelem p 900 m l 5 m (Desa Gumelem)	Peningkatan jalan sikucing - gumelem p 900 m l 5 m	4500 m	8.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					pengaspalan jalan gumelem -igirgede, igiergede- simego	pengaspalan jalan gumelem -igirgede, igiergede- simego	11 KM	27.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Balai Desa Kedungkebo ke timur s.d Balai Desa Kaligawe	Peningkatan Jalan Kedungkebo - Kaligawe	2500 m	2.800.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Perempatan Karangdadap ke timur s.d Desa Kaligawe	Peningkatan Jalan Karangdadap - Kaligawe	2300 m	2.600.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan Jalan KULU-LIMBANGAN	PENINGKATAN JALAN	2 Desa	250.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan jalan Yosorejo - curugmuncar P 5 Km L 3, 5 m	Peningkatan jalan Yosorejo - curugmuncar P 5 Km L 3, 5 m	18 KM	4.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Pengaspalan Jalan Sabarwangi - Kalijoyo (Desa Sabarwangi - Desa Kalijoyo)	Pengaspalan Jalan Sabarwangi - Kalijoyo	2100 m2	600.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Peningkatan Jalan Kutorojo - Tambakroto	Peningkatan Jalan Kutorojo - Tambakroto	8328 m2	960.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Ruas Jalan Lebakbarang-Timbang Sari	Peningkatan Ruas Jalan Lebakbarang-Timbang Sari	12000 m2	3.200.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	006	Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi	Jalan Paninggaran - Werdi kec. Paninggaran	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Pekalongan	1 Paket	6.442.920.000	10.484.372.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Windurojo - Watuireng Kec. Kesesi - Kec. Kandangserang	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.118.500.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Karangjati - Kampil Kec. Wiradesa	Terpeliharanya jalan di kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.960.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

					Jalan Kaliboja - Ketingkrang Kec. Paninggaran	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.980.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Ponorawen - kaibahan Kec. Kesesi	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.663.200.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Doro - Kroyakan Kec. Doro	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	4.150.782.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Kroyakan - Jolotigo Kec. Doro	Terpeliharanya Jalan kabupaten pekalongan	1 Paket	4.752.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Sikucing - Gumelem Kec. Petungkriyono	Terpeliharanya jalan di kabupaten Pekalongan	1 Paket	4.257.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Paninggaran - Notogiwang Kec. Paninggaran	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	5.049.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Rejosari - Kalijambe Kec. Bojong	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	6.033.456.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	009	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	Kabupaten Pekalongan	Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong	19 Kec	9.500.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Ds. Jolotogo	Pembangunan Drainase jalan Sengare-Jolotigo	1 Paket	40.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Ruas Jalan Sawangan - Pakisputih	Pembuatan Drainase	200X0.50X0.50 m2	80.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Ruas Jalan Kajen - Kulu (Jln. Singosari)	Pembangunan Drainase	750 m	750.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Raya Kertijayan - Bligo	Pembangunan Trotoar dan Saluran Drainase Jalan Raya Buaran (Kertijayan - Bligo)	2,5 KM	8.000.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Pembangunan Drainase Lolong - Pawuhan	PEMBANGUNAN DRAINASE	1000 m	550.000.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	011	Penataan Lingkungan Pedesaan	Kajen	Tertatanya penataan lingkungan Pedesaan	1 Paket	99.831.500.000	11.805.518.400		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	37	015	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Jalan Api-api - Pecakaran Kec. Wonokreto	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.306.800.000	687.991.000		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Tajur - Kandangserang Kec. Kandangserang	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	6.700.320.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Sragi - Ketanonageng Kec. Sragi	Terpeliharanya jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	5.979.600.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Jalan Kertoharjo - Karangdadap Kec. Karangdadap	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	8.262.540.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

				Jalan Bulaksari - Bulakpelem Kec.Sragi	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.484.800.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Jalan Rowolaku-Jetakkidul Kec.Kajen - Kec.Wonopringgo	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	3.786.552.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Jalan Wonokerto - Semut Kec.Wonokerto	Terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.053.360.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Jalan Gandarum-Tambakroto Kec.Kajen	terpeliharanya Jalan di Kabupaten Pekalongan	1 Paket	6.003.558.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Jalan Rowoyoso -Werdi Kec.Siwalan	Terpeliharanya Jalan Kabupaten Pekalongan	1 Paket	1.325.016.000		0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	38		Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob			289.836.247.400	12.707.611.000		
01	03	38	003	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Dusun Luwuk Desa Pekiringanalit	Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing sungai/kali,dan pengerukan sungai	2700 m3	200.000.000	7.587.283.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Rembun	Rehab tanggul penahan banjir	750 x 1,38 x 0,40 m	700.000.000	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing sungai/kali	134 Paket	200.054.122.400	0	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	38	008	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai	Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya Sungai/kali	20 KM	2.470.000.000	481.551.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	38	021	Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir	Rehabilitasi tanggul kali sengkarang desa Pesangrahan Pecakaran Kec. Wonokerto	Terbangunnya Bangunan Pengendali Banjir	26 Paket	86.162.125.000	4.625.694.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
01	03	38	022	Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air	Kabupaten Pekalongan	Papan Informasi dan Himbauan, Sistem Informasi Sumber Daya Air	2 Paket	250.000.000	13.081.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	04			PERTANAHAN						
02	04	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah				2.640.000.000	2.350.693.500	
02	04	16	005	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Kabupaten Pekalongan	Terfasilitasinya permasalahan pertanahan	12 Kasus	40.000.000	19.341.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
02	04	16	008	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	kajen	terlaksananya pengadaan tanah	1 Paket	2.600.000.000	2.331.352.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL								757.820.334.002	86.715.528.538	

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

						Rencana Tahun 2020					Pagu Indikatif	Perubahan	SKPD Penanggung jawab
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	-----------------------	------------------	------------------------------

Kode				Urusan Bidang	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Maksimal Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	
						Tolok Ukur	Target			
1				2	3	4	5	6	10	12
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.502.000.000	1.060.472.415	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	-Terlaksananya Pembayaran Rekening telepon 3 Unit,Rekening Listrik 9 Unit ,Biaya Pemasangan Listrik baru 1 Unit dan Biaya instalasi 1 Unit ,	12 Bulan	110.000.000	110.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Pembayaran KIR Kendaraan Roda Empat ,Terlaksananya Pembayaran STNK Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua	4984 Unit	130.000.000	110.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	terlaksananya pembayaran honor administrasi keuangan selama 1 tahun	26 Orang	162.000.000	57.456.500	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perkim dan LH Kab Pekalongan	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	150.000.000	40.980.425	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perkim dan LH Kab Pekalongan	tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan pelaratan rumah tangga	12 Bulan	40.000.000	10.658.243	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Dinas Perkim dan LH Kab Pekalongan	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kedinasan dan Tambahan Bagi Pekerja Lapangan	12 Bulan	450.000.000	116.377.247	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	01	023	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	terpenuhinya honor PTT	12 Bulan	1.460.000.000	615.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.185.000.000	4.294.403.138	
00	00	02	003	Pembangunan gedung kantor	Kab Pekalongan	Optimalnya Pelayanan Kantor dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Optimalnya Keamanan dan Kenyamanan Kerja sehingga meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	15.000.000.000	835.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perkim Dan LH Kab Pekalongan	- Mobil Amroll, Mobil Sky Light, Dump Truck Sampah	3 Unit	1.800.000.000	492.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	011	Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan	Kab Pekalongan	- Sarana Kebersihan Sapu, Cakar Sampah, serok, Pakain Kerja, Kontainer, Landasan Kontainer, Pool Garasi, TPS3R, Motor Roda 3	100 %	2.900.000.000	810.601.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Pekalongan	terlaksananya perbaikan gedung kantor	1 Paket	70.000.000	69.750.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

00	00	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Dinas Perkim dan LH Kab Pekalongan	tersedianya pemeliharaan dan bahan operasional mobil jabatan selama 12 bulan	12 Bulan	50.000.000	13.060.363	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Pekalongan	Tersedianya Pemeliharaan dan Operasional BBM selama 12 Bulan	100%	5.000.000.000	2.551.401.200	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pekalongan	terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	12 Bulan	65.000.000	14.097.975	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pekalongan	Tersedianya Latop ,AC,Filling Kabinet ,Printer ,Kipas Angin ,Scan Printer ,UPS ,Kamera Digital ,Proyektor ,Meja Tamu	1 Paket	300.000.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab Pekalongan	terlaksananya kursus/pelatihan dan seminar/workshop bagi PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 12 bulan	23 OK	50.000.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
01	03	32		Program Perencanaan Teknis Infrastruktur				720.000.000	251.073.045	
01	03	32	001	Perencanaan Teknis Infrastruktur	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	tersusunnya perencanaan teknis infrastruktur,tersusunnya dokumen prototipe bangunan gedung balai desa/kelurahan, terlaksananya pelatihan tenaga perencanaan bangunan gedung	1 Tahun	450.000.000	106.761.895	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	03	32	028	Perencanaan DED Jaringan LPJU	Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan	Tersedianya dokumen perencanaan jaringan LPJU	1 Dokumen	100.000.000	81.079.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	03	32	030	Perencanaan DED Penyediaan Air Minum	Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan	Tersusunnya DED Penyediaan Air Minum	2 Paket	100.000.000	53.139.750	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	03	32	032	Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan	Tersusunnya analisa harga satuan pekerjaan bidang cipta karya	2 Dokumen	70.000.000	10.092.400	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	03	33		Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan				12.475.000.000	14.103.151.390	
01	03	33	005	Pengadaan LPJU	Kab Pekalongan	-	-	11.675.000.000	13.674.227.990	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	03	33	007	Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU	Di Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya LPJU Di Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	800.000.000	428.923.400	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

01	04	15		Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman					750.000.000	411.818.800	
01	04	15	010	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-Kab.Pekalongan	-Terlaksananya pendampingan kegiatan fasilitasi Rehab RTLH	750 Unit		250.000.000	201.112.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	15	011	Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan	-Kabupaten Pekalongan	Terseleenggaranya proses penyerahan PSU		100%	100.000.000	1.303.200	Dinas Perumahan Rakyat Dan
01	04	15	012	Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman	Kab Pekalongan	Kelancaran Kegiatan DAK Perumahan		100%	300.000.000	109.403.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	15	016	Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa	Kedungwuni		00 -		100.000.000	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan					1.443.815.000	703.079.800	
01	04	16	007	Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi	Kab Pekalongan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dalam kegiatan Pembangunan Sanitasi	12 Bulan		485.000.000	100.711.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	16	010	Penunjang Hibah Air Limbah Setempat	Kab Pekalongan	Terlaksananya Kegiatan verifikasi dan pendampingan kegiatan HALS	12 Bulan		262.400.000	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	16	012	Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kab Pekalongan	Terlaksananya sosialisasi, penguatan kelembagaan pelaku KOTAKU, dan monitoring evaluasi kegiatan KOTAKU	12 Bulan		450.000.000	81.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	16	021	Penunjang DAK Sanitasi Penugasan	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dalam kegiatan Pembangunan Sanitasi Penugasan	12 Bulan		246.415.000	421.368.200	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	21		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					6.051.435.700	6.934.614.100	
01	04	21	003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kab Pekalongan	Terbangunnya Sarana Prasarana Air Minum (SPAM di Perdesaan dan terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pendampingan program Pamsimas dan HAMP		100%	1.267.220.700	3.503.342.100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	21	004	Pembangunan Baru bagi Daerah yang belum Memiliki layanan Air Minum (Dak Reguler)	Kabupaten Pekalongan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di daerah yang belum memiliki akses layanan air minum layak	5 Paket		2.410.310.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
01	04	21	005	Perluasan SPAM Perpipaan Melalui pemanfaatan idle Capacity SPAM Terbangun Petanglong dan Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAK Penugasan)	Kabupaten Pekalongan	Bertambahnya kapasitas dan volume SPAM dan Sambungan Rumah bagi daerah yang terdapat jaringan SPAM Petanglong dan/atau sudah melaksanakan PAMSIMAS	6 Desa		2.373.905.000	3.431.272.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
02	05			LINGKUNGAN HIDUP							
02	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					9.139.200.000	6.427.778.069	
02	05	15	014	Pemeliharaan TPA Bojonglarang	Kab Pekalongan	-	--		686.000.000	250.819.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

02	05	15	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan	Dinas Perkim dan LH	-	--	600.000.000	105.804.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	15	026	Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang	Kab Pekalongan	-	--	2.000.000.000	202.071.769	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	15	036	Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan	Kab Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi	-	--	5.061.200.000	5.682.833.800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	15	053	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Kab Pekalongan	100 % (Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan bintek)	18 Desa		392.000.000	19.972.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	15	057	Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat	Kab Pekalongan	-	--	400.000.000	166.277.500	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	16		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup				4.469.065.000	573.000.111		
02	05	16	019	Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)	Kab Pekalongan	Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan workshop proper, terlaksananya workshop pembinaan industri kecil, terlaksananya workshop forum pengawasan masyarakat	6 Kali		220.000.000	23.052.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	027	Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Kab Pekalongan	Jumlah sungai/titik yang diuji kualitasnya/ tersedianya informasi kualitas air dan udara	4 titik 24 Lokasi		200.000.000	28.922.850	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
					Dinas Perkim & LH Kab. Pekalongan	Tersedianya peralatan laboratorium kualitas air	100%	319.065.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	16	030	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Kab Pekalongan	Berkurangnya tingkat pencemaran akibat usaha / kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan	100%	70.000.000	20.415.200	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	16	043	Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan	Kab Pekalongan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	100%	60.000.000	1.220.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
02	05	16	049	Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Kab Pekalongan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan, terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha dan / atau kegiatan, terlaksananya inventarisasi sumber pencemar	34 usaha dan/atau kegiatan, 60 orang dan 1 dokumen -		130.000.000	70.666.831	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	059	Pengembangan Kapasitas Dalam Upaya Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim	Kab Pekalongan	Tersusunnya laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), Terlaksananya sosialisasi Proklamasi dan pendampingan SRN Proklamasi, Terpasangnya alat pengukur curah hujan, Terbangunnya sumur resapan air hujan	1 dokumen, 8 desa, 8 lokasi, 3 unit Unit		200.000.000	28.850.500	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

02	05	16	065	Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen	Dinas Perkim LH Kab Pekalongan	Terlaksananya fasilitasi administrasi penilaian Adipura. Rapat tahunan absobsi	12 (dalam 1x) Bulan	350.000.000	110.815.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	067	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat	Kab Pekalongan	Penilaian nominator lomba bersih sehat tingkat Kabupaten Pekalongan	100%	220.000.000	105.437.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	068	Biaya Operasional Instalasi Pengolah Limbah	Kecamatan Wiradesa	-	-	500.000.000	83.113.830	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	070	Peningkatan Fungsi IPAL	Kab Pekalongan	Peningkatan fungsi IPAL Simbang Kulon dan Karang Jompo Tirta	100%	1.200.000.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	071	Konservasi lahan Kritis	Kab Pekalongan	Luas lahan kritis yang terkonservasi	100%	160.000.000	100.506.900	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	16	072	Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Merkuri	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Merkuri	1 Paket	840.000.000	0	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	19		Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup				240.000.000	61.458.650	
02	05	19	006	Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH	SMPN 1 Karanganyar SMPN 4 Kajen SMK Muhammadiyah Karanganyar SA 1 Paninggaran SD 1 Ketitang SD 1 Kesesi SD 1 Badarejo MTS Kajen MTS Karanggodang SD Muhammadiyah Kajen	Sosialisasi Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Pekalongan	100%	150.000.000	20.329.900	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	19	017	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Kab Pekalongan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	100%	90.000.000	41.128.750	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				900.000.000	143.198.500	
02	05	24	022	Perambasan dan Pemothonan Pohon di Tepi Jalan	Kab Pekalongan	-	-	200.000.000	32.790.250	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
02	05	24	023	Pengadaan Tanaman dan Pot	Kab Pekalongan	-	-	700.000.000	110.408.250	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
TOTAL								63.925.515.700	34.964.048.018	

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020		Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan			

			LURASI	Tolok Ukur	Target	Tahun 2019	Tahun 2020		
1	2		3	4	5	6	10	12	
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.518.978.800	1.124.035.500		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan	Jumlah Pembayaran rekening telepon, internet listrik dan surat kabar per tahun (Kali)	12 Bulan	35.000.000	32.076.500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah perawatan peralatan dan perlengkapan kantor dan perizinan Kendaraan dinas/operasional(bulan)	12 Bulan	37.000.000	30.677.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah terpenuhinya jenis kebutuhan ATK dan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12 Bulan	30.000.000	22.808.900	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan)	12 Bulan	16.000.000	13.524.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah waktu terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	12 Bulan	408.480.000	107.202.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah tenaga jasa administrasi perkantoran (bulan)	12 Bulan	374.498.800	300.832.300	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	01	043 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penyediaan Tenaga Operasional Satpol PP (bulan)	12 Bulan	618.000.000	616.914.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.894.500.000	452.232.000	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah perawatan sarana dan prasarana gedung kantor (unit)	1 Unit	37.000.000	26.996.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	02	023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan mobil dinas jabatan (bulan)	12 Bulan	432.500.000	375.636.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	19 Unit	2.425.000.000	49.600.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				295.063.800	189.392.100	
00	00	03	002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah pengadaan pakaian dan perlengkapan satpol pp dan linmas (Kali)	2 Kali	265.063.800	181.806.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	03	010 Operasi Penegakan Disiplin Pegawai	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Lokasi operasi kedisiplinan pns di wilayah kab. Pekalongan (Kegiatan)	18 Keg	30.000.000	7.585.300	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				382.000.000	34.771.000	
00	00	05	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor Satpol PP dan Damkar	Jumlah periode peningkatnya kemampuan anggota satpol pp,Irc dan damkar (bulan)	12 Bulan	382.000.000	34.771.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
01	05	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal				1.623.377.200	974.225.400	

01	05	16	007	Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah	Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (Acara)	12 Kali	1.158.870.000	458.873.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	16	010	Patroli Wilayah	Kabupaten Pekalongan	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (Kegiatan)	84 Keg	246.107.200	297.162.400	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	16	011	Operasional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Lancarnya Kesiapan Anggota LRC dalam Mengemban Tugas	12 Bulan	218.400.000	218.190.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)				77.000.000	20.475.200	
01	05	20	009	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Kabupaten Pekalongan	Berkurangnya penyakit masyarakat (kegiatan)	25 Keg	77.000.000	20.475.200	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	26		Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa				40.000.000	0	
01	05	26	002	Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa	Kabupaten Pekalongan	Kesiapan anggota linmas dalam mengemban tugas (orang)	350 Orang	40.000.000	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	27		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				425.000.000	143.790.000	
01	05	27	001	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan	Peningkatan kinerja anggota damkar (Unit)	15 Unit	195.000.000	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	27	003	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Kabupaten Pekalongan	Meningkatnya kemampuan aparat terkait dan masyarakat dalam menangani bahaya kebakaran (Orang)	250 Orang	230.000.000	143.790.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	28		Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup				601.630.000	205.943.400	
01	05	28	001	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	kajen		0	86.030.000	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	28	002	Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain	Kabupaten Pekalongan	Operasi penegakan perda di 200 desa 13 kelurahan di 19 kecamatan	51 Keg	450.000.000	74.250.600	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
01	05	28	012	Pembinaan, Pengawasan Penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah monitoring/pengawasan dan evaluasi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah di 285 desa	24 Keg	65.600.000	31.692.800	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL								7.857.549.800	3.144.864.600	

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			451.456.250	320.781.737

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Bulan dalam penyediaan Jasa listrik, Telpon dan air, Surat kabar dan Internet	12 bulan Bulan	35.000.000	35.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kesbangpol	Jumlah STNK yang di Perpanjang	9 kendaraan Buah	5.456.250	4.206.250	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesbangpol	jumlah bulan yang terpenuhi kebutuhan ATK dan jumlah barang yang di cetak dan di gandakan	12 bulan Bulan	60.000.000	36.512.189	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesbangpol	Jumlah bulan terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan jumlah dan jenis pengadaan komponen listrik	12 bulan Bulan	11.000.000	10.583.498	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	JawaTengah dan Luar Jawa Tengah dan wilayah kabupaten pekalongan	Jumlah perjalanan Dinas LuarDaerah dan dalam daerah serta jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai padarakor	12 bl Kali	225.000.000	122.424.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kesbangpol	Jumlah Bulan tersediannya jasa Kebersihan dan jasatenaga lainnya	12 bulan Bulan	115.000.000	112.055.800	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				586.000.000	117.562.000	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kesbangpol	Jumlah Gedung yang dipelihara, jumlah alat korsik yang diperbaiki, jumlah bulan terpenuhinya servis peralatan kantor dan terlaksananya rehap atap gedung kantor	12 bl Bulan	442.000.000	25.901.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kesbangpol	Jumlah Bulan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan mobil jabatan	12 bulan Bulan	70.000.000	60.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	3 unit laptop, 4 unit PC Unit	74.000.000	31.661.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000	0	
00	00	05	013	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kesbangpol	Terlaksananya Bintek/SEminar/Pelatihan/Ssosialisasi/Dise minasi bagi ASN	12 bl Bulan	40.000.000	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
01	05	15		Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				1.332.270.000	647.336.007	
01	05	15	008	Antisipasi Pengamanan Wilayah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pengamanan tertutup oleh TNI/POLRI dan Aparat Kesbangpol pada Hari Raya Agama, Kunjungan Tamu VIP, dan Acara Insidentel Pemda	12 giat Kali	1.332.270.000	647.336.007	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.011.640.000	37.960.000	

01	05	17	004	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Kompi C 407 Wonopringgo dan kabupaten pekalongan	Jumlah Peserta yang mengikuti Kemah Kader Bela Negara, terlaksananya peringatan HUT RI, Hari jadi dan hari Besar nasional sera terlaksannya pembinaan dan pengkaderan anggota korsik	125 org, 13 giat dan 12 bulan Orang	806.640.000	37.960.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	17	005	Pengawasan Orang Asing	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kegiatan monitoring ke KeLokasi tempat tinggal dan bekerja orang sing	4 kl Kali	25.000.000	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	17	006	Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat	Kab.Pekalongan	Jumlah Peserta Outbond penguatan Idiologi Pancasila bagi elemen masyarakat	150 orang Orang	180.000.000	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan				635.000.000	340.355.800	
01	05	19	004	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kesbangpol	Jumlah bulan rakor antisipasi cegah dini dan deteksi dini Kejadian di Wilayah Kabupaten Pekalongan dan jumlah rakor FPBI Tingkat kabupaten Pekalongan	12 kali, dan 4 kali l Kali	460.000.000	340.355.800	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	19	007	Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kab Pekalongan	Jumlah Peserta Rapi/Sosialisasi Narkoba di Kabupaten Pekalongan	6 SLTA Lokasi	150.000.000	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	19	008	Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI dan FKDM	Kab Pekalongan	Jumlah Pengiriman Peserta Bintek/Sosialisasi/Whokshop/ Seminar/Dialog Anggota FKUB/FPBI/FKDM dan Ormas/LSM, Pembinaan dan Pemberdayaan FKDP, pembentukan FPBI tingkat Kecamatan, dan terfasilitasinya Forkopinda ke Luardaerah	12 bl Bulan	25.000.000	0	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat				155.000.000	17.764.000	
01	05	21	010	Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik Terwakili	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan yang difasilitasi koordinasi antarPartai Politik terwakili, Jumlah peserta bintek pengurus Parpol, jumlah peserta sosialisasi Reglasi Pemilu	12 bl, 60 org, 19 kec Bulan	155.000.000	17.764.000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	24		Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil				250.000.000	47.462.900	
01	05	24	005	Pengawasan dan Pembinaan Ormas/LSM di Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	jumlah ormas yang terbina oleh tim Pengawasdan pembina Ormas,	126 ormas Buah	250.000.000	47.462.900	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL								4.461.366.250	1.529.222.444	

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			742.892.000	527.306.205		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	12 Bulan	85.000.000	84.999.996	Dinas Sosial
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan kendaraan yang dibayarkan STNK sebanyak 17 kendaraan selama satu tahun	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	Dinas Sosial
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun	12 Bulan	77.000.000	35.000.000	Dinas Sosial
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan rumah tangga dan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama satu tahun	12 Bulan	29.000.000	18.995.600	Dinas Sosial
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai selama satu tahun	12 Bulan	209.000.000	82.319.200	Dinas Sosial
00	00	01	023 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi sebanyak 1 orang, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama satu tahun	12 Bulan	327.892.000	290.991.409	Dinas Sosial
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				826.000.000	179.793.000	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, DED dan Rehabilitasi Sekretariat PKH selama satu tahun	12 Bulan	440.000.000	100.796.000	Dinas Sosial
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan dalam rangka pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional sebanyak 3 unit dan Pemeliharaan R/B Mobil Jabatan selama satu tahun	12 Bulan	82.000.000	62.000.000	Dinas Sosial
00	00	02	028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan dalam rangka pemeliharaan	12 Bulan	29.000.000	16.997.000	Dinas Sosial

00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan dalam rangka pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional selama satu tahun	2 Paket	275.000.000	0	Dinas Sosial
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pengiriman pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan formal selama satu tahun	12 Bulan	20.000.000	0	Dinas Sosial
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	06			SOSIAL						
01	06	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				1.820.000.000	770.000.000	
01	06	15	011	Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok	3 Desa (Pegaden Tengah, Kelurahan Bligo & Desa Simbang wetan	Pengembangan UEP WRSE/Keluarga melalui Kube _ FM bagi Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kecamatan Buaran	2000000 x 3 Orang	60.000.000	770.000.000	Dinas Sosial
					Kecamatan Wiradesa	Peningkatan kemampuan usaha kelompok usaha bersama (KUBE)	2 Kelompok	40.000.000	0	Dinas Sosial
					Kab. Pekalongan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang menerima bantuan	200 Orang	1.520.000.000	0	Dinas Sosial
01	06	16		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				951.000.000	113.275.300	
01	06	16	015	Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Pekalongan	Jumlah kelayan yang difasilitasi di rumah singgah PMKS dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Singgah PMKS selama satu tahun	155 Orang	850.000.000	73.265.300	Dinas Sosial
					14 Desa Kec. Wonopringgo	Fasilitasi pelayanan Rujukan bagi PMKS ekspsikotik (Sakit Jiwa) Berbasis Keluarga	200000 x 12x 10 Ekspisikotik Orang	24.000.000	0	Dinas Sosial
01	06	16	017	Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat	Kecamatan Wiradesa	Temu penguatan anak berbasis lembaga	25 Orang	25.000.000	40.010.000	Dinas Sosial
					Kab. Pekalongan	Jumlah anak dan keluarga yang mendapat penguatan calon orang tua angkat dan calon anak angkat berbasis keluarga dan masyarakat	350 Orang	52.000.000	0	Dinas Sosial
01	06	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				934.666.000	291.226.100	
01	06	21	012	Fasilitasi bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial	Kab. Pekalongan	Jumlah PSKS yang difasilitasi dalam rangka Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial, Peningkatan TKSK, LK3, Penguatan Kelembagaan Karang Taruna dan Pengadaan Sarana Kerja selama (satu) tahun	190 Orang	934.666.000	291.226.100	Dinas Sosial

01	06	22		Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial				465.000.000	252.953.430	
01	06	22	001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama"	Kab.Pekalongan	Jumlah bulan dalam rangka pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan dan Rehabilitasi TMP Bhakti Wiratama selama satu tahun	12 Bulan	280.000.000	208.590.280	Dinas Sosial
01	06	22	002	Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo	Kab.Pekalongan	Jumlah Peserta Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan, Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo selama 1 (satu) tahun	750 Orang	185.000.000	44.363.150	Dinas Sosial
01	06	23		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				1.142.617.000	330.846.400	
01	06	23	004	Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir	Kab.Pekalongan	Jumlah bulan pendampingan tenaga pelaksana dalam rangka kegiatan fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan penanganan fakir miskin pesisir selama satu tahun	12 Bulan	906.617.000	194.846.400	Dinas Sosial
01	06	23	014	Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif	Kab. Pekalongan	Jumlah Lanjut Usia non produktif yang mendapat bantuan permakanan selama satu tahun	450 Orang	200.000.000	136.000.000	Dinas Sosial
					Kecamatan Wiradesa	Bantuan kebutuhan hidup orang lanjut usia non produktif terlantar	12 Orang	36.000.000	0	Dinas Sosial
01	06	26		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				200.000.000	22.760.200.000	
01	06	26	001	Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Kab.Pekalongan	Jumlah bulan dalam penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	12 Bulan	200.000.000	22.760.200.000	Dinas Sosial
01	06	27		Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)				630.627.000	249.775.435	
01	06	27	003	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan	Kab.Pekalongan	Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan kemiskinan kegiatan di Dinas Sosial Kab. Pekalongan	500 Lokasi	55.000.000	20.000.000	Dinas Sosial
01	06	27	004	Update Data Kemiskinan	Kab.Pekalongan	Jumlah Update Data Kemiskinan di Kab. Pekalongan selama satu tahun	19 Kec	95.000.000	100.000.000	Dinas Sosial
01	06	27	005	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu PMKS	Kab.Pekalongan	Jumlah layanan rujukan terpadu bagi PMKS dan masyarakat miskin	19 Kec	130.627.000	55.000.000	Dinas Sosial
01	06	27	006	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten Kota (DAK)	Kajen	tersedianya fasilitas kelembagaan penunjang SLRT	1 Paket	350.000.000	74.775.435	Dinas Sosial
01	06	28		Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma				593.000.000	18.738.600	
01	06	28	001	Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah dengan Hukum	Kab.Pekalongan	Jumlah anak yang terdampingi dalam rangka mendapat penjangkauan pendampingan anak rentan bermasalah dengan hukum	30 Orang	50.000.000	18.138.600	Dinas Sosial

01	06	28	002	Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kecamatan Buaran	Bantuan Alat Bantu Penderita Disabilitas Di Wilayah Kecamatan Buaran	20 Orang	200.000.000	600.000	Dinas Sosial
					Kecamatan Wiradesa	Bantuan alat penyandang disabilitas wiradesa	43 Orang	43.000.000	0	Dinas Sosial
					Kab.Pekalongan	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia yang menerima bantuan	200 Orang	300.000.000	0	Dinas Sosial
TOTAL								8.325.802.000	25.494.114.470	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			542.350.000	199.274.400		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kabupaten Pekalongan	Terbayarnya rekening telepon, rekening air, rekening listrik, surat kabar/majalah dan internet	12 Bulan	60.000.000	60.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	01	008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya tenaga kebersihan kantor dan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	81.800.000	78.837.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPBD Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya alat tulis kantor dan cetak penggandaan	12 Bulan	90.550.000	25.334.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya peralatan rumah tangga dan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan	55.000.000	5.169.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	BPBD Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lancar serta terlaksananya makan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	255.000.000	29.932.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				400.000.000	94.670.400	
00	00	02	007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya AC, printer, lemari besi/mental, keyboard & mouse, LCD Monitor, UPS, Laptop, Printer, Proyektor dan HP Android	10 Unit	100.000.000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPBD Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya gedung kantor BPBD Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	155.000.000	6.115.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya BBM, servis dan penggantian suku cadang kendaraan operasional, mobil jabatan dan jasa perizinan/STNK dan balik nama kendaraan	12 Bulan	145.000.000	88.555.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					5.000.000	5.000.000	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPBD Kabupaten Pekalongan	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12 Bulan		5.000.000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
01	06			SOSIAL							
01	06	26		Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					2.679.360.000	1.699.112.500	
01	06	26	002	Pengadaan Logistik Bencana	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya mie instan, minyak goreng, air mineral dll beserta bahan material	1 Paket		260.000.000	99.592.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01	06	26	011	Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kabupaten Pekalongan	Tersedianya fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	12 Bulan		165.000.000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01	06	26	015	Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga	BPBD Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejadian bencana yang perlu diberi bantuan dana tak terduga	12 Bulan		85.000.000	11.050.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01	06	26	016	Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana	BPBD Kabupaten Pekalongan	Jumlah kejadian bencana yang perlu mendapatkan fasilitas	12 Bulan		799.360.000	620.674.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01	06	26	017	Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana	BPBD Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi dan ketrampilan penanggulangan bencana	80 Orang		765.000.000	97.995.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01	06	26	022	Pengurangan Resiko Bencana	BPBD Kabupaten Pekalongan	Pengiriman peserta PRB, apel siaga bencana dan penanaman pohon keras	500 Orang		605.000.000	869.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL									3.626.710.000	1.998.057.300	

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan Bidang	Lokasi	Rencana Tahun 2020		Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab			
			Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
00			NON URUSAN							
00	00		NON URUSAN							
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.693.500.000	1.093.309.581			
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	450.000.000	440.520.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	245.000.000	240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Pemeliharaan perijinan kendaraan	12 Bulan	448.500.000	269.532.360	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

00	00	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	62.500.000	25.928.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Makmi	12 Bulan	487.500.000	117.329.221	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				613.894.000	166.922.000	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan pemeliharaan mebelair	1 Paket	195.000.000	128.750.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan jabatan	12 Bulan	118.894.000	31.662.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKPP Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan mebelair	1 Paket	300.000.000	6.510.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
00	00	02	214	Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan	DKPP Kab. Pekalongan					0
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	03			PANGAN						
02	03	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan				780.000.000	293.260.500	
02	03	15	022	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta pertemuan yang terpenuhi untuk peningkatan mutu dan keamanan pangan dan penyusunan angka pola pangan harapan	100 Orang	190.000.000	13.087.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02	03	15	034	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan dan rapat koordinasi ketahanan pangan	200 Orang	120.000.000	7.886.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02	03	15	079	Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Untuk Penguatan Ketahanan Pangan	Kab. Pekalongan	Jumlah pembinaan yang terpenuhi untuk pembinaan Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) untuk penguatan ketahanan pangan	6 Kali	220.000.000	53.827.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02	03	15	083	Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi untuk fasilitasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah	1 Paket	250.000.000	218.459.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
02	03	16		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				425.000.000	33.739.300	
02	03	16	013	Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam mengolah aneka macam pangan lokal berbasis sumber daya wilayah dan KRPL dinas 1 dan KRPL kecamatan 2	125 Orang	425.000.000	33.739.300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03				URUSAN PILIHAN						
03	03			PERTANIAN						

03	03	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					300.000.000	79.345.400	
03	03	15	007	Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES)	Kab. Pekalongan	Jumlah unit yang terpenuhi untuk pengembangan dan pembentukan pos penyuluhan perdesaan (POSLUHDES) dan penguatan BPK	8 Unit		100.000.000	16.025.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	15	010	Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang terbayar untuk peningkatan PUAP	8 Orang		200.000.000	63.319.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan					145.000.000	26.525.200	
03	03	17	020	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Kab. Pekalongan	Jumlah event yang diikuti untuk promosi atas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	2 Kali		145.000.000	26.525.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan					50.000.000	25.882.000	
03	03	18	020	Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi	Kab. Pekalongan	Jumlah komoditas yang terpenuhi untuk pengembangan komoditas pertanian varietas unggul melalui demonstrasi penerapan teknologi	3 Komoditas		50.000.000	25.882.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan					2.537.678.400	937.198.800	
03	03	19	023	Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk pengembangan dan peningkatan tanaman tahunan perkebunan rakyat	90 Orang		763.078.500	234.589.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19	027	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tembakau (DBHCHT)	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk pengembangan dan peningkatan produksi tembakau dan pengendalian hama (DBHCHT)	50 Orang		835.000.000	384.586.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19	029	Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Perkebunan	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk pengendalian OPT dan pemupukan tanaman perkebunan, pengendalian OPT cengkeh 1 dinas 1 kecamatan, OPT kopi, OPT Kakao, OPT Kelapa	40 Orang		309.600.000	79.013.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19	033	Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Semusim	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan SPLHT Tebu	115 Orang		364.999.900	239.010.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19	058	Pembinaan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pupuk	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan pupuk organik	40 Orang		115.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	19	060	Fasilitasi Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Bidang Pertanian	Kabupaten Pekalongan		0	0 -	150.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan					957.000.000	27.041.000	
03	03	20	004	Penyusunan Programa Penyuluhan	Kab. Pekalongan	Jumlah Kecamatan yang terpenuhi untuk penyusunan programa penyuluhan	19 Kec		530.000.000	13.823.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

03	03	20	018	Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk peningkatan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani, penyusunan program penyuluhan, fasilitasi latihan dan kunjungan, THLTBPP, Kapasitas sumberdaya penuluh swadaya	150 Orang	427.000.000	13.218.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	21		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				200.000.000	35.339.600	
03	03	21	009	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Kab. Pekalongan	Jumlah orang/peternak yang terpenuhi untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan	120 Orang	200.000.000	35.339.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				1.530.000.000	203.584.496	
03	03	22	023	Peningkatan Mutu Ternak	Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi untuk peningkatan mutu ternak dan peningkatan produksi ternak dan SDM peternakan	1 Paket	300.000.000	23.161.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	22	032	Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat	Kab. Pekalongan	Pendampingan peserta sekolah peternakan rakyat 100 orang, pembuatan kandang percontohan dan penanaman hijauan pakan ternak dan kelembagaan SPR, penyediaan bibit rumput ternak, kandang percontohan dari SLAK	100 Orang	500.000.000	122.750.796	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Kecamatan Panninggaran	Penguatan Kelembagaan SPR	1 Paket	100.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Kecamatan Panninggaran	Penanaman Rumput Unggul	36 Ha	360.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	22	034	Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal	Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk bimbingan teknis penyembelihan halal dan pemantauan hewan kurban	105 Orang	120.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	22	039	Pengadaan Sarana Prasarana Alat RPH	Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi untuk pengadaan sarana prasarana alat rumah potong hewan (RPH)	1 Paket	100.000.000	9.418.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	22	041	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas	Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang terpenuhi untuk pengadaan sarana prasarana PUSKESWAN	1 Paket	50.000.000	48.254.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				32.519.245.000	7.719.478.800	
03	03	23	001	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian	Kab. Pekalongan	Jumlah paket yang dikerjakan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan produk pertanian	2 Kali	225.000.000	23.571.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	002	Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensi Hayati dan Pestisida Nabati	Kab. Pekalongan	Jumlah paket sosialisasi penyediaan pestisida dan pengembangan agensi hayati serta pestisida nabati	1 Paket	600.000.000	50.702.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					11 desa	Bantuan Penanganan Hama Pengganggu Tanaman	11 Paket	165.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

					Dk Karanggondang	Pengendalian hama tanaman padi	4 Paket	120.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	009	Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi	Kab. Pekalongan	Jumlah Orang yang terpenuhi untuk Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi	120 Orang	100.000.000	1.624.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	030	Pemantauan Ketersediaan Pangan	Kab. Pekalongan	Jumlah kecamatan yang terpenuhi untuk pemantauan ketersediaan pangan, pemantauan harga pangan strategis dan pemantauan hari besar keagamaan	19 Kec	162.000.000	22.499.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	034	Pembangunan Dam Parit	Kab. Pekalongan	Jumlah Lokasi yang terpenuhi untuk Pembangunan Dam Parit	14 Lokasi	2.000.000.000	720.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	040	Gemar Menanam Sayuran pada Anak Sekolah	Kab. Pekalongan	Jumlah orang/sekolah yang terpenuhi untuk gemar menanam sayuran pada anak sekolah	1 Sekolah	220.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	042	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian	Kab. Pekalongan	Jumlah Lokasi yang terpenuhi untuk Pembangunan Prasarana Pertanian	22 Lokasi	17.923.045.000	6.895.659.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					RW 02 Desa Sumubkidul	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	850 m	163.200.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Embong Krasak	Saluran Irigasi Krasakageng - Sumublor	600 m	210.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Krasakageng - Desa Sijeruk	Pembangunan Saluran Irigasi (Tersier)	450 m	300.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Bulakpelem - Desa Kalijambe	Saluran Irigasi Desa Bulakpelem - Desa Kalijambe	1500 m	490.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					11 desa	Perbaikan Saluran Irigasi	11 Unit	550.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Pamutuh, Depok dan Mendolo	Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL	3 Unit	45.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Dk. Kaliketing Desa Kalimijosari	Perbaikan Jaringan Irigasi	2000 X 0.5 X 1 m3	276.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Larikan dan Sawangan	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides)	1000 m2	200.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Dukuh Harjosari	Irigasi sawah	350 m	100.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	044	Pengembangan Komoditas Padi Spesifik Lokasi	Kab. Pekalongan	Jumlah luasan yang terpenuhi untuk pengembangan komoditas padi spesifik Lokasi 1 dinas 1 kec	20 Ha	310.000.000	3.939.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Bligorejo	Dam area tanaman padi	50 Ha	85.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
03	03	23	045	Pengembangan Kawasan Hortikultura	PODODADI	PENGADAAN BIBIT DURIAN BAWOR, KLENGKENG DAN ANGGUR (slak)	200 Buah	2.950.000.000	1.481.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Desa Pungangan, Sidoharjo, Wringinagung, Randusari dan Dororejo	Bibit Alpokat Unggul	2500 Bibit	125.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					desa wangkelang	Penghijauan/Pertanian Bantuan Bibit	1 Paket	100.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Kecamatan Paninggaran	Pengadaan bibit manggis	30000 Bibit	700.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

					Kecamatan Panninggaran	Pengadaan bibit Durian Bawor	10000 Bibit	1.200.000.000		0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Kecamatan Panninggaran	Pengadaan bibit Alpukat	10000 Bibit	250.000.000		0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Kab. Pekalongan	Jumlah peserta yang terpenuhi untuk pengembangan kawasan hortikultura (Komoditas Durian)	160 Orang	2.950.000.000		0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL								41.751.317.400	10.641.626.677		

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.057.079.600	695.458.300		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kajen	Tersedianya bahan bacaan koran, jasa telpon, PAM, listrik, jasa bandwidth dan pulsa untuk aplikasi SIDAK on line dan aplikasi gate way	12 Bulan	410.663.000	298.659.200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Tersedianya kendaraan jabatan/operasional yang telah disahkan	7 Unit	4.400.000	4.400.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kajen	Tersedianya alat tulis kantor dan Barang cetakan	12 Bulan	143.337.600	63.042.600	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kajen	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih, lampu alat listrik dan penerangan serta bahan anti kuman	12 Bulan	15.000.000	11.061.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kajen	Tersedianya hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta makan rapat/tamu dan minum harian pegawai	12 Bulan	137.831.000	46.067.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kajen	Tersedianya tenaga outsourcing = 7 orang x 12 bulan, tenaga PTT = 5 orang x 12 bulan serta honorarium Pengelola Anggaran	12 Bulan	345.848.000	272.228.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.730.344.400	429.556.000	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bojong, tiro, siwalan, doro, karangdadap, sragi, panninggaran, kesesi	Tersedianya gedung dinas, gedung kantor pelayanan adminduk di kecamatan yang terawat serta peralatan kantor yang terpelihara	12 Bulan	70.989.400	32.876.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Tersedianya kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan yang siap pakai	7 Unit	83.350.000	83.350.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Tersedianya genset = 1 unit, dan Kardek besi = 2 unit, Projector = 2 unit, Projector Screen = 1 unit, papan pengumuman = 1 unit, barcorde = 2 unit, Lemari besi = 5 unit, Filling Cabinet Besi = 5 unit	115 Unit	1.576.005.000	313.330.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
02	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				3.922.220.100	3.139.571.100	
02	06	15	024	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik)	Kajen	Tersedianya bahan pendukung penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	12 Bulan	1.672.387.500	2.958.841.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	026	Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan (DAK Non Fisik)	19 Kecamatan	Tersedianya data lahir, mati, pindah dan datang (LAMPID) dan Dokumen Profil Kependudukan	12 Bulan	436.951.400	0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	027	Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)	Kajen	Terbitnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	19 Kec	600.000.000	0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	030	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kajen	Tersedianya survey kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan Terlaksananya Pelayanan Adminduk Keliling	12 Bulan	126.826.000	18.070.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	032	Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kajen	Terlaksananya penerbitan kartu identitas anak (KIA)	57154 Orang	696.395.000	0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	034	Fasilitasi Itsbat Nikah	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Pendataan dan verifikasi Penduduk Belum Berakta Nikah	400 Orang	250.000.200	73.515.100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
02	06	15	035	Penerapan Arsip Digital	Kajen	Tersedianya data dokumen (arsip) pencatatan sipil yang terdigitalisasi dan Terentrinya data akta kelahiran kedalam database SIAK	60400 Dokumen	139.660.000	89.145.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL								6.709.644.100	4.264.585.400	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00			NON URUSAN				
00	00		NON URUSAN				
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			810.640.000	530.189.550

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	70.000.000	86.667.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 Bulan	66.805.000	50.235.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	65.000.000	20.995.750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor	12 Bulan	11.995.000	7.528.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	420.000.000	164.123.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya tenaga teknis/administrasi dalam rangka kebersihan, keamanan dan kelancaran kantor	12 Bulan	176.840.000	200.640.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				375.000.000	70.550.000	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya gedung kantor dan gudang alokon	12 Bulan	100.000.000	15.250.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Pekalongan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	125.000.000	55.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya peralatan kantor	20 Unit	150.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000	1.800.000	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Pekalongan	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi PNS	12 Bulan	35.000.000	1.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
02	02	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan				300.000.000	0	
02	02	15	008	Perumusan Kebijakan Penyusunan Produk Hukum Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kabupaten Pekalongan	Tersusunnya perda KLA dan perda PUG	2 Dokumen	300.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	02	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak				510.784.450	93.035.000	
02	02	16	012	Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kabupaten Pekalongan	Rakor PPT, gelar kasus, pencegahan kekerasan di sekolah, penguatan kelembagaan ppt kecamatan dan PATBM serta pelatihan petugas konselor	kegiatan Rakor PPT 1 x setahun, 1 x gelar kasus, pencegahan kekerasan di 4 sekolah, penguatan kelembagaan ppt 4 kecamatan dan pembentukan kelompok PATBM 4 desa dan pelatihan konselor penanganan korban Kasus	220.775.500	48.035.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

02	02	16	016	Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan partisipasi lembaga-lembaga berbasis gender	Kegiatan pada peringatan hari Kartini : Rapat persiapan Hari Kartini mengundang 25 orang terdiri dari OPD dan organisasi, - Sarasehan peserta 450 orang, terdiri dari GOW, LSM, PKK dan OPD se Kabupaten Pekalongan Orang	84.353.500	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	02	16	019	Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Pekalongan	Rakor GTKLA, sosialisasi KHA dan SRA, Seminar dalam rangka HAN, GTDLA desa/kecamatan, pengembangan SIGA, pendampingan forum anak kabupaten dan kecamatan	2 x rakor GTKLA, 1 x sosialisasi KHA dan SRA, Seminar dalam rangka HAN serta GTDLA 6 desa/kecamatan, 2x input data SIGA, 1xpendampingan forum anak kabupaten dan 7 kecamatan Kelompok	205.655.450	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	02	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan				55.000.000	0	
02	02	17	014	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan ASI Eksklusif Bagi Ibu Menyusui	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya advokasi motivator dalam pendampingan perusahaan menyusui dini dan ASI eksklusif	Advokasi bagi motivator peserta perwakilan 20 orang	55.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
02	02	18		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan				351.393.000	146.678.800	
02	02	18	008	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG	Persentase dari OPD 60	200.000.000	116.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
02	02	18	009	Bimbingan Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Rumah Tangga	Kegiatan dan pelatihan membuat kue kelompok perempuan di 2 Kecamatan masing-masing peserta 30 orang x 3 Kec. x 2 hari - Kegiatan peningkatan ekonomi melalui industri rumahan 60 orang Orang	151.393.000	30.178.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
02	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				255.000.000	113.800.200	

02	07	15	029	Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemdes / Kelompok Masyarakat	Kabupaten Pekalongan	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang tersalurkan	272 (19 Kecamatan) Desa	255.000.000	113.800.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				200.000.000	21.435.400	
02	07	16	010	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya Festival Jajanan Rakyat dalam rangka Pengembangan UEM dan pembinaan Bumdes	285 unit dan 75 bumdes Unit	200.000.000	21.435.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				3.863.209.000	2.599.249.100	
02	07	17	046	Evaluasi Perkembangan Desa	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya kegiatan evaluasi perkembangan desa, Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat kab. pekalongan, Terselenggaranya rakon pokjanel posyandu dan lomba posyandu Tk. Kab. Pekalongan	18 desa dan 1 keg Desa	375.000.000	47.400.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	17	048	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi, seremonial, monitoring, evaluasi dan pelaporan program TNI Manunggal Membangun Desa(TMMD Sengkuyung dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa)	5 Kali	2.387.839.000	2.241.105.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	17	050	Pembinaan BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	Kabupaten Pekaongan	Terlatihnya Kelompok Pengelola sarana Air Bersih dilokasi penerima Bantuan tahun 2020	163 Kelompok	140.000.000	11.718.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	17	058	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya lomba-lomba, Terselenggaranya penguatan kelembagaan PKK Terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi	12 lomba, 19 Kec. dan 38 desa/kelurahan, 13 jenis pelatihan Wilayah	960.370.000	299.025.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	22		Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna				135.000.000	2.920.000	
02	07	22	002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya identifikasi TTG dan pameran	19 dan 1 kali Kec	135.000.000	2.920.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

02	07	23		Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan					365.000.000	12.261.000	
02	07	23	001	Pembinaan Kelembagaan Desa	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaaan	19 (272) Desa		215.000.000		0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	23	004	Penyusunan Data Base Profil Desa	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Data Base Profil Desa	283 Desa		150.000.000	12.261.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	24		Program Pembangunan Kawasan Perdesaan					790.000.000	65.785.000	
02	07	24	009	Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Desa	Kab Pekalongan	Jumlah LKD dan BKAD terbentuk dan petani yang mengikuti pelatihan dan magang dan eks PNPM yang tertangani	1 Tahun		395.000.000	65.785.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
					Kab Pekalongan	Jumlah LKD dan BKAD terbentuk dan petani yang mengikuti pelatihan dan magang dan eks PNPM yang tertangani	1 Tahun		395.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	25		Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa					2.630.000.000	2.480.519.300	
02	07	25	007	Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	Kabupaten Pekalongan	Tersalurnya Bantuan Alokasi Dana Desa bagi 272 sesuai ketentuan dan penanganan permasalahan desa serta tersusunnya LPPD serta terselenggaranya monev pemdes	272 Desa		290.000.000	1.572.767.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
					Kabupaten Pekalongan	Tersalurnya Bantuan Alokasi Dana Desa bagi 272 sesuai ketentuan dan penanganan permasalahan desa serta tersusunnya LPPD serta terselenggaranya monev pemdes	272 Desa		290.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	25	009	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Desa	272 Desa		100.000.000	53.203.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

					Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Desa	272 Desa	100.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	25	013	Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya pengisian dan pembekalan Aparatur Pemerintah Desa sesuai ketentuan	210 Kades dan 272 sekdes Desa	1.375.000.000	814.580.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	25	016	Penyusunan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kabupaten Pekalongan	Tersusunnya Raperda dan Raperbub batas desa	2 Dokumen	175.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	25	017	Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring Sistem Pengelolaan Keuangan Desa	272 Desa	300.000.000	39.969.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	07	26		Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar				80.000.000	0	
02	07	26	002	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelestarian Adat dan Budaya Lokal	Kabupaten Pekalongan	Pembentukan Perbub, Pembentukan dan pembinaan Kelompok Pelestarian dan Perlindungan Adat Istiadat	1 Perbub, 270 Desa, 17 Kec, Satgas Desa	80.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
02	08	26		Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				9.678.186.000	7.732.872.300	
02	08	26	001	Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	kab pekalongan	Jumlah Calon akseptor dari keluarga miskin yang dilayani (orang)	6500 Orang	380.000.000	120.951.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	005	Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya pelatihan Kelompok Tribina, Jumlah remaja yang mendapat sosialisasi program genre, Tersedianya PPKS	150 Orang tribina, 1320 Orang genre, 4 Kelompok PPKS Orang	330.000.000	105.116.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

02	08	26	006	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kab. Pekalongan	Terlatihnya Kelompok UPPKS sebagai sarana Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	140 Orang	65.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	010	Pelayanan Konseling KB	kab Pekalongan	Jumlah pengelola KB yang dilatih (orang)	570 Orang	320.000.000	4.324.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	016	Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja	kabupaten pekalongan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang KKBPK, Tersedianya Kesejahteraan PPKBD untuk Pameran, Pelayanan KIE KKBPK Melalui mupen dan pameran, Kampung KB yang terbentuk dan terbina	2 Jenis, 570 Orang, 36 kali pemutaran film KIE dan 1 kali pameran KKBPK Jenis	1.117.055.000	737.531.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	017	Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana	kab pekalongan	meningkatnya motivasi kinerja pengelola program KKBPK, Tersediannya data keluarga yang mutakhir dan tersediannya dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK	5 lomba, 285 desa dan 12 buku Keg	292.626.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	020	Pengadaan Genre Kit (DAK)	Kab. Pekalongan	Tersedianya GenRe Kit	11 Unit	380.000.000	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	022	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (DAK Non Fisik)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya kegiatan operasional balai penyuluh KB kecamatan dan distribusi alokon	19 Unit	1.571.000.000	2.045.312.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	025	Pengadaan BKB Kit (DAK)	Kab. Pekalongan	Tersedianya BKB Kit	67 Set	325.000.000	189.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

02	08	26	032	Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK)	Kab. Pekalongan	Meningkatnya Integritas Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB	19 Kec	1.995.000.000	1.730.676.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	033	Operasional Pembinaan Program KKBPK oleh Kader (DAK)	kab pekalongan	meningkatnya jumlah cakupan peserta KB	19 Kec	1.710.000.000	1.710.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	034	Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK)	kab pekalongan	meningkatnya kualitas pelayanan KIE KKBPK	19 Kec	483.505.000	198.670.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	035	Penataan dan Pengembangan Balai Penyuluh KB Kecamatan	Kabupaten Pekalongan	Tertatanya balai penyuluhan KB kecamatan	10 Unit	500.000.000	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	041	Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)	Kab. Pekalongan	Tersedianya Kartu Kembang Anak (KKA)	18170 Buah	139.000.000	53.491.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	042	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS	Kab. Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	6 Unit	70.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	047	Pengadaan Media/Alat Pengolah Data (DAK)	Kab. Pekalongan				102.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	048	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)	Kab. Pekalongan				24.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

02	08	26	049	Pengadaan Sarana dan Prsarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Kab. Pekalongan				84.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
02	08	26	050	Pengadaan Srana KIE KIT dan Media (DAK)	Kab. Pekalongan				242.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
TOTAL								20.434.212.450	13.871.095.650	

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.303.950.000	1.086.363.800		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	250.000.000	203.600.000	Dinas Perhubungan
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	152.200.000	86.926.800	Dinas Perhubungan
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Diinas Perhubungan	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	78.000.000	76.797.500	Dinas Perhubungan
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	80.000.000	72.441.000	Dinas Perhubungan
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	284.900.000	124.468.500	Dinas Perhubungan
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang terbayarnya jasa outsourcing	15 Orang	458.850.000	522.130.000	Dinas Perhubungan
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.772.500.000	495.177.300	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	90.000.000	77.050.900	Dinas Perhubungan
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	232.500.000	108.241.400	Dinas Perhubungan
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	3.450.000.000	309.885.000	Dinas Perhubungan
00	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				240.000.000	72.580.000	
00	00	03	003 Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Set Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	52 Orang	240.000.000	72.580.000	Dinas Perhubungan

00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						150.000.000	4.573.500	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Perhubungan	Jumlah orang Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 Orang			150.000.000	4.573.500	Dinas Perhubungan
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
02	09			PERHUBUNGAN								
02	09	16		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ						6.550.000.000	378.750.000	
02	09	16	001	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Prosentase Alat Uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	11 Unit			300.000.000	158.140.000	Dinas Perhubungan
02	09	16	006	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Tersusunnya Perencanaan pembangunan prasarana fasilitas perhubungan	2 Dokumen			6.050.000.000	128.250.000	Dinas Perhubungan
02	09	16	009	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan terpeliharanya/rehabilitasi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	12 Bulan			200.000.000	92.360.000	Dinas Perhubungan
02	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						3.970.000.000	267.570.300	
02	09	17	022	Forum Lalulintas Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan terlaksananya forum lalulintas angkutan jalan	3 Keg			3.140.000.000	8.058.000	Dinas Perhubungan
02	09	17	023	Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan Terlaksananya Pengaturan, pengamanan lalulintas dan penataan parkir kegiatan tingkat kabupaten	12 Bulan			280.000.000	117.876.800	Dinas Perhubungan
02	09	17	026	Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru	Dinas Perhubungan	Jumlah Bulan kegiatan terlaksananya pengendalian lalulintas angkutan haji, lebaran, natal dan tahun baru	12 Bulan			200.000.000	119.631.500	Dinas Perhubungan
02	09	17	031	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kegiatan terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	2 Keg			350.000.000	22.004.000	Dinas Perhubungan
02	09	19		Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas						2.950.000.000	67.793.957	
02	09	19	011	Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket tersedianya peralatan pendukung sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	11 Paket			2.950.000.000	65.638.000	Dinas Perhubungan
02	09	19	019	Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan (DAK)	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket tersedianya peralatan pendukung sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas					2.155.957	Dinas Perhubungan
TOTAL										18.936.450.000	2.372.808.857	

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						

00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.050.000.000	1.413.770.591	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kajen	Jumlah bulan pemenuhan layanan listrik, telepon, air dan internet	12%	1.200.000.000	942.600.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kajen	Jumlah bulan pemenuhan honorarium pejabat pengelola keuangan	12 Bulan	70.000.000	67.708.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kajen	Jumlah bulan pemenuhan alat rumah tangga	12 Bulan	198.000.000	109.528.193	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kajen	Jumlah bulan pemenuhan kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri	12 Bulan	430.000.000	150.134.398	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kajen	Jumlah bulan pemenuhan jasa tenaga kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	152.000.000	143.800.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				757.500.000	519.636.972	
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipenuhi pemeliharaannya	3 Unit	107.500.000	63.422.170	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	02	026	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kajen	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Bulan	50.000.000	21.419.800	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64 Unit	400.000.000	333.326.075	Dinas Komunikasi Dan Informatika
00	00	02	118	Penyusunan DED Situation Room dan Data Center	Kajen	Jumlah DED Command Center Rumdin Bupati dan DED Data Center	2 Dokumen	200.000.000	101.468.927	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
02	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				3.184.550.000	1.256.908.487	
02	10	15	010	Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan dokumentasi, publikasi dan pengelolaan e-klipping IMM tentang pembangunan daerah	12 Bulan	2.855.000.000	1.169.399.687	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	15	050	Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id	Kajen	Jumlah bulan pemeliharaan piranti akses web, pemeliharaan hosting dan bandwidth web, maintenance software dan aplikasi, update konten website www.pekalongankab.go.id dan web Kominfo	12 Bulan	180.750.000	50.690.700	Dinas Komunikasi Dan Informatika

02	10	15	054	Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan	Kajen	Jumlah bulan penyediaan dokumen kegiatan Pemkab Pekalongan	12 Bulan	148.800.000	36.818.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	19		Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi				947.250.000	432.225.100	
02	10	19	002	Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio	Kajen	Jumlah bulan pelaksanaan Siaran LPPL RKS FM	12 Bulan	514.250.000	259.311.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	19	003	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi pengumpulan informasi publik dan pemeliharaan web PPID	12 Bulan	90.000.000	23.280.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	19	007	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan penyebaran informasi nasional melalui media informasi	12 Bulan	343.000.000	149.634.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	20		Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi				590.000.000	101.486.633	
02	10	20	001	Pembinaan dan Pengembangan Sumber	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan penyelenggaraan GCIO,	12 Bulan	200.000.000	1.920.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	20	003	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK	Kajen	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi layanan publik Pemkab Pekalongan	12 Bulan	150.000.000	48.266.633	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	20	006	Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah	Kajen	Jumlah aplikasi integrasi sistem informasi, data dan aplikasi strategis daerah	3 Buah	240.000.000	51.300.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	21		Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah				350.000.000	30.694.350	
02	10	21	001	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengamanan Informasi melalui Persandian	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah	12 Bulan	260.000.000	16.294.350	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	10	21	006	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengelolaan Persandian Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur persandian	12 Bulan	90.000.000	14.400.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	14			STATISTIK						
02	14	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				350.000.000	10.938.866	
02	14	15	006	Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi penyediaan data kestatistikan	12 Bulan	200.000.000	10.938.866	Dinas Komunikasi Dan Informatika
02	14	15	007	Analisis Data Statistik Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen hasil analisa data statistik	3 Dokumen	150.000.000	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
TOTAL								8.229.300.000	3.765.660.999	

Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanoan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keria

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12

					11 desa	Pelatihan Menjahit	11 Paket	550.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Desa Gandarum	Pelatihan Tata Rias	16 Orang	50.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	01	15	028	Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah Pencari kerja mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	50 Orang	325.000.000	206.149.600	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	01	15	029	Fasilitasi dan Penempatan TKI Keluar Negeri	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah Pencari kerja mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	180 Orang	75.000.000	6.622.400	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				230.000.000	0	
02	01	16	012	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi lowongan kerja dan adanya jobfair	6400 Orang	230.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	01	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				305.000.000	0	
02	01	17	009	Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK bertambah dan yang melanggar berkurang	30 Perusahaan	130.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	01	17	011	Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah Perusahaan yang dibina antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis, Jumlah Perusahaan yang bintek dengan adanya peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama dan struktur skala upah	70 Perusahaan	175.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	12			PENANAMAN MODAL						
02	12	15		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi				530.000.000	28.688.150	
02	12	15	010	Penyelenggaraan Pameran Investasi	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah pameran yang diikuti dan adanya sosialisasi tentang OSS	4 Kali	440.000.000	21.601.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	12	15	026	Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Adanya pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM	70 Perusahaan	90.000.000	7.086.650	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi				872.000.000	137.728.900	
02	12	16	026	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Adanya SKM	400 Orang	75.000.000	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	12	16	027	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Adanya sistem informasi dan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan pengembangan potensi dan peluang investasi, cetak buku profil potensi investasi	1 Paket	277.000.000	54.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

02	12	16	033	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah ijin yang terbit	4176 Buah	350.000.000	77.287.750	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
02	12	16	034	Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan berusaha dan Peningkatan Ekektifitas OPD Teknis	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah ijin yang terbit dan adanya perbup tentang SP dan SOP	4176 izin -	170.000.000	5.941.150	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
03				URUSAN PILIHAN						
03	08			TRANSMIGRASI						
03	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				115.000.000	7.486.300	
03	08	15	011	Penyuluhan, Penjajakan, pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan	DPM DAN PTSP DAN NAKER	Jumlah transmigran	5 KK	115.000.000	7.486.300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
TOTAL								6.506.800.000	2.180.906.398	

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab			
		Lokasi	Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.321.000.000	996.687.252	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Kajen	Jml bulan pemenuhan jasa komunikasi, sda, listrik, jasa tenaga kebersihan dan tenaga lainnya, jasa administrasi keuangan, jasa tenaga teknis/ administrasi, pemeliharaan dan perizinan kendaraan, barang cetakan dan penggandaan	12 bulan, 9 unit -	973.000.000	869.190.419	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Kajen	Jml peralatan rumah tangga, jml bln penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 bulan -	108.000.000	48.325.302	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec Kajen	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah; dan jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan; 12 bulan -	240.000.000	79.171.531	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.270.000.000	21.000.000	
00	00	02	003	Pembangunan gedung kantor	Kajen	tersedianya bangunan gedung kantor	1 Buah	5.000.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Kajen	jml paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket -	50.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec Kajen	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	150.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Kajen	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan rutin; jumlah bulan pemeliharaan mobil jabatan	12 bulan; 12 bulan -	70.000.000	21.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec Kajen	Jumlah bulan pemenuhan pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	30.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	13			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
02	13	15		Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda				2.845.000.000	205.324.000	
02	13	15	018	Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda	Kec Kajen	Jml peserta fasilitasi dalam rangka hari sumpah pemuda ; jml pemuda yg mengikuti keg kepemudaan; jml pemuda kader anti narkoba; kader wirausaha; pemuda pelopor tk kab; peserta KPN PPA; peserta JPI	200 orang; 150 orang; 100 orang; 40 orang; 15 orang; 64 orang; 1 pasang -	510.000.000	24.750.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	15	021	Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab Pekalongan	Jml organisasi berprestasi; jml peserta HSP Tk Prov di Kab, jml peserta pameran produk pemuda, jml peserta jambore pemuda, jml peserta PBB, jml perda kepemudaan, jml pelatihan pemuda disabilitas, jml sentra keg kepemudaan	3 organisasi; 600 org, 50 stand, 200 org, 200 org, 1 naskah, 50 org, 1 sentra -	1.000.000.000	21.186.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	15	028	Pembinaan Kewirausahaan Pemuda	Kec Kajen	Jumlah pemuda kader wirausaha baru, Jumlah pemuda penggerak pedesaan (penanganan kemiskinan), Jumlah pimpinan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan kepemimpinan tingkat I	40 org, 6 org, 100 org -	785.000.000	102.192.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	15	030	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris	Kec Kajen	Jumlah seleksi lomba TUB BB tk SMA dan SMP; jumlah peserta paskibraka kabupaten	40 sekolah, 800 siswa; 27org paskibraka dan 45 org paswal -	550.000.000	57.196.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	20		Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga				10.700.000.000	748.324.776	
02	13	20	013	Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga	Kec Kajen	jml cabor dan pelatih yang dilakukan pelatihan; jml peserta bintek keolahragaan; jumlah peserta pusat pembinaan dan latihan atlet berprestasi; jumlah penghargaan atlet dan pelatih berprestasi	2 cabor dan 20 orang; 25 pengurus; 75 atlet dan pelatih (13 cabor); 50 org atlet dan 25 org atlet -	625.000.000	74.336.100	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	20	020	Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional	Kec Kajen	Jumlah event olahraga yang dilakukan pengiriman; jumlah peserta POPDA; jumlah cabor O2SN Tk Kab	6 event; 5000 peserta dari SD/SMP/SMA/K; 7 cabor -	1.700.000.000	576.438.676	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	20	037	Penataan Sarana Prasarana Olahraga	Desa Tengengwetan	Jumlah pengurukan lapangan sepak bola Desa Tengengwetan	1 Unit	200.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

					Kec Kajen	Jumlah paket penataan sarpras olahraga (tribun timur stadion WMK Kdw)	1 Lokasi	6.350.000.000	67.550.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
					Desa Pamutuh	Pelebaran Lapangan Sepak Bola	6000 m2	250.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
					Desa Tengengewetan	Pengurukan lapangan sepak bola	1 Unit	200.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
					Desa Pamutuh	Pelebaran Lapangan Sepak Bola Desa Pamutuh	6000 m2	250.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
02	13	20	044	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kec Kajen	Jumlah cabang olahraga di kompetisi tingkat kabupaten, jumlah klub yg ikut Gala Siswa SMP, jml keg or massal, jml bantuan olahraga masyarakat	13 cabor, 32 klub, 4 keg, 14 keg -	1.125.000.000	30.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03				URUSAN PILIHAN						
03	02			PARIWISATA						
03	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				2.168.000.000	790.111.548	
03	02	15	016	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Kec Kajen	Jumlah event promosi yang diikuti oleh Kabupaten Pekalongan	6 Keg	1.010.000.000	193.718.148	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	15	020	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya hiburan kesenian di Kabupaten Pekalongan	10 KK	1.158.000.000	252.343.400	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	15	025	Pelayanan Kepariwisataaan (DAK)	Kabupaten Pekalongan				344.050.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				4.130.000.000	2.202.396.600	
03	02	16	021	Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata	Kec Kajen	Jumlah bulan pemeliharaan berkala obek	12 Bulan	3.800.000.000	608.689.600	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	16	022	Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata	Kec Kajen	Jumlah bulan penyediaan logistik objek wisata	12 Bulan	160.000.000	170.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
					Kec Kajen	Jumlah bulan penyediaan logistik objek	12 Bulan	170.000.000	0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	16	059	Pengembangan daya tarik wisata linggoasri	Kec Kajen				1.423.707.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
03	02	17		Program Pengembangan Kemitraan				100.000.000	348.560.200	
03	02	17	022	Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis, dan Saka Pariwisata	Kec Kajen	Jumlah kegiatan fasilitasi desa wisata, pokdarwisa dan saka pariwisata	3 Keg	100.000.000	348.560.200	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
TOTAL								26.564.000.000	5.312.404.376	

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	00 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			829.300.000	544.649.862	

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kajen	Jumlah bulan penyediaan jaskom,SDA, listrik, surat kelengk. kend dinas, honor jasmin, cetak ganda, outsourcing	12 bln, 10bh, 6orng,12bln,10 org Bulan	610.800.000	460.992.513	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kajen	Jumlah dan jenis peralatan dan pembersih rumah tangga 2. Jumlah lampu penerangan yang diadakan dalam satu tahun. 3. Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan ATK	20 jenis, 5 jenis, 12 bulan -	48.000.000	10.802.700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kajen	Jumlah RAKOR yang diadakan dalam setahun. 2. jumlah orang yang mendapatkan extrafooding bagi pengelola kearsipan	38 kali, 23 orang -	170.500.000	72.854.649	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				258.500.000	98.854.995	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kajen	Jumlah gedung yang dipelihara dalam setahun	2 Unit	50.000.000	4.050.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	1. Jumlah mobil jabatan yang dipelihara, 2.. Jumlah kendaraan dinas operasional pusling yang dipelihara dalam setahun	1. unit, 5. unit -	113.500.000	26.941.995	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 Jenis	20.000.000	6.063.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	75.000.000	61.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000	2.047.444	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kajen	Jumlah SDM yang mengikuti diklat	10 Orang	30.000.000	2.047.444	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	17			PERPUSTAKAAN						
02	17	15		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				10.738.960.000	438.686.700	
02	17	15	008	Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Kajen	1. Jumlah peserta workshop penulisan artikel ilmiah, workshop mendongeng, workshop pengelolaan desa dan sekolah dan bedah buku. 2. Jumlah pameran buku dan arsip yang dilaksanakan	400, 75, 1, 75, 2.000 -	531.000.000	10.391.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	17	15	018	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah	Kajen	Jumlah orang yang mendapat honor sebagai petugas layanan perpustakaan	10 Orang	4.998.960.000	227.295.700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	17	15	060	Kegiatan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK)	Kajen	Jumlah gedung perpustakaan umum daerah yang terbangun	1 Paket	3.709.000.000	201.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	17	15	061	Kegiatan Pengadaan Perabot layanan	Kajen	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan	23 -	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Kajen	Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan kantor	23 Jenis	700.000.000	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

02	17	15	062	Kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK)	Kajen	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	12 Jenis	300.000.000	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	17	15	063	Pengembangan Bahan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK)	0	0	0 -	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					Kajen	Jumlah buku perpustakaan umum daerah	1 Paket	500.000.000	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18			KEARSIPAN					663.393.250	
02	18	16		Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah				563.000.000	500.281.700	
02	18	16	001	Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip	KAJEN	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	35 Buah	230.000.000	166.706.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18	16	002	Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah	Kajen	Jumlah dokumen/arsip daerah yang didata dan ditata	10000 Dokumen	253.000.000	298.967.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18	16	003	Pembinaan Kearsipan bagi OPD/BUMD/Desa/ Kelurahan	Kajen	Jumlah desa yang mendapat sosialisasi peembenahan arsip	36 desa Desa	80.000.000	34.608.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18	17		Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan				195.000.000	151.136.950	
02	18	17	001	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip	Kajen	Jumlah sarana pengolahan arsip yang diadakan	7 Jenis	195.000.000	151.136.950	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				210.000.000	6.924.000	
02	18	18	007	Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD	Kajen	Jumlah pengelola arsip OPD yang dibina	57 SKPD	210.000.000	6.924.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
02	18	19		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				175.000.000	5.050.600	
02	18	19	007	Pengklasifikasian data arsip	Kajen	Jumlah OPD yang mendapatkan pengawasan kearsipan , Jumlah Perbup tentang Kearsipan yang digandakan, jumlah sistem jaringan informasi kearsipan yang dipelihara,	35, 920, 1 Buku	175.000.000	5.050.600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TOTAL								12.999.760.000	1.747.632.251	

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab			
		Lokasi	Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
00	NON URUSAN									
00	NON URUSAN									
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			698.300.000	462.299.200			
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pekalongan	Pembayaran jasa listrik, telepon, air, faximile serta koneksi internet	12 Bulan	121.000.000	103.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penyediaan tenaga kebersihan kantor Dinlutkan dan UPTD serta tersedianya honorarium Pejabat Pengelola Anggaran, Bendahara Keuangan dan Asset	12 Bulan	225.300.000	240.170.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih kantor, makanan dan minuman harian pegawai dan rapat serta pengurusan perizinan kendaraan operasional	12 Bulan	121.000.000	55.900.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Pekalongan	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	12 Bulan	231.000.000	63.229.200	Dinas Kelautan Dan Perikanan
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				249.000.000	124.810.242	
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	133.500.000	100.216.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	44.000.000	8.477.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 Paket	71.500.000	16.117.242	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03				URUSAN PILIHAN						
03	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN						
03	01	20		Program Pengembangan Perikanan Budidaya				3.610.000.000	1.149.304.000	
03	01	20	003	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilan dan pengetahuannya	40 Orang	265.000.000	150.514.900	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	020	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK)	Kecamatan Tirto, Siwalan dan Wonokerto	Panjang jalan produksi yang dibangun	3450 m	2.100.000.000	228.548.600	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	021	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)	BBI AT Karanganyar	Jumlah induk ikan unggul yang disediakan	1 Paket	75.000.000	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	029	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)	Kecamatan Petungkriyono (Desa Petungkriyono), Kesesi (Desa Mulyorejo), dan Kajen (Kelurahan Kajen)	Jumlah dempond budidaya ikan air tawar	3 Lokasi	300.000.000	276.156.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	031	Peningkatan Produksi BBIAT (DAK)	BBI AT Karanganyar	Jumlah bulan pemenuhan operasional BBI AT	12 Bulan	100.000.000	113.460.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	032	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana kelautan dan perikanan yang disusun	3 Dokumen	170.000.000	223.699.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	034	Pengembangan & Peningkatan BBI AT	BBI AT Karanganyar	Jumlah peningkatan sarana prasarana BBIAT	2 Paket	400.000.000	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	20	048	Pengembangan Budidaya Ikan di Ponpes/Sekolah/Madrasah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah lokasi pondok pesantren/sekolah/madrasah untuk pengembangan budidaya ikan	2 Lokasi	200.000.000	156.925.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap				3.375.000.000	928.438.500	

03	01	21	028	Pengembangan PPP Wonokerto	TPI Wonokerto	Jumlah paket pengembangan dan peningkatan TPI Wonokerto	2 Paket	1.250.000.000	348.972.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	21	030	Pembinaan Masyarakat Pesisir	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota KUB, Wanita Nelayan dan Pemuda Pesisir yang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan	150 Orang	1.675.000.000	205.025.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	21	040	Penyediaan Sarana Operasional Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan Wonokerto	Pembangunan Tambat Labuh Kapal	2 Paket	450.000.000	374.441.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	23		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan				510.000.000	72.052.200	
03	01	23	002	Promosi Produk Perikanan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah event promosi produk perikanan	5 Kali	175.000.000	46.506.200	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	23	005	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anggota poklhasr yang bertambah pengetahuan dan ketrampilan	135 Orang	285.000.000	25.546.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	23	006	Penyediaan Sarana Statistik Perikanan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah sarana statistik perikanan	1 Paket	50.000.000	0	Dinas Kelautan Dan Perikanan
03	01	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar				250.000.000	1.192.500	
03	01	24	007	Pengembangan Kawasan Ekomina Wisata	Kecamatan Wonokerto	Pembangunan Gapura dan Kedai Pesisir	2 Paket	250.000.000	1.192.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
TOTAL								8.692.300.000	2.738.096.642	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab	
		Lokasi	Keluaran Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	10	12	
00			NON URUSAN					
00	00		NON URUSAN					
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.740.000.000	2.957.290.042	
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindagkop UKM	-	525.000.000	486.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinperindagkop UKM	-	75.000.000	158.880.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinperindagkop UKM	-	340.000.000	272.935.050	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinperindagkop UKM	-	155.000.000	98.248.805	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Dinperindagkop UKM	-	365.000.000	132.888.526	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Dinperindagkop UKM	-	-	2.280.000.000	1.808.337.661	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.557.110.000	363.194.909	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	UPT Legal Metrologi	Jumlah kebutuhan kendaraan operasional UPT Metrologi yang dimiliki	3 Unit	520.000.000	23.830.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinperindagkop UKM	-	-	97.110.000	96.930.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinperindagkop UKM	-	-	260.000.000	100.504.109	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinperindagkop UKM	-	-	680.000.000	141.930.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinperindagkop UKM	-	-	150.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	11			KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
02	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				2.845.000.000	610.137.100	
02	11	16	024	Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan	Kab Pekalongan	-	-	350.000.000	88.601.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					Kecamatan Doro	Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Parcel	2 Paket	50.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	16	025	Pengembangan Batik Kabupaten Pekalongan	Kab Pekalongan	-	-	1.125.000.000	117.429.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	16	026	Aplikasi Pengolahan Produk Lokal	Kab Pekalongan	-	-	700.000.000	194.106.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					7 desa	Pelatihan Pengolahan Kolang Kaling	7 Desa	70.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					Desa Pamutih, Tembelangnung, Wonosido, Kutorembet	Pengembangan Industri Sapu Gelagah	8 Kelompok	400.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					Desa Pakumbulan	Diversifikasi Produk ATBM Desa Pakumbulan	1 Keg	150.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

02	11	16	029	Kegiatan Peningkatan kapasitas produk potensi lokal daerah bidang batik & SKKNI (DAK Non Fisik)	Kab Pekalongan					210.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	
02	11	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						750.000.000	52.662.606	
02	11	17	028	Pembangunan Pusat UMKM	Kab Pekalongan	-	--			750.000.000	52.662.606	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						850.000.000	244.142.060	
02	11	18	005	Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan	Kab Pekalongan	-	--			400.000.000	34.180.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
02	11	18	026	Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kab Pekalongan	-	--			450.000.000	2.604.060	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	18	029	peningkatan kualitas manajerial koperasi (DAK Non Fisik)	Kab Pekalongan						207.358.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	19		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						775.000.000	12.658.500	
02	11	19	001	Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Usaha UMKM	Kab Pekalongan	-	--			675.000.000	12.658.500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
02	11	20		Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi						125.000.000	30.196.000	
02	11	20	001	Pelatihan Pembiayaan dan Kelayakan Usaha Koperasi	Kab Pekalongan	-	--			125.000.000	30.196.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03				URUSAN PILIHAN								
03	04			PERDAGANGAN								
03	04	15		Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan						805.000.000	54.384.597	
03	04	15	009	Fasilitasi Kemetrolagian Daerah (DBHCHT)	Kab Pekalongan	-	--			250.000.000	14.517.997	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	15	010	Pengadaan Peralatan Kemetrolagian (DBHCHT)	Kab Pekalongan	-	--			200.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	15	011	Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT)	Kab Pekalongan	Barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standart keamanan pangan	9 pasar tradisional, 40 toko modern &30 sekolah -			180.000.000	39.866.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	15	012	Peningkatan Kapasitas Konsumen	Kab Pekalongan	Terlaksananya edukasi konsumen cerdas melalui media cetak/baliho	19 Buah			175.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor						950.000.000	64.424.072	

03	04	17	016	Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis)	Kab Pekalongan	-	-	950.000.000	64.424.072	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				1.440.000.000	362.707.075	
03	04	18	017	Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis	Kab Pekalongan	Perkembangan harga barang pokok penting dan strategis yang wajar dan terkendali	12 Bulan	85.000.000	22.579.200	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	18	020	Optimalisasi Pendapatan Pasar	Kab Pekalongan	-	-	555.000.000	225.804.050	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	18	023	Perbaikan dan Pembuatan Lantai Jemur Gedung SRG	Kab Pekalongan	Tersedianya sarana dan prasarana gedung SRG yang memadai sehingga menghasilkan barang keluaran yang bermutu	-	200.000.000	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	18	025	Fasilitasi Pekan Raya Kajen	Kab Pekalongan	-	-	600.000.000	7.542.810	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	18	026	Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG (DAK)	Kab Pekalongan				56.781.015	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	20		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional				26.200.000.000	9.964.759.200	
03	04	20	019	Renovasi Pasar Tradisional	Kab Pekalongan	-	-	2.000.000.000	3.446.372.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	20	025	Renovasi Pasar Kedungwuni	Kab Pekalongan	-	-	9.800.000.000	6.451.730.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
03	04	20	034	Pembangunan Pasar Sragi	Pasar Sragi	Terlaksananya penertiban Pujasera Sragi	1 Paket	7.200.000.000	66.656.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	04	20	036	Renovasi Pasar Wiradesa	Kab Pekalongan	-	-	7.200.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
03	07			PERINDUSTRIAN						
03	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				538.000.000	57.391.200	
03	07	16	018	Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan dan	Kab Pekalongan	-	-	338.000.000	37.410.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
					Kab Pekalongan	Pelatihan Ketrampilan Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran Olahan pangan	2 Paket	100.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
03	07	16	025	Sosialisasi Sertifikasi HAKI (merk) dan	Kab Pekalongan	-	-	100.000.000	19.980.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan,
03	07	17		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi				750.000.000	315.120.050	
03	07	17	005	Pengembangan dan Inovasi Produk Aneka Sandang	Kab Pekalongan	-	-	500.000.000	287.660.750	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					Kelurahan Sapugarut	Pelatihan Pemanfaatan Kain Perca sebagai produk unggulan	1 Keg	50.000.000	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

03	07	17	006	Pengembangan Produksi pada Usaha Alat Transportasi	Kab Pekalongan	-	--	200.000.000	27.459.300	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
TOTAL								41.475.110.000	15.089.067.411	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.225.880.000	874.977.100		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Litbang	Pembayaran Rekening Jasa Telpon, Listrik, Faximile, Internet, Air dan Surat Kabar, jasa Keuangan, Perizinan kendaraan dinas Operasional, Adminitstrasi keuangan, jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	576.795.000	566.795.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Litbang	Pengadaan alat tulis kantor, Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	84.155.000	84.122.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bappeda Litbang	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan kel Luar Negeri, perjalanan dinas dalam daerah serta konsumsi rapat dan minum pegawai	12 Bulan	564.930.000	224.060.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				417.000.000	439.385.000	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bappeda Litbang	Pengecatan dan perbaikan gedung dan bangunan Kantor	12 Bulan	80.000.000	302.385.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Litbang	Pemeliharaan mobil dinas jabatan/operasional	12 Bulan	87.000.000	87.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	02	065 Pembangunan Tempat Parkir	Bappeda Litbang	Tersedianya tempat parkir pegawai	1 Paket	200.000.000	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	02	102 Pengadaan Peralatan Kantor, RT dan Mebelair	Kajen (bappeda Litbang)	Terpenuhinya Sarana Prasana Kantor	4 Unit	50.000.000	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000	0	
00	00	05	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bappeda Litbang	Pelatihan, Sosialisasi/ BinteK untuk pegawai ASN	12 Bulan	75.000.000	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan

04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	01			PERENCANAAN						
04	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				3.470.000.000	2.889.004.164	
04	01	21	013	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	KABUPATEN PEKALONGAN	Terlaksananya Monev dan Evaluasi Serta Penyusunan Buku I dan Buku II LKJP	12 Bulan	550.000.000	451.046.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	21	025	Penyusunan RKPD	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	4 Dokumen	1.765.000.000	1.343.861.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	21	037	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan	Bappeda Litbang	Penyusunan dokumen SAKIP LKJP dan Renja Bappeda Libang Kabupaten Pekalongan	2 Dokumen	70.000.000	27.226.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	21	039	Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Dokumen Yang tersusun (Dok Teknokratik RPJMD)	1 Dokumen	350.000.000	338.044.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	21	042	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya perencanaan pembangunan melalui program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah	6 Keg	735.000.000	728.826.064	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				175.000.000	138.726.200	
04	01	22	029	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Kabupaten Pekalongan	Terfasilitasinya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	2 Kali	175.000.000	138.726.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan
04	01	23		Program Perencanaan Sosial Budaya				805.000.000	496.679.694	
04	01	23	003	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Kab. Pekalongan	RAD Pangan Gizi, Pelaporan aksi PPK, Rakor Mitra Bidang	59 Kali	300.000.000	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	23	014	Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	-	1.Tersusunnya LP2KD 2.Tersusunnya Laporan Kinerja TKPKD 3. Unsur TKPK yang	1 Tahun	200.000.000	145.540.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan
04	01	23	015	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi)	12 Bulan	100.000.000	52.767.894	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	23	023	Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals	kabupaten Pekalongan	RAD SDGs, Laporan evaluasi SDGs, Laporan PUS, Laporan EDI, Lokakarya	2, 2,20,20,3 kali Dokumen	205.000.000	298.371.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam				883.000.000	446.232.839	
04	01	24	030	Penujang Koordinasi Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Koordinasi Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur	12 Bulan	385.000.000	85.875.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	01	24	031	Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah fasilitasi perencanaan pengembangan wilayah, perumahan permukiman dan penataan ruang di Kabupaten Pekalongan	12 Bulan	260.000.000	251.180.839	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan

04	01	24	032	Koordinasi Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program (IPDMIP)	Kajen	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 Dokumen	238.000.000	109.177.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	04			PENELITIAN PENGEMBANGAN						
04	04	15		Program Penelitian dan Pengembangan				815.000.000	575.099.500	
04	04	15	004	Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan	12 Bulan	355.000.000	205.871.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	04	15	008	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Kabupaten Pekalongan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Kelitbangan	1 Dokumen	100.000.000	106.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
04	04	15	014	Fasilitasi Riset Daerah	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Lomba Riset Daerah; Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pekalongan; Penerbitan Jurnal Ilmiah; serta Pelayanan Perizinan Penelitian	12 Dokumen	360.000.000	262.478.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL								7.865.880.000	5.860.104.497	

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			29.671.374.500	24.329.929.928		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kajen	Tersedianya Air, Listrik, Telepon, surat kabar dan tersedianya fungsi Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	25.000.000.000	21.612.550.128	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	005 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kab. Pekalongan	Tersedianya Polis asuransi untuk gedung, rumah dinas, pasar dan kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	2.950.000.000	1.385.086.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang memadai	12 Bulan	292.983.500	292.983.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	200.000.000	200.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Lampu/ Instalasi dan Penerangan Kantor	12 Bulan	68.000.000	93.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 Bulan	121.000.000	86.010.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	BPKD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	530.000.000	166.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	BPKD	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , Tenaga PTT, dan Jasa Admistrasi Keuangan	12 Bulan	509.391.000	494.300.300	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.948.982.100	2.621.785.500	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kajen	Jumlah Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Terpelihara dan Rehab Gedung Kantor	1 Unit	1.100.000.000	294.942.400	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan dan dinas/operasional yang terpelihara dalam satu tahun, Pajak Kendaraan Bermotor	9 Unit , STNK (6 Roda 4, 66 Roda 2) Unit	186.982.100	266.982.100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	02	035	Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas	Kab. Pekalongan	Jumlah Eks Kantor dan Rumah Dinas yang Terpelihara	GPU Kedungwuni, Wisma GPU, GPU Kajen, Eks. Setda Jl. Nusantara Pkl Paket	600.000.000	294.760.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah peralatan kerja yang terpenuhi dalam rangka penyediaan sarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan	Rak Buku, Filling Kabinet, AC, Server, PC, NoteBook, Printer, Meja Kerja, Gordyn, Alat Ukur Paket	1.062.000.000	1.765.101.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				130.000.000	42.000.000	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BPKD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Bulan	130.000.000	42.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	02			KEUANGAN						
04	02	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				9.388.000.000	8.082.246.700	
04	02	15	001	Penyusunan Raperda Tentang APBD	BPKD	Tersusunnya Perda tentang APBD tahun 2021	1 Jenis	850.000.000	786.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	003	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD	BPKD	Tersusunnya Perda tentang perubahan APBD TA 2020 dan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD 2020	2 Jenis	850.000.000	787.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

04	02	15	005	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019	2 Dokumen	750.000.000	728.884.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	007	Administrasi Pengendalian Anggaran	BPKD	Terlaksananya administrasi pengendalian otoritas anggaran tahun 2020	5 Buku Himpunan DPA SKPD, 5 Buku Himpunan DPPA-SKPD -	455.000.000	388.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	008	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	BPKD	Jumlah Objek yang tertagih	382443 Objek Pajak -	1.050.000.000	1.050.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	009	Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer	BPKD	Tersedianya laporan harian posisi kas daerah dan pelaporan pencapaian penggunaan data transfer lebih tepat waktu	12 set BKU dan 3 set laporan DAK -	180.000.000	143.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	011	Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB	BPKD	Tersedianya SPPT,DHKP, tenaga admistrasi PBB dan Tenaga ukur	1 Tahun	970.000.000	883.043.800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	013	Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan	BPKD	Tersedianya sarana pendukung administrasi pembendaharaan, Kertas Gaji dan Update Gaji	500 buku SP2D , 8 buku kendali -	450.000.000	348.558.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	015	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKD	Terlatihnya SDM dalam penatausahaan keuangan daerah	111 Orang	103.000.000	18.985.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	016	Updating Data Base dan Cetak Masal PBB	BPKD	Database terupdate dan SPPT PBB	Database 493500 record, SPPT tercetak 493500 lbr -	185.000.000	177.878.600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	017	Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah	BPKD	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	43500 objek pajak -	450.000.000	401.661.600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	018	Optimalisasi Pendapatan Daerah	BPKD	Jumlah Pajak Daerah yang tertagih	Rp.77.790.883.149,- -	950.000.000	487.333.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	020	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Jenis	260.000.000	260.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	024	Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah	BPKD	Terlaksananya penyampaian SPPT PBB dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemungut di 285 desa / Kelurahan	455000 SPPT -	410.000.000	362.110.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	025	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPKD	Laporan keuangan pemda dan SKPD	1 Dokumen	420.000.000	382.625.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	026	Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKD	Penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaiannya	47 Opd -	230.000.000	208.884.200	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	027	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)	BPKD	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan	50 laporan keuangan , 50 laporan keuangan semeteran buku -	130.000.000	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	028	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	BPKD	Tersedianya laporan realisasi APBD semester 1 tahun 2020 dan prognosis 6 bulan berikutnya	47 OPD -	230.000.000	227.783.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	029	Updating Sistem Informasi Manajemen APBD	BPKD	Jumlah sistem informasi manajemen APBD ter update	1 Jenis	130.000.000	130.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

04	02	15	030	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	BPKD	TP-TGR yang tertangani	1 Tahun	60.000.000	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	032	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah	BPKD	Tersusunnya Perbub tentang perubahan dengan pajak daerah	1 Jenis	20.000.000	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	033	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House to House dan SMS Gateway	BPKD	Terpeliharanya Sistem, Aplikasi Pajak Daerah	4 Jenis	120.000.000	120.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	15	034	Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD	BPKD	Tersedianya laporan keuangan OPD yang tersusun	47 Opd -	135.000.000	130.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16		Program Pengelolaan Aset Daerah				2.597.180.000	2.093.436.250	
04	02	16	002	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	Tersusunnya laporan barang milik daerah dan Daftar Kebutuhan Milik Daerah(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah	6 Dokumen	210.000.000	216.319.350	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	004	Penunjang Penghapusan Aset Daerah	BPKD	Terinventaris barang milik daerah yang akan di hapus dari daftar barang inventaris milik daerah dan Lelang Barang Milik Daerah	2 Dokumen	155.000.000	127.889.800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	005	Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah	BPKD	Tersertifikasinya tanah milik pemerintah kabupaten pekalongan yang bersertifikat	100 Dokumen	320.000.000	214.375.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	006	Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BPKD	Terlaksananya barang milik daerah yang di manfaatkan dengan baik	26 Kali	125.000.000	112.184.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	008	Penunjang Pengamanan Aset	BPKD	Tersedianya Papan Naman Identitas Aset Daerah dan Terselenggaranya monitoring identitas kepemilikan aset tanah pemerintah kabupaten pekalongan yang tersedia	100 Kali	125.000.000	144.125.500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	009	Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BPKD	Tersusunnya standarisasi biaya kegiatan dan honorarium ,biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan pemerintah kabupaten pekalongan	1 Dokumen	200.000.000	155.953.600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	010	Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah	BPKD	Terlatihnya pengurus dan penyimpan barang	108 Orang	220.000.000	94.909.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	011	Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA)	BPKD	Terpenuhi dalam update aplikasi SIMBADA dan SIMPERS	2 Jenis	70.000.000	70.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	012	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKD	Tersedianya dokumen hasil penilaian barang milik daerah yang tersedia	2 Dokumen	200.000.000	194.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
04	02	16	015	Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan	BPKD	Tertib Penatausahaan barang milik daerah	1 Dokumen	40.000.000	35.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan
04	02	16	017	Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD	Tersedianya Laporan Rutin Barang Milik Daerah	12 Bulan	932.180.000	728.180.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
TOTAL								44.735.536.600	37.169.398.378	

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			

1				2	3	4	5	6	10	12
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				507.523.000	356.368.800	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Jasa Administrasi keuangan, honor pegawai tidak tetap, jasa perpanjangan STNK dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	286.723.000	246.796.500	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan rumah tagga dan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor serta penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	77.800.000	47.857.300	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	143.000.000	61.715.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.483.000.000	248.323.500	
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kajen	Jumlah gedung yang terpelihara dalam 1 tahun	1 Unit	60.000.000	19.062.500	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan kendaraan operasional dan kendaraan dinas jabatan roda empat	12 Bulan	85.000.000	51.852.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	02	044	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka memperluas / merehab gedung kantor serta membuat tempat parkir	2 -	900.000.000	0	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta mebeleur	12 Bulan	48.000.000	15.997.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kajen	Jumlah dan Jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa sepeda motor	5 Unit	390.000.000	161.412.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				110.000.000	30.047.500	
00	00	03	009	Penanganan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS	Kajen	Jumlah SK yang terbit mengenai pelanggaran disiplin serta ijin perceraian PNS serta terkirimnya LHKPN ke KPK	45, 700 -	110.000.000	30.047.500	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				110.000.000	15.985.000	
00	00	05	068	Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS	BKD DIKLAT	Jumlah pegawai BKD DIKLAT yang mengikuti diklat teknis, fungsional, bimtek seminar	40 Orang	110.000.000	15.985.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan

04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
04	03			KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
04	03	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				7.680.000.000	1.337.198.800		
04	03	17	019	Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun	BKD DIKLAT	Jumlah SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun yang terbit selama satu tahun serta terlaksananya sumpah janji PNS	1500, 379 -	135.000.000	40.216.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	021	Promosi dan Mutasi Pegawai	BKD DIKLAT	Jumlah pelaksanaan pelantikan dan Pengkuhan JPT Pratama, administrator dan JF serta terselesaikannya proses pengangkatan, penyesuaian, kenaikan, pembebasan dan pemberhentian dalam dan atau jabatan aparatur sipil negara	3000 Orang	760.000.000	244.352.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	022	Penyusunan Formasi Pegawai	BKD DIKLAT	Jumlah formasi ASN 2020 serta terseleksinya CPNS dan PPPK	1800,200 -	995.000.000	922.892.800	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	028	Pembinaan Kepegawaian SKPD	Kajen	Jumlah unit kerja yang dibina dan diberi penyuluhan kepegawaian	120 -	110.000.000	10.630.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	036	Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	-	Jumlah PNS yang terfasilitasi untuk mengikuti ujian dinas dan UKPPI serta pemberian ijin belajar, keterangan belajar, penggunaan gelar, tugas belajar dan surat keterangan perolehan ijazah	350 Orang	130.000.000	32.340.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	046	Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)	BKD DIKLAT	Jumlah PNS yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi pejabat ASN serta penilaian Indeks Profesionalitas PNS dan Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja PNS	8400 Orang	710.000.000	36.665.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	050	Administrasi Mutasi Kepegawaian	BKD DIKLAT	Jumlah pelayanan administrasi mutasi kepegawaian PNS non Struktural dan penyesuaian nomenklatur jabfung umum kedalam nomenklatur jabatan pelaksana	2200 Orang	75.000.000	19.343.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	17	051	Diklat Teknis Pemerintahan	BKD DIKLAT	Jumlah pejabat struktural eselon II, III dan IV yang mengikuti diklatpim serta jumlah CPNSD yang akan mengikuti latsar	232 Orang	4.765.000.000	30.760.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	18		Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian				200.000.000	48.259.055		
04	03	18	007	Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian	BKD DIKLAT	Jumlah bulan dalam rangka merekonsiliasi data dan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) secara online	12 Bulan	150.000.000	43.705.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	
04	03	18	008	Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG	Kajen	Jumlah usulan Karis, Karsu dan Karpeg PNS serta terbitnya JKK dan JKM	510 Buah	50.000.000	4.554.055	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan	

TOTAL	10.090.523.000	2.036.182.655	
--------------	-----------------------	----------------------	--

Inspektorat

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			638.000.000	302.293.575		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Pembayaran Rekening Telepon/ Air/ Listrik/ Surat Kabar	5 rekening Bulan	70.000.000	67.600.000	Inspektorat
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Pembayaran Biaya Pajak STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 dan Roda 2	4 / 23 Unit	15.000.000	4.865.375	Inspektorat
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Pembayaran Jasa Pengguna Anggaran/ PPK/ Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara/ Pengurus Barang/ Penyimpan Barang, Jasa Kebersihan	10 / 3 Orang	120.000.000	91.929.000	Inspektorat
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Selama 1 Tahun dan Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun	2 Paket	125.000.000	47.818.700	Inspektorat
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Alat-alat Kebersihan/ Gas Elpiji yang Tersedia Selama 1 Tahun dan Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan yang tersedia selama 1 tahun	2 paket/ 12 bulan Paket	30.000.000	11.137.000	Inspektorat
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Bulan Terselenggaranya Rakor Pengawasan Nasional/ Kemendagri/ Provinsi dan Pemenuhan minuman harian, minum dan snack rapat serta snack dan makan tamu	12 bulan/440 OB/220 OB Bulan	200.000.000	55.428.500	Inspektorat
00	00	01	045 Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Penetapan Angka Kredit PNS Jabatan Fungsioanl Auditor dan P2UPD yang Diterbitkan Selama 1 Tahun	30 Pak	78.000.000	23.515.000	Inspektorat
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				537.800.000	190.939.000	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Tersedianya Bahan Baku Bangunan dan Upah Tukang/ Pekerja Selama 1 Tahun	1 Paket	283.200.000	20.718.000	Inspektorat
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jenis Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Mobil Jabatan Selama 1 Tahun	6 Paket	75.000.000	23.983.000	Inspektorat

00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah dan Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Laptop/ PC Komputer/ Printer/ Keyboard dan Mouse	15/ 2/ 3/ 2 Unit	179.600.000	146.238.000	Inspektorat
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	05			PENGAWASAN						
04	05	15		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				464.500.000	52.687.000	
04	05	15	001	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Desk dan Workshop Kapabilitas APIP Selama 1 Tahun	1 Keg	35.000.000	8.727.000	Inspektorat
04	05	15	002	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya Bimtek Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Keg	429.500.000	43.960.000	Inspektorat
04	05	16		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				39.000.000	11.016.000	
04	05	16	001	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Kebijakan Kepala Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	39.000.000	11.016.000	Inspektorat
04	05	17		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				3.222.500.000	1.545.441.100	
04	05	17	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Terbitnya LHP Kasus dan LHP Khusus Selama 1 Tahun	66 Dokumen	1.310.000.000	562.627.000	Inspektorat
04	05	17	004	Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan OPD)	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LKPD	1 Set	97.000.000	51.830.000	Inspektorat
04	05	17	006	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Terbitnya LHR atas LKJIP Pemerintah Daerah	1 Set	23.000.000	19.355.000	Inspektorat
04	05	17	007	Reviu RPKD	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) RKA OPD dan PPKD	3 Set	70.000.000	29.975.000	Inspektorat
04	05	17	008	Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Selama 1 Tahun	45 LHE Dokumen	200.000.000	108.885.000	Inspektorat
04	05	17	010	Kordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi.	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Diterbitkan dan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	12 Dokumen	931.500.000	603.092.000	Inspektorat
04	05	17	013	Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Terbitnya LHE SPP pada OPD	2 set LHE dan 3 kegiatan Set	155.000.000	13.073.600	Inspektorat

04	05	17	017	Tindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Inventarisasi Data Perkembangan Tindaklanjuti Hasil Pengawasan, Jumlah Rakor Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan BPK, Provinsi dan Pusat, Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan dalam Rakor Gelar Pengawasan Daerah	348 obrik/ 6 rakor TLHP/ 1 rakor Larwasda Keg	396.000.000	141.493.000	Inspektorat
04	05	17	020	Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Inspektorat Kabupaten Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Review (LHR) Selama 1 Tahun	7 Set	40.000.000	15.110.500	Inspektorat
TOTAL								4.901.800.000	2.102.376.675	

Bagian Umum

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.446.950.000	6.012.928.210		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan dan Rumah Dinas Jabatan	Pembayaran Jasa Listrik, Air dan Telekomunikasi terpenuhi	12 Bulan	1.050.000.000	1.050.000.000	Bagian Umum
00	00	01	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	12 Bulan	380.000.000	382.757.700	Bagian Umum
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	41 Unit	78.750.000	78.750.000	Bagian Umum
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan honor PA dan KPA Bendahara dan Pengurus Barang dalam rangka terlaksananya tertib administrasi	12 Bulan	327.000.000	303.150.000	Bagian Umum
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	168.500.000	131.944.770	Bagian Umum
00	00	01	011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan.	12 Bulan	120.000.000	117.741.000	Bagian Umum
00	00	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman.	12 Bulan	1.051.000.000	971.345.100	Bagian Umum
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12 Bulan	1.017.900.000	835.250.000	Bagian Umum

00	00	01	038	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pembayaran honor tenaga teknis dan administrasi (Outsourcing)	12 Bulan	1.730.000.000	1.486.928.840	Bagian Umum
00	00	01	039	Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan kantor. kelistrikan dan rumah tangga	12 Bulan	523.800.000	655.060.800	Bagian Umum
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				4.815.450.000	3.304.650.200	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan dinas roda 4 terpenuhi	2 Unit	505.000.000	0	Bagian Umum
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan 2 unit gedung kantor dan 6 Unit Rumah Dinas Jabatan	12 Bulan	786.000.000	788.594.000	Bagian Umum
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat Daerah Kab. PEkalongan	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	1.584.000.000	1.584.000.000	Bagian Umum
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan komunikasi	12 Bulan	744.000.000	618.816.000	Bagian Umum
00	00	02	102	Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan pengadaan peralatan kantor, rumah tangga dan meubeler	12 Bulan	755.000.000	306.240.200	Bagian Umum
00	00	02	123	Penataan Kantor Setda	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah lokasi penataan ruang di kantor setda selama 12 bulan	3 Lokasi	441.450.000	7.000.000	Bagian Umum
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				3.237.000.000	1.923.551.800	
04	06	16	006	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lain	12 Bulan	1.650.000.000	526.800.000	Bagian Umum
04	06	16	008	Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	12 Bulan	1.467.000.000	1.304.511.800	Bagian Umum
04	06	16	010	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	"Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pelayanan kegiatan protokoler Bupati dan Wakil Bupati selama 12 bulan	135 Kali	120.000.000	92.240.000	Bagian Umum
04	06	34		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				72.000.000	0	
04	06	34	015	Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati	"Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan "	Jumlah Dokumen sambutan Bupati Pekalongan selama 12 bulan	1 Dokumen	72.000.000	0	Bagian Umum
TOTAL								14.571.400.000	11.241.130.210	

Bagian Tata Pemerintahan

				Rencana Tahun 2020		Daftar Indikatif	Perubahan	SKPD Penanggung jawab
--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------------	------------------	------------------------------

Kode	Urusan Bidang	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04 06	PEMERINTAHAN UMUM						
04 06 34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				920.000.000	708.448.700	
04 06 34 010	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kabupaten Pekalongan	Tersusunnya buku LPPD Kabupaten Pekalongan, tersedianya aplikasi LPPD dan tersusunnya Laporan SPM	60 buku LPPD, 15 buku SPM dan 1 aplikasi Buku	270.000.000	216.146.000	Bagian Tata Pemerintahan
04 06 34 012	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat	Kabupaten Pekalongan	Terselenggaranya pelayanan dasar kepada masyarakat di 19 Kecamatan, tersusunnya buku inventarisasi Nama Rupa Bumi unsur buatan dan terwujudnya inovasi kecamatan dalam melayani masyarakat	19 Kecamatan Kec	300.000.000	191.299.700	Bagian Tata Pemerintahan
04 06 34 036	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Pekalongan	Laporan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan	5 eksemplar Eks	300.000.000	276.114.000	Bagian Tata Pemerintahan
04 06 34 041	Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhatian dan Pengangkatan Anggota DPRD, BPD dan Kepala Desa.	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya ketertiban administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD, anggota BPD dan Kepala Desa	3 jenis kegiatan Jenis	50.000.000	24.889.000	Bagian Tata Pemerintahan
04 06 41	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				300.000.000	174.482.000	
04 06 41 001	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Kabupaten Pekalongan	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar daerah, tersedianya aplikasi kerjasama antar daerah dan terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan kerjasama daerah dan peraturan lainnya yang terkait	3 jenis kegiatan Jenis	300.000.000	174.482.000	Bagian Tata Pemerintahan
TOTAL					1.220.000.000	882.930.700	

Bagian Hukum

Kode	Urusan Bidang	Lokasi	Rencana Tahun 2020		Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00 00	NON URUSAN						
00 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.000.000	13.000.000	
00 00 02 104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	25.000.000	13.000.000	Bagian Hukum
00 00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				110.000.000	0	

00	00	05	066	Bintek Legal Drafting	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta Bintek Legal Drafting	100 Orang	35.000.000	0	Bagian Hukum
00	00	05	067	Bintek Produk Hukum Desa	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta Bintek Produk Hukum Desa	563 Orang	75.000.000	0	Bagian Hukum
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				815.000.000	134.535.400	
04	06	26	005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Pendistribusian sarana publikasi peraturan perundang-undangan dan jumlah peserta Sosialisasi Produk Hukum Daerah	750 eks, 100 orang -	150.000.000	13.378.700	Bagian Hukum
04	06	26	012	Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU	Kabupaten Pekalongan	Jumlah solusi atas permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah melalui kajian	10 kajian -	50.000.000	4.377.500	Bagian Hukum
04	06	26	018	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kabupaten Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan sarparas dan SDM dalam pengelolaan JDI Hukum	12 Bulan	75.000.000	25.196.200	Bagian Hukum
04	06	26	022	Penyuluhan Hukum	Kabupaten Pekalongan	Jumlah peserta penyuluhan hukum	304 Orang	60.000.000	0	Bagian Hukum
04	06	26	024	Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi	Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Peserta LCC Kadarkum yang dikirim	11 Orang	35.000.000	0	Bagian Hukum
04	06	26	030	Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda dan Perbup) yang sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi dan serasi dengan peraturan yang sederajat	10 raperda, 30 raperbup -	400.000.000	68.649.900	Bagian Hukum
04	06	26	032	Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda)	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Peserta Propemperda/Propemperbup	70 Orang	45.000.000	22.933.100	Bagian Hukum
04	06	28		Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM				470.000.000	231.399.250	
04	06	28	002	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Kabupaten Pekalongan	Jumlah peserta Rakor, Desiminasi dan Penilaian HAM	165 Orang	95.000.000	37.074.250	Bagian Hukum
04	06	28	003	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Perkara yang terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin	40 perkara -	130.000.000	113.885.000	Bagian Hukum
04	06	28	004	Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pendampingan perkara Perdata dan TUN yang dihadapi Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan	4 Perkara Non Litigasi dan 25 sidang perkara Litigasi -	245.000.000	80.440.000	Bagian Hukum
TOTAL								1.420.000.000	378.934.650	

Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00			NON URUSAN				
00	00		NON URUSAN				

00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					356.420.000	113.062.600	
00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 Bulan		315.000.000	113.062.600	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pekalongan	jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 scanner 4 printer 4pc 2 laptop -		41.420.000	0	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					637.500.000	144.855.400	
00	00	05	051	Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian	Kabupaten Pekalongan	Jumlah penerima honorarium Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Setda	12 Bulan		637.500.000	144.855.400	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
04	06			PEMERINTAHAN UMUM							
04	06	35		Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur					1.270.000.000	464.909.332	
04	06	35	005	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Kabupaten Pekalongan	Jumlah UPP yang dievaluasi	4 Unit		255.000.000	109.467.632	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
04	06	35	006	Analisis Jabatan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan	27 SKPD		250.000.000	70.414.800	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
04	06	35	013	Pengembangan e-SAKIP	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kegiatan bagi peningkatan SAKIP	1 Paket		515.000.000	200.608.900	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
04	06	35	015	Evaluasi Kelembagaan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah OPD yang dievaluasi	27 SKPD		100.000.000	60.054.000	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
04	06	35	016	Penyusunan Review Road Map Reformasi Birokrasi	-	Jumlah Kajian Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	27 SKPD		150.000.000	24.364.000	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
TOTAL									2.263.920.000	722.827.332	

Bagian Pembangunan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020				Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				110.000.000	79.560.343	
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Pembangunan Setda	Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi	3 Unit	20.000.000	0	Bagian Pembangunan
00	00	02	128	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan	Bagian Pembangunan Setda	Jumlah Bulan yang Terpenuhi dalam rangka Update Data Pelaporan (SIMPEL) Kegiatan APBD	12 Bulan	90.000.000	79.560.343	Bagian Pembangunan
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	32		Program Pengendalian Pembangunan				735.000.000	340.026.700	

04	06	32	001	Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan	Bagian Pembangunan Setda	Jumlah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan	672 Buku	120.000.000	92.226.200	Bagian Pembangunan
04	06	32	002	Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan	Bagian Pembangunan Setda	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pengendalian, evaluasi, fasilitasi percepatan pembangunan dan penyusunan 64 dokumen visualisasi hasil pembangunan secara tepat waktu	12 Bulan	450.000.000	179.461.500	Bagian Pembangunan
04	06	32	005	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait	Bagian Pembangunan Setda	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lain yang Terkait	210 Orang	165.000.000	68.339.000	Bagian Pembangunan
TOTAL								845.000.000	419.587.043	

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			220.000.000	150.796.000		
00	00	02	002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen	Kabupaten Pekalongan	Jumlah Masjid yang terpelihara	1 Buah	175.000.000	150.796.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
00	00	02	012 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya	Kabupaten Pekalongan	Jumlah pengadaan Komputer	2 Buah	45.000.000	0	Bagian Kesejahteraan Rakyat
04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
04	06		PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	38	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat			5.451.250.000	4.534.391.800		
04	06	38	004 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Pekalongan	Jumlah anak yang dkhitan, jumlah warga kab. Pekalongan di Jakarta yang ikut mudik lebaran, dan jumlah pemohon hibah/bantuan Sosial yang disurvey	200 anak yang dikhitan, 150 orang mudik lebaran, 600 orang pemohon hibah/bantuan sosial Orang	470.250.000	385.215.500	Bagian Kesejahteraan Rakyat
04	06	38	007 Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji	Kabupaten Pekalongan	Jumlah jemaah haji yang terfasilitasi transportasi dan jumlah TPHD/TKHD yang terpilih	970 orang jemaah haji, 7 orang TPHD/TKHD Orang	2.000.000.000	1.629.299.700	Bagian Kesejahteraan Rakyat

04	06	38	020	Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Jumlah kafilah MTQ/STQ/MHQ, jumlah peserta buka puasa bersama Bupati, jumlah marbot yang difasilitasi, jumlah kegiatan pembinaan bidang keagamaan	50 orang kafilah, 650 anak yatim dan 300 orang yg berbuka puasa, 885 orang marbot, 6 hri raya besar, 26 keg keagamaan Orang	2.981.000.000	2.519.876.600	Bagian Kesejahteraan Rakyat
TOTAL								5.671.250.000	4.685.187.800	

Bagian Perekonomian

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab			
		Lokasi	Keluaran Kegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	10	12			
00			NON URUSAN							
00	00		NON URUSAN							
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80.000.000	0			
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan	Tersedianya 2 komputer, 1 Laptop, 1 UPS, 1 Printer, 1 lcd proyektor, 1 layar proyektor	6 Unit	80.000.000	0	Bagian Perekonomian	
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
04	06		PEMERINTAHAN UMUM							
04	06	33	Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam			270.000.000	135.000.000			
04	06	33	001 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Kab. Pekalongan	erselenggaranya sosialisasi hemat energi dan fasilitasi koordinasi pengelolaan SDA	150 Siswa	170.000.000	70.000.000	Bagian Perekonomian	
04	06	33	003 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Kab. Pekalongan	terselenggaranya sosialisasi ketentuan dibidang cukai	150 Orang	100.000.000	65.000.000	Bagian Perekonomian	
04	06	34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			520.000.000	172.600.000			
04	06	34	001 Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah	Kab. Pekalongan	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi BUMD serta Pendirian BUMD	5 -	200.000.000	59.600.000	Bagian Perekonomian	
04	06	34	014 Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi	Kab. Pekalongan	terlaksananya peningkatan perekonomian melalui percepatan akses keuangan daerah dan promosi investasi	5 -	320.000.000	113.000.000	Bagian Perekonomian	
TOTAL								870.000.000	307.600.000	

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.000.000	0		
00	00	01	060 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang ULP	Kajen	Jumlah sarana dan penunjang kegiatan ULP yang terpenuhi	4 printer dan 7 PC All in one Unit	100.000.000	0	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06		PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	32	Program Pengendalian Pembangunan			2.217.000.000	1.127.565.830		
04	06	32	003 Sewa Bandwidth	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	Jumlah Bulan Terlaksananya Sewa Bandwidth selama 12 bulan	12 Bulan	200.000.000	193.758.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
04	06	32	004 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	Jumlah paket pekerjaan yang ditenderkan oleh ULP	218 Paket	1.700.000.000	700.487.130	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
04	06	32	010 Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	Terlaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang/jasa pada OPD Kab. Pekalongan	208 Orang	90.000.000	64.750.700	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
04	06	32	014 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 Jenis	227.000.000	168.570.000	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
TOTAL							2.317.000.000	1.127.565.830	

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.230.349.000	1.949.745.122	
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Tersediannya surat kabar, jaringan komunikasi, air dan listrik	Tersediannya kebutuhan surat kabar, telepon, TV kabel, PDAM, listrik dalam 1 Tahunikasi, air dan listrik Tahun	373.560.000	373.560.000	Sekretariat DPRD

00	00	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Terpeliharanya AC floor, AC Split, lemari es, LCD proyektor, mesin potong rumput, pompa air, mesin foto copy, sound system, printer laser, printer Inkjek, Komputer, Laptop, Tustel, Isi Toner Printer tahun Tahun	82.500.000	55.476.000	Sekretariat DPRD
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya ATK, Barang Cetak dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Tahun	412.300.000	323.581.150	Sekretariat DPRD
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya peralatan Rumah tangga dan kebutuhan peralatan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, perabotan rumah tangga, dan komponen instalasi listrik kantor dan lampu taman Tahun	90.000.000	131.120.300	Sekretariat DPRD
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan	Tersedianya jamuan	350.000.000	350.000.000	Sekretariat DPRD
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dan terbayarnya Honor Pengelola Kegiatan dalam 1 Tahun	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan Terbayarnya Honorarium PA, PPK, Pejabat Pembuat Dokumen Pengeluaran, Honor Pengurus Gaji selama 12 bulan Tahun	546.414.000	371.518.000	Sekretariat DPRD
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Kebutuhan tenaga outsourcing kebersihan, sopir pimpinan DPRD, Tenaga IT dan pramusaji selama 1 Tahun	Tersedianya tenaga outsourcing kebersihan sebanyak 8 orang, 5 orang Sopir, 1 orang Tenaga IT dan 2 orang Pramusaji Tahun	375.575.000	344.489.672	Sekretariat DPRD
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.120.842.800	3.159.318.668	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kajen	Terpenuhinya Kendaraan Dinas	1 unit kendaraan dinas jabatan Unit	418.586.000	1.084.650.000	Sekretariat DPRD

00	00	02	006	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Rumah Dinas Ketua DPRD	Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Ketua DPRD	Tersedianya peralatan dan 1 paket karpet lantai rumah Dinas Ketua DPRD Tahun	205.000.000	66.010.772	Sekretariat DPRD
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Ketua DPRD dan Gedung Kantor	Terpeliharanya rumah dinas Ketua DPRD, Gedung Kantor dan Pemeliharaan Genset 1 Tahun, Penggantian cover sofa ruang ketua DPRD, Terbayarnya Jasa Website dan Honorarium Kegiatan selama 1 Tahun Tahun	270.489.800	262.627.928	Sekretariat DPRD
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 6 unit dan mobil jabatan 7 unit selama 1 Tahun dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat 13 unit, Roda dua 8 unit dan Roda tiga 1 unit selama 1 Tahun Tahun	476.767.000	367.580.248	Sekretariat DPRD
00	00	02	044	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rehabilitasi kamar mandi, penggantian wallpaper dan karpet di ruang Ketua DPRD, Setwan dan Interior Ruang Rapat Paripurna Tahun	2.250.000.000	120.000.000	Sekretariat DPRD

00	00	02	180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, aplikasi software sistem informasi arsip produk hukum DPRD dan software data keuangan	Tersedianya Videwall 2 set, Mic Wireless 2 set, PC Unit 3 unit, printer wireless wifi 3 unit, Meja kursi tamu 4 set, sofa bad 2 set, Mic Conference 1 set, alat perekam 6 bh, aplikasi data & informasi hukum, aplikasi keuangan Tahun	1.500.000.000	1.258.449.720	Sekretariat DPRD
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				471.730.000	493.100.000	
00	00	03	006	Pengadaan Pakaian Dinas	Sekretariat DPRD	Tersedianya pakaian PSR,PSH, PDH lengan panjang, Pakaian Daerah untuk 45 orang Anggota DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas untuk PSR 45 STEL, PSH 90 STEL, dan PDH lengan panjang 45 STEL, Pakaian Daerah 45 stel Paket	471.730.000	493.100.000	Sekretariat DPRD
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				353.430.000	156.115.000	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD	Terlaksananya pendidikan pelatihan formal	Terkirimnya peserta bintek / workshop Asdeksi 6 org x 7 kali dalam satu tahun, dan Diklat Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 2 orang x 2 kali Tahun	353.430.000	156.115.000	Sekretariat DPRD
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				24.105.584.955	25.704.241.300	
04	06	15	003	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan Dewan	Tersedianya makanan dan minuman rapat alat kelengkapan dewan Tahun	242.000.000	241.992.000	Sekretariat DPRD
04	06	15	004	Rapat-rapat Paripurna	Sekretariat DPRD	Terlaksananya rapat-rapat paripurna, Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan Rapat Paripurna Hari Jadi	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat paripurna dan rapat paripurna istimewa hari jadi Tahun	407.000.000	322.480.900	Sekretariat DPRD

04	06	15	005	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRd	Terlaksananya reses DPRD	Terlaksananya Reses DPRD sebanyak 3 X 5 pertemuan Tahun	3.352.830.525	2.582.273.500	Sekretariat DPRD
04	06	15	009	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja keluar dan dalam daerah Pimpinan DPRD, Alat kelengkapan Dewan dan pendampingan	Kunjungan kerja luar propinsi = 13 kali, luar pulau 2 kali, dalam propinsi = 15 kali, eks karisidenan = 10 kali dan dalam daerah = 48 kali Tahun	14.542.294.000	17.860.638.900	Sekretariat DPRD
04	06	15	014	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD	Sekretariat DPRD	Tersedianya tenaga ahli Fraksi DPRD dan tim ahli	Terbayarnya 6 org tenaga ahli Fraksi dan tim ahli Tahun	315.171.000	212.400.000	Sekretariat DPRD
04	06	15	015	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya General Check Up pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pekalongan	General Check Up Kesehatan 45 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan Tahun	352.000.000	424.048.000	Sekretariat DPRD
04	06	15	016	Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Bintek DPRD dan Rapat Koordinasi Adkasi	Pengiriman Peserta Bimtek 45 orang X 6 kali Tahun	3.528.828.000	3.055.064.000	Sekretariat DPRD
04	06	15	024	Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya penyusunan 2 NA dan 2 Raperda Inisiatif DPRD dan 2 Kajian Peraturan Perundang-undanga	Terlaksananya penyusunan 2 NA dan 2 Raperda Inisiatif DPRD dan 2 Kajian Peraturan Perundang-undangan Paket	459.061.000	137.174.000	Sekretariat DPRD
04	06	15	025	Pengelolaan dan Penataan Kehumasan	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya informasi kegiatan DPRD dan penataan dokumentasi, Publikasi Kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik	Trlksnanya ctk foto, paket Pemotretan, album foto, Pigura, transfer & edit audio visual, pemb banner/spanduk, Baliho, terlksnya publikasi& sosialisasi keg via media ctk&elctr, jumpa pers&transport peliptan Tahun	606.400.430	444.570.200	Sekretariat DPRD
04	06	15	028	Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD selama 1 tahun Tahun	300.000.000	423.599.800	Sekretariat DPRD
TOTAL								32.281.936.755	31.462.520.090	

Kecamatan Kajen

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			337.479.000	322.633.100		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kajen	Terpenuhinya belanja air, listrik dan telepon	PDAM, Internet, Listrik, Telepon Bulan	45.255.000	45.255.000	Kecamatan Kajen
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Kecamatan Kajen	Terpenuhinya Pembayaran STNK 6 Sepeda Motor dan 1 Mobil Dinas serta Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Selama 1 Tahun	1 Mobil/ 6 Motor Unit	32.662.500	31.162.000	Kecamatan Kajen
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kajen	Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan	PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Pengurus Barang, Pengurus Barang Kelurahan Orang	50.652.000	50.652.000	Kecamatan Kajen
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Kajen	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor yang memadai	Printer Inkjet, Kipas Angin, AC, Almari Besi, Lap Top Unit	10.050.000	10.049.000	Kecamatan Kajen
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kajen	Jumlah yang terpenuhi untuk Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK, MMT, Cetak Foto, Fotocopy, Kertas Tahun	31.959.000	28.793.200	Kecamatan Kajen
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kajen	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga serta Makanan dan Minuman yang memadai	12 Bulan	55.787.550	76.825.500	Kecamatan Kajen
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kajen	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah serta pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan	48.601.950	18.321.800	Kecamatan Kajen
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Kajen	Jumlah yang bertanggung untuk pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan dan Tenaga lainnya	12 Bulan/ 3 Orang Orang	62.511.000	61.574.600	Kecamatan Kajen
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				84.621.000	45.235.800	
00	00	02	012 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya	Kecamatan Kajen	Terpenuhinya pengadaan Komputer, Printer, LCD, dan Perlengkapannya serta Meubeleur	3 Filling Besi/ Metal, Lap Top, 59 Kursi Lipat Buah	44.421.000	26.850.000	Kecamatan Kajen
00	00	02	020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kecamatan Kajen	Terwujudnya 1 Unit Rumah Jabatan serta 3 Gedung Kantor Kecamatan Kajen yang nyaman	1 Rumah Jabatan/ Dinas. 3 Gedung Kantor Unit	40.200.000	18.385.800	Kecamatan Kajen

04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				426.663.550	144.545.700	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Kajen	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan serta Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Kajen	24 Desa/ 1 Kelurahan Musrenbangdes, 6 Hari Promosi Industri Lokal Keg	34.587.075	22.635.300	Kecamatan Kajen
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Kajen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa, Pendampingan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Lainnya (P3DL), serta Pembinaan dan Pengawasan Desa	24 Desa/ 1 Kelurahan Keg	89.947.500	76.621.300	Kecamatan Kajen
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Kajen	Terfasilitasinya pelaksanaan peningkatan peran serta perempuan dan anak di pedesaan serta pendampingan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak tingkat kecamatan	24 Desa/ 1 Kelurahan Desa	67.165.000	35.789.100	Kecamatan Kajen
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Kajen	Terwujudnya pelayanan masyarakat dalam kegiatan PATEN yang optimal	12 Bulan	11.055.000	0	Kecamatan Kajen
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Kajen	Peningkatan pemahaman cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dimasyarakat melalui kegiatan apresiasi kreativitas seni budaya, lomba tertib administrasi desa, dan kegiatan masyarakat di bidang pemuda dan olahraga	4 Keg	223.908.975	9.500.000	Kecamatan Kajen
04	06	40		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan				1.379.750.000	1.170.000.000	
04	06	40	013	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen	Kecamatan Kajen	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen	12 Bulan	351.250.000	596.700.000	Kecamatan Kajen
04	06	40	014	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen	Kecamatan Kajen	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang nyaman	1 Tahun	1.028.500.000	573.300.000	Kecamatan Kajen
TOTAL								2.228.513.550	1.682.414.600	

Kecamatan Sragi

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			335.130.000	341.567.600

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sragi	Tercukupinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	23.000.000	22.800.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sragi	Tercukupinya pajak kendaraan dinas	1 Unit	38.000.000	38.000.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Sragi	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	50.700.000	49.500.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Sragi	Tercukupinya alat tulis kantor	1 Tahun	26.540.000	25.681.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sragi	Tercukupinya peralatan rumah tangga	1 Tahun	9.000.000	43.705.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Sragi	Tercukupinya makanan dan minuman	1 Tahun	37.500.000	35.601.800	Kecamatan Sragi
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sragi	Tercukupinya perjalanan dinas ke luar daerah	1 Tahun	46.000.000	41.060.000	Kecamatan Sragi
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Sragi	Tercukupinya jasa tenaga kebersihan kantor dan penjaga malam	1 Tahun	104.390.000	85.219.800	Kecamatan Sragi
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				91.000.000	96.868.600	
00	00	02	001	Penataan Lingkungan Kantor	Kecamatan Sragi				43.310.000	Kecamatan Sragi
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Sragi	Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Sragi
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sragi	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	86.000.000	48.558.600	Kecamatan Sragi
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				301.022.000	153.344.700	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	Kecamatan Sragi	Tercukupinya musyawarah pembangunan	19 Keg	31.007.400	20.277.400	Kecamatan Sragi
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Sragi	Tercukupinya pembinaan dan pengawasan desa	1 Tahun	51.894.600	51.894.600	Kecamatan Sragi
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan	Kecamatan Sragi	Meningkatnya peran perempuan dan anak	16 Desa	57.870.000	38.044.100	Kecamatan Sragi
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Sragi	Tercukupinya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 Bulan	24.950.000	14.549.600	Kecamatan Sragi
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Sragi	Tercukupinya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara	1 Keg	80.000.000	0	Kecamatan Sragi
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sragi	Tercukupinya apresiasi dan kreativitas seni budaya lokal	1 Tahun	55.300.000	28.579.000	Kecamatan Sragi
04	06	40		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan				1.300.000.000	1.168.358.550	
04	06	40	015	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi	Kelurahan Sragi	Tercukupinya pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	300.000.000	747.627.550	Kecamatan Sragi
04	06	40	016	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi	Kelurahan Sragi	Tercukupinya sarana dan prasarana kelurahan sragi	1 Tahun	1.000.000.000	420.731.000	Kecamatan Sragi
TOTAL								2.027.152.000	1.760.139.450	

Kecamatan Wiradesa

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			320.900.000	293.470.380		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	28.500.000	28.500.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Wiradesa	Penyediaan jasa Pengguna Anggaran, Pejabat penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Pengurus Barang dan Penyimpan barang	12 Bulan	115.000.000	51.720.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	9.000.000	8.995.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	40.000.000	33.747.800	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.000.000	49.157.580	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan 12 minuman	12 Bulan	23.000.000	23.000.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	36.000.000	34.950.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dan Jasa Tenaga lainnya	12 Bulan	63.400.000	63.400.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				384.500.000	114.030.800	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Wiradesa	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Kecamatan, Pendopo dan Rumah Dinas Jabatan	1 Kali	30.000.000	72.885.400	Kecamatan Wiradesa
				Kecamatan Wiradesa	Jumlah Pemeliharaan rumah Kantor Kecamatan Wiradesa	1 Kali	30.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
00	00	02	023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	1 Unit	29.500.000	25.317.400	Kecamatan Wiradesa
00	00	02	101 Penataan Ruang Kantor	Kecamatan Wiradesa	Pelaksanaan Penataan Ruang Kantor Kecamatan Wiradesa	1 Keg	200.000.000	0	Kecamatan Wiradesa

00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wiradesa	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	15 Unit	70.000.000	15.828.000	Kecamatan Wiradesa
00	00	02	166	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Kecamatan Wiradesa	Terpenuhinya sarana transportasi untuk menunjang kelancaran pejabat dalam pelayanan	1 Unit	25.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				456.500.000	124.767.100	
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang ada di Kecamatan Wiradesa dan Fasilitasi Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tk Kecamatan	16 Desa	40.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Wiradesa	Jumlah Pelaksanan Musrenbang di tingkat Desa/kel dan Kecamatan dan Pelaksanaan Promosi Industri lokal	18 Kali	25.000.000	24.999.300	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Wiradesa	-	-	66.000.000	41.118.600	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan yang terlaksana dalam rangka Fasilitasi Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	12 Bulan	81.000.000	24.255.600	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	012	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan terpenuhi dalam rangka Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan	12 Bulan	25.000.000	24.993.600	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Wiradesa	Jumah bulan yang terpenuhi dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Bulan	17.500.000	9.400.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	022	Fasilitasi Promosi Pariwisata	Kecamatan Wiradesa	Penyelenggaraan Karnaval Batik dan Seni di Kecamatan Wiradesa	1 Keg	60.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Wiradesa	Pelaksanan Upacara hari - hari besar nasional di tingkat Kecamatan Wiradesa	3 Kali	50.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah pelaksanaan kegiatan apresiasi dan kreativitas budaya di Kecamatan Wiradesa (MTQ, Grebeg Syawal, Pawai Budaya, Pentas seni dan Suluk Budaya)	5 Keg	75.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04	06	39	045	Fasilitasi Forum Pendidikan tingkat kecamatan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah bulan terpenuhi dalam rangka fasilitasiu forum pendidikan tingkat kecamatan	12 Bulan	17.000.000	0	Kecamatan Wiradesa

04	06	40		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan				7.275.000.000	5.850.000.000	
04	06	40	017	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang	Kecamatan Wiradesa	jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi 7 lembaga masyarakat di Kelurahan Gumawang	12 Bulan	250.000.000	590.320.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	018	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan	Kecamatan Wiradesa	jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi 7 lembaga masyarakat di Kelurahan Kepatihan	12 Bulan	250.000.000	614.900.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	019	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan	Kecamatan Wiradesa	jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi 7 lembaga masyarakat di Kelurahan Mayangan	12 Bulan	250.000.000	656.250.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	020	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen	Kecamatan Wiradesa	jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi 7 lembaga masyarakat di Kelurahan Pekuncen	12 Bulan	275.000.000	775.580.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	021	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener	Kecamatan Wiradesa	jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi 7 lembaga masyarakat di Kelurahan Bener	12 Bulan	250.000.000	627.500.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	022	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang	Kecamatan Wiradesa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sarana dan prasarana Kelurahan Gumawang	6 Paket	1.000.000.000	579.680.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	023	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan	Kecamatan Wiradesa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sarana dan prasarana Kelurahan Kepatihan	6 Paket	1.000.000.000	555.100.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	024	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan	Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa	Jumlah Paket Pekerjaan dalam rangka Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan	6 Paket	1.000.000.000	513.750.000	Kecamatan Wiradesa
					Kecamatan Wiradesa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sarana dan prasarana Kelurahan Mayangan	6 Paket	1.000.000.000	0	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	025	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen	Kecamatan Wiradesa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sarana dan prasarana Kelurahan Pekuncen	6 Paket	1.000.000.000	394.420.000	Kecamatan Wiradesa
04	06	40	026	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener	Kecamatan Wiradesa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka penataan sarana dan prasarana Kelurahan Bener	6 Paket	1.000.000.000	542.500.000	Kecamatan Wiradesa
TOTAL								8.436.900.000	6.382.268.280	

Kecamatan Kedungwuni

				Rencana Tahun 2020		Daftar Indikatif	Perubahan	SKPD Penanggung jawab
--	--	--	--	---------------------------	--	-------------------------	------------------	------------------------------

Kode				Urusan Bidang	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Murnai Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	
						Tolok Ukur	Target			
1				2	3	4	5	6	10	12
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				625.360.000	545.317.430	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kedungwuni	Jumlah bulan terbayarnya rekening telepon, listrik, internet dan surat kabar	12 Bulan	42.000.000	38.960.000	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kedungwuni	Terbayarnya biaya perpanjangan STNK kendaraan dinas	4 Unit	41.110.000	41.000.000	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kedungwuni	Terbayarnya honorarium pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	65.500.000	65.499.600	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kedungwuni	Terbayarnya jasa perbaikan ac kantor	6 Unit	22.500.000	20.400.000	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kedungwuni	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	32.500.000	25.000.000	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kedungwuni	Jumlah bulan tersedianya keperluan peralatan rumah tangga	12 Bulan	36.750.000	27.579.030	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kedungwuni	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman pegawai	11 Bulan	42.000.000	25.517.600	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kedungwuni	Jumlah terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dan ke dalam daerah serta pengiriman peserta diklat	108 OK	60.500.000	37.610.000	Kecamatan Kedungwuni
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kedungwuni	-	12 Orang	282.500.000	263.751.200	Kecamatan Kedungwuni
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				437.270.000	36.590.400	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kedungwuni	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua	2 Unit	42.000.000	0	Kecamatan Kedungwuni
00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kedungwuni	-	1 Paket	261.800.000	36.590.400	Kecamatan Kedungwuni
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kedungwuni	Jumlah terpeiharanya gedung kantor	1 Unit	53.470.000	0	Kecamatan Kedungwuni
00	00	02	183	Penyusunan DED Kantor Kecamatan	Kedungwuni	Jumlah tersusunnya DED Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kedungwuni	1 Paket	80.000.000	0	Kecamatan Kedungwuni
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				347.000.000	131.041.500	
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kedungwuni	Jumlah peserta perwakilan organisasi kepemudaan yang terbina	19 Orang	33.000.000	0	Kecamatan Kedungwuni
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kedungwuni	Jumlah terselenggaranya musrenbangdes dan musrenbangcam serta keikutsertaan kecamatan dalam kegiatan expo kajian	20 Kali	18.500.000	13.003.000	Kecamatan Kedungwuni

04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kedungwuni	Jumlah desa yang terbina	16 Desa	69.000.000	54.259.900	Kecamatan Kedungwuni
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kedungwuni	Jumlah bulan terselenggaranya Rakon PKK	12 Bulan	77.000.000	46.098.600	Kecamatan Kedungwuni
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kedungwuni	Jumlah bulan fasilitasi PATEN	12 Bulan	27.000.000	13.010.000	Kecamatan Kedungwuni
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kedungwuni	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI	2 Keg	95.000.000	0	Kecamatan Kedungwuni
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kedungwuni	Jumlah kegiatan apresiasi seni yang terselenggara	3 Keg	27.500.000	4.670.000	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan				4.310.000.000	3.696.500.800	
04	06	40	007	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat	Kedungwuni	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemberdayaan dan penunjang administrasi pelayanan masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat	12 Bulan	480.000.000	836.530.000	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40	008	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur	Kedungwuni	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemberdayaan dan penunjang administrasi pelayanan masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur	12 Bulan	430.000.000	754.405.500	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40	009	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan	Kedungwuni	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka pemberdayaan dan penunjang administrasi pelayanan masyarakat Kelurahan Pekajangan	12 Bulan	400.000.000	798.911.300	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40	010	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat	Kedungwuni	Jumlah pengadaan kantor dan peningkatan sarpras lingkungan Kelurahan Kedungwuni Barat	5 Paket	1.000.000.000	426.978.000	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40	011	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur	Kedungwuni	Jumlah pengadaan kantor dan peningkatan sarpras lingkungan Kelurahan Kedungwuni Timur	5 Paket	1.000.000.000	455.000.000	Kecamatan Kedungwuni
04	06	40	012	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan	Kedungwuni	Jumlah pengadaan kantor dan peningkatan sarpras lingkungan Kelurahan Pekajangan	5 Paket	1.000.000.000	424.676.000	Kecamatan Kedungwuni
TOTAL								5.719.630.000	4.409.450.130	

Kecamatan Buaran

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab	
		Lokasi	Keluaran Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	10	12	
00	NON URUSAN							
00	NON URUSAN							
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			230.410.000	192.243.950	
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam penyediaan jaskom,SDA dan listrik	40.750.000	31.582.000	Kecamatan Buaran

00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	62.660.000	62.520.000	Kecamatan Buaran
00	00	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	8.000.000	6.693.350	Kecamatan Buaran
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Buaran	Terpenuhinya alat tulis kantor dan penyediaan cetak penggandaan	12 Bulan	40.000.000	24.649.700	Kecamatan Buaran
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	5.000.000	3.968.000	Kecamatan Buaran
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Buaran	Tersedianya makan minum; konsultasi dalam dan ke luar daerah	12 Bulan	31.000.000	20.980.900	Kecamatan Buaran
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	12 Bulan	43.000.000	41.850.000	Kecamatan Buaran
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				396.340.000	79.630.200	
00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Buaran	Jumlah paket yg terpenuhi dalam pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	100.000.000	9.913.000	Kecamatan Buaran
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Buaran	Jumlah unit yg terpenuhi dalam pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Unit	14.000.000	8.037.400	Kecamatan Buaran
00	00	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 Bulan	32.340.000	25.669.800	Kecamatan Buaran
00	00	02	044	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Buaran	Jumlah unit yg terpenuhi dalam rehab sdang/berat rumah gedung kantor	1 Unit	200.000.000	0	Kecamatan Buaran
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Buaran	Jumlah paket yg terpenuhi dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	50.000.000	36.010.000	Kecamatan Buaran
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				228.400.000	61.990.600	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Buaran	Jumlah terlaksananya musyawarah pembangunan desa dan kecamatan	11 Kali	20.500.000	9.687.000	Kecamatan Buaran
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Buaran	Jumlah tiem penggerak PKK di kelurahan dan desa sekecamatan Buaran	11 Kelompok	20.500.000	12.702.500	Kecamatan Buaran
04	06	39	019	Lomba Tertib Administrasi Desa	Kecamatan Buaran	Jumlah desa yang sudah tertib administrasi	7 Desa	46.900.000	10.349.400	Kecamatan Buaran
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yg terpenuhi dalam memfasilitasi pelayanan masyarakat	12 Bulan	20.000.000	6.717.600	Kecamatan Buaran
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Buaran	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai luhur bangsa dan bernegara	4 Keg	57.000.000	0	Kecamatan Buaran

04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Buaran	Jumlah kegiatan apresiasi dan kreativitas seni budaya di kecamatan	3 Keg	47.000.000	6.574.100	Kecamatan Buaran
04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	Kecamatan Buaran	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penanganan ketentraman dan ketertiban	12 Bulan	16.500.000	15.960.000	Kecamatan Buaran
04	06	40		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan				3.750.000.000	3.509.950.000	
04	06	40	001	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut	Kecamatan Buaran	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat kel.Sapugarut	9 Kelompok	250.000.000	654.210.570	Kecamatan Buaran
04	06	40	002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo	Kecamatan Buaran	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat kel. Bligo	9 Kelompok	250.000.000	616.838.000	Kecamatan Buaran
04	06	40	003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon	Kecamatan Buaran	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat kel.Simbang Kulon	9 Kelompok	250.000.000	758.654.000	Kecamatan Buaran
04	06	40	004	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut	Kecamatan Buaran	Jumlah paket sarana prasarana kelurahan yang terpenuhi kel.sapugarut	9 Paket	1.000.000.000	515.789.430	Kecamatan Buaran
04	06	40	005	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo	Kecamatan Buaran	Jumlah paket sarana prasarana kelurahan yang terpenuhi kel.Bligo	9 Paket	1.000.000.000	553.112.000	Kecamatan Buaran
04	06	40	006	Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon	Kecamatan Buaran	Jumlah paket sarana prasarana kelurahan yang terpenuhi kel.Simbang Kulon	9 Paket	1.000.000.000	411.346.000	Kecamatan Buaran
TOTAL								4.605.150.000	3.843.814.750	

Kecamatan Tirto

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	10	12
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				283.565.000	326.563.600	
00	001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TIRTO	terpenuhi dalam kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	28.750.000	34.550.000	Kecamatan Tirto
00	001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	29.645.000	29.877.000	Kecamatan Tirto
00	001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Bulan dalam Pembayaran Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	12 Bulan	33.600.000	33.600.000	Kecamatan Tirto
00	001 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Bulan Dalam Pembayaran Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	12 Bulan	15.710.000	8.302.000	Kecamatan Tirto

00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Bulan dalam Pembelian Alat Tulis Kantor	12%	27.600.000	28.982.600	Kecamatan Tirto
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan untuk penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	4.400.000	50.010.000	Kecamatan Tirto
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan untuk penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	25.760.000	25.760.000	Kecamatan Tirto
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan untuk rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	46.100.000	46.302.000	Kecamatan Tirto
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan untuk penyediaan jasa tenaga kebersihan dan tenaga lainnya	12 Bulan	72.000.000	69.180.000	Kecamatan Tirto
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				428.447.000	0	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Unit dalam pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	1 Unit	105.000.000	0	Kecamatan Tirto
00	00	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TIRTO	Presentase pekerjaan yang terpenuhi dalam pengadaan perlengkapan kantor	100%	123.447.000	0	Kecamatan Tirto
00	00	02	133	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Camat	KECAMATAN TIRTO	Jumlah dan jenis kegiatan dalam rehabilitasi sedang/berat rumah dinas camat	1 Unit	200.000.000	0	Kecamatan Tirto
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				418.691.200	131.715.500	
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	KECAMATAN TIRTO	Jumlah kegiatan dalam pembinaan organisasi pemuda di tingkat kecamatan	1 Paket	19.474.400	0	Kecamatan Tirto
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	KECAMATAN TIRTO	Jumlah Kegiatan dalam fasilitasi musrembangdes dan musrembangkec	17 Keg	35.200.000	24.417.500	Kecamatan Tirto
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan dalam pembinaan.asistensi dan evaluasi penyusunan pelaporan administrasi desa	12 Bulan	57.500.000	29.777.000	Kecamatan Tirto
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan dalam kegiatan dan pembinaan PKK	12 Bulan	91.000.000	43.385.000	Kecamatan Tirto
04	06	39	014	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan dalam fasilitasi pengaduan masyarakat	12 Bulan	53.853.800	10.352.000	Kecamatan Tirto
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	KECAMATAN TIRTO	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam fasilitasi pelayanankecamatan (PATEN)	12 Bulan	24.200.000	18.422.800	Kecamatan Tirto
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat	KECAMATAN TIRTO	Kegiatan HUT RI,sumpah pemuda dan hari	3 Keg	67.463.000	0	Kecamatan Tirto
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TIRTO	Jumlah dan jenis kegiatan dalam Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	3 Keg	70.000.000	5.361.200	Kecamatan Tirto
TOTAL								1.130.703.200	458.279.100	

Kecamatan Boiong

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			287.500.000	263.497.640		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40.500.000	40.466.200	Kecamatan Bojong
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Bojong	Terbayar pajak kendaraan dinas; serta terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	4 Unit	37.500.000	36.720.000	Kecamatan Bojong
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pelaporan keuangan	12 Bulan	35.000.000	33.793.600	Kecamatan Bojong
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Bojong	Jumlah peralatan kerja yang terservice	10 Unit	16.000.000	15.986.340	Kecamatan Bojong
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan ATK	12 Bulan	34.000.000	33.747.900	Kecamatan Bojong
00	00	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	17.500.000	17.496.000	Kecamatan Bojong
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam kegiatan rapat koordinasi luar daerah	12 Bulan	62.000.000	43.447.600	Kecamatan Bojong
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan jasa kebersihan dan jasa tenaga lainnya	12 Bulan	45.000.000	41.840.000	Kecamatan Bojong
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				332.000.000	60.775.700	
00	00	02	005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Bojong	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	24.000.000	0	Kecamatan Bojong
00	00	02	015 Pengadaan mebeleur	Kecamatan Bojong	Jumlah barang yang terbeli dalam pengadaan mebeleur	14 Unit	40.000.000	0	Kecamatan Bojong
00	00	02	020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam kegiatan pemeliharaan rumah jabatan	12 Bulan	23.000.000	22.015.700	Kecamatan Bojong
00	00	02	103 Penyempurnaan Gedung Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah gedung kantor yang disempurnakan	1 Unit	200.000.000	0	Kecamatan Bojong
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bojong	Jumlah barang yang terbeli dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Unit	25.000.000	38.760.000	Kecamatan Bojong
00	00	02	210 Pembuatan Sistem Informasi/Website	Kecamatan Bojong	Jumlah website yang dibuat	1 Paket	20.000.000	0	Kecamatan Bojong
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06		PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				307.500.000	167.942.900	

04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Bojong	Terlaksananya Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan	23 Kali	30.000.000	15.230.300	Kecamatan Bojong
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Desa yang di bina dalam pembinaan dan pengawasan desa	22 Desa	45.000.000	37.890.000	Kecamatan Bojong
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Bojong	Terlaksananya kegiatan PKK di Desa	22 Desa	40.000.000	34.998.900	Kecamatan Bojong
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Bojong	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam fasilitasi PATEN	12 Bulan	20.000.000	13.800.000	Kecamatan Bojong
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Bojong	Pelaksanaan kegiatan Agustusan	1 Kali	50.000.000	0	Kecamatan Bojong
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	Pelaksanaan Kegiatan apresiasi dan kreativitas seni budaya	3 Kali	60.000.000	9.924.000	Kecamatan Bojong
04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	Kecamatan Bojong	Jumlah Bulan yang terpenuhi dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	12 Bulan	15.000.000	14.999.900	Kecamatan Bojong
04	06	39	032	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kecamatan Bojong	Terlaksananya Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	2 Kali	12.500.000	12.500.000	Kecamatan Bojong
04	06	39	070	Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bojong	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Ibu Hamil	1 Kali	35.000.000	28.599.800	Kecamatan Bojong
TOTAL								927.000.000	492.216.240	

Kecamatan Wonorejo

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		300.900.000	254.446.100			
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Wonorejo	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk pembayaran Jaskom dan Internet	12 Bulan	29.000.000	32.627.000	Kecamatan Wonorejo
00	00	01	006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Wonorejo	Jumlah Dana yang Tersedia Peabayaran pajak kendaraan Roda Empat dan dua	3 Unit	34.500.000	32.720.000	Kecamatan Wonorejo
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec.wonorejo	Jumlah Bulan yang terpenuhi untuk jasa Administrasi Keuangan 6 orang	12 Unit	40.000.000	39.999.900	Kecamatan Wonorejo
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec.Wonorejo	Jumlah Peralatan kerja yang di perbaiki dalam 1 tahun	7 Unit	25.000.000	17.479.900	Kecamatan Wonorejo
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec.Wonorejo	Jumlah Bulan yang terpenuhi untuk kebutuhan ATK 1 Tahun	12 Bulan	43.000.000	26.603.800	Kecamatan Wonorejo
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec.Wonorejo	Jumlah Bulan yang terpenuhi kegiatan rapat dan konsultasi luar daerah eselon III dan staf	12 Bulan	80.000.000	57.536.300	Kecamatan Wonorejo

00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kec.Wonopringgo	Jumlah Bulan yang terpenuhi untuk jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga malam	3 Unit	49.400.000	47.479.200	Kecamatan Wonopringgo
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.536.500.000	98.497.100	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kec.Wonopringgo	Jumlah dana yang terpenuhi untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua	3 Unit	65.000.000	0	Kecamatan Wonopringgo
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec.Wonopringgo	Jumlah Bulan yang terpenuhi Pemeliharaan Gedung Kantor 1 unit 1 tahun	1 Unit	45.000.000	19.335.100	Kecamatan Wonopringgo
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Wonopringgo	Jumlah Dana yang terpenuhi untuk Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	4 Buah	76.500.000	79.162.000	Kecamatan Wonopringgo
00	00	02	183	Penyusunan DED Kantor Kecamatan	Kecamatan Wonopringgo	Tereviewnya DED penataan kantor Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	0	Kecamatan Wonopringgo
00	00	02	213	Pengadaan tanah	Kecamatan Wonopringgo	Terpenuhinya Sarana Prasana Kantor	1 Keg	1.300.000.000	0	Kecamatan Wonopringgo
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				445.000.000	108.713.600	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kec. Wonopringgo	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan	2 Keg	65.000.000	20.292.600	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	kec. Wonopringgo	Jumlah Bulan yang terpenuhi untuk kegiatan Pembinaan dan Monitoring ke Desa 14 Desa	14 Desa	50.000.000	16.840.000	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kec. Wonopringgo	Jumlah Bulan Yang Terpenuhi kegiatan Fasilitasi Peran perempuan & anak dipedesaan	12 Bulan	85.000.000	36.313.000	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	018	Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme	Kec. Wonopringgo	Pelaksanaan Upacara HUT RI dan Karnaval 17 AN	2 Keg	80.000.000	0	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec.Wonopringgo	Jumlah Bulan Yang Terpenuhi kegiatan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	12 Unit	30.000.000	6.665.000	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kec.Wonopringgo	Jumlah Dana Yang Terpenuhi kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	4 Buah	100.000.000	4.610.000	Kecamatan Wonopringgo
04	06	39	032	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kec.Wonopringgo	Jumlah Dana Yang Terpenuhi kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	14 Unit	35.000.000	23.993.000	Kecamatan Wonopringgo
TOTAL								2.282.400.000	461.656.800	

Kecamatan Karanganyar

				Rencana Tahun 2020		Pagu Indikatif	Perubahan	SKPD Penanggung jawab
--	--	--	--	---------------------------	--	-----------------------	------------------	------------------------------

Kode				Urusan Bidang	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	
						Tolok Ukur	Target			
1				2	3	4	5	6	10	12
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				310.000.000	193.820.500	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN KARANGANYAR	JUMLAH BULAN TERSEDINYA SARANA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah bulan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	40.000.000	32.520.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah bulan Terlaksananya jasa Kebersihan dan adminstrasi lainnya.	12 Bulan	50.000.000	44.240.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah bulan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor.	12 Bulan	32.000.000	23.981.500	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah bulan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	16.000.000	16.000.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah kegiatan Terlaksananya perjalanan ke Luar Daerah	26 Kali	85.000.000	47.079.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	01	053	Penataan Lingkungan Kecamatan	KECAMATAN KARANGANYAR	JUMLAH RAPAT KOORDINASI PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN JALAN LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN	3 Kali	57.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				473.000.000	118.176.000	
00	00	02	015	Pengadaan mebeleur	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah unit Tersedianya Mebeler kantor.	16 Unit	95.000.000	26.880.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah paket Terpeliharanya rumah dinas secara Rutin / Berkala	1 Paket	6.500.000	6.500.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara Rutin / Berkala	1 Unit	42.500.000	35.000.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah barang Terpeliharanya Mebeler kantor secara Rutin / Berkala	25 Unit	11.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah unit tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	112.000.000	49.796.000	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	115	Penambahan Daya Listrik Gedung Kantor	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah paket Penambahan Daya Listrik	1 Paket	6.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
00	00	02	166	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah unit Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda dua (2) Kecamatan Karanganyar	8 Unit	200.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000	2.750.000	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan	2 Orang	15.000.000	2.750.000	Kecamatan Karanganyar
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

01	04	15		Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman					17.000.000	0	
01	04	15	010	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	KECAMATAN KARANGANYAR	RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA, SERTA FASILITASI PENDATAAN PERUMAHAN	1 Kali		12.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
01	04	15	015	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	KECAMATAN KARANGANYAR	RAPAT KOORDINASI PENDATAAN LINGKUNGAN KUMUH DAN RTLH	1 Kali		5.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
01	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
01	05	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					25.000.000	0	
01	05	17	007	Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan antar Umat Beragama serta antar kepercayaan	KECAMATAN KARANGANYAR	JUMLAH PERTEMUAN / RAPAT DAN AGENDA ANTARA TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	1 Kali		25.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
02	05			LINGKUNGAN HIDUP							
02	05	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					50.000.000	0	
02	05	24	018	Penataan Ruang Terbuka Hijau	KECAMATAN KARANGANYAR	JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TINGKAT KECAMATAN	1 Keg		50.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
04	06			PEMERINTAHAN UMUM							
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan					430.000.000	179.957.800	
04	06	39	001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah kegiatan terlaksananya Promosi Industri Lokal	1 Keg		10.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Desa terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	15 Desa		90.000.000	12.900.000	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Desa terlaksananya musyawarah pembangunan desa	15 Desa		20.000.000	12.868.000	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Desa terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa	15 Desa		80.000.000	50.170.000	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	019	Lomba Tertib Administrasi Desa	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Desa lomba Tertib Administrasi Desa	15 Desa		30.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Bulan Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Bulan		25.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah kegiatan kesadaran masyarakat di tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-nilai berbaga dan bernegara	4 Keg		70.000.000	0	Kecamatan Karanganyar

04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentruman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Bulan Terfasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	1 Keg	45.000.000	45.000.000	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN KARANGANYAR	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	1 Keg	50.000.000	59.019.800	Kecamatan Karanganyar
04	06	39	083	Fasilitator dan Koordinasi Penanganan daerah Rawan Air Bersih	KECAMATAN KARANGANYAR	JUMLAH RAPAT KOORDINASI PENANGANAN DAERAH RAWAN AIR BERSIH	3 Kali	10.000.000	0	Kecamatan Karanganyar
TOTAL								1.320.000.000	494.704.300	

Kecamatan Doro

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			183.680.000	174.056.400		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Doro	jumlah bulan yg terpenuhi dlm penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21.300.000	21.300.000	Kecamatan Doro
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Doro	jumlah bulan yg terpenuhi dlm penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	33.580.000	30.516.400	Kecamatan Doro
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Doro	jumlah bulan terpenuhi yg terpenuhi dlm rangka penyediaan ATK dan cetak pengandaan	12 Bulan	20.000.000	19.200.000	Kecamatan Doro
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Doro	jumlah bulan terpenuhi dlm rangka penyediaan peralatan rumah tangga dan kompen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	14.000.000	10.048.000	Kecamatan Doro
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Doro	jumlah bulan terpenuhi dlm rangka rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	53.000.000	51.192.000	Kecamatan Doro
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Doro	jumlah bulan terpenuhi dlm penyediaan jasa kebersihankantor dan jasa tenaga lainnya	12 Bulan	41.800.000	41.800.000	Kecamatan Doro
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				208.694.000	73.987.800	

00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Doro	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	3 Unit	50.000.000	20.436.800	Kecamatan Doro
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Doro	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 Unit	55.000.000	0	Kecamatan Doro
00	00	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Doro	Jumlah mobil jabatann dan kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan	4 Unit	31.694.000	31.694.000	Kecamatan Doro
00	00	02	029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kecamatan Doro	jumlah mebelair yang mendapatkan pemeliharaan	8 Buah	2.000.000	0	Kecamatan Doro
00	00	02	153	Pengadaan peralatan Kantor,Rumah tangga dan Mebelair	Kecamatan Doro	Prosentase kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana kantor	12 Bulan	70.000.000	21.857.000	Kecamatan Doro
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.700.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Doro	jumlah aparatur yg mengikuti diklat	2 Orang	3.700.000	0	Kecamatan Doro
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				370.600.000	127.960.100	
04	06	39	001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kecamatan Doro	Jumlah promosi industri lokal yang dilaksanakan dlm satu tahun	1 Keg	15.000.000	0	Kecamatan Doro
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Doro	jumlah bulan yg terpenuhi dlm pembinaan organisasi kepemudaan dan fasilitasi pusat informasi dan konsultasi remaja tk Kecamatan	12 Bulan	65.000.000	0	Kecamatan Doro
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Doro	Terselenggaranya murenbang tingkat desa dan kecamatan	2 Keg	18.000.000	8.240.000	Kecamatan Doro
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Doro	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan desa	14 Desa	49.000.000	29.726.100	Kecamatan Doro
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Doro	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan PKK	14 Desa	25.000.000	14.162.000	Kecamatan Doro
04	06	39	007	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Doro	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat	1 Tahun	22.600.000	22.600.000	Kecamatan Doro
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Doro	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka fasilitasi pelayanan administrai terpadu	12 Bulan	16.000.000	6.070.000	Kecamatan Doro
04	06	39	022	Fasilitasi Promosi Pariwisata	Kecamatan Doro	Jumlah terfasilitasinya Kegiatan fasilitasi Promosi Wisata	3 Keg	45.000.000	0	Kecamatan Doro
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Doro	Terselenggaranya Upacara - upacara Hari Besar nasional	3 Keg	60.000.000	0	Kecamatan Doro

04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Doro	Jumlah Bulan yang terpenuhi dalam rangka penyelenggaraan apresiasi dan kreatifitas seni budaya tingkat Kecamatan	5 Keg	10.000.000	9.198.000	Kecamatan Doro
04	06	39	031	Pendataan Kegiatan Usaha Yang Belum Berijin	Kecamatan Doro	Jumlah bulan yang terpenuhi dlm rangka pendataan usaha yang belum berijin	12 Bulan	15.000.000	0	Kecamatan Doro
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Doro	Jumlah Terfasilitasinya kegiatan Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	12 Bulan	30.000.000	37.964.000	Kecamatan Doro
TOTAL								766.674.000	376.004.300	

Kecamatan Talun

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		264.960.000	208.689.400			
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Talun	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sumber daya air, listrik dan telpon	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	Kecamatan Talun
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Talun	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	35.000.000	35.000.000	Kecamatan Talun
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	27.000.000	26.000.000	Kecamatan Talun
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pemenuhan peralatan rumah tangga, alat listrik dan penerangan bangunan	12 Bulan	20.000.000	16.095.000	Kecamatan Talun
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pemenuhan perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah dan pemenuhan kebutuhan snack rapat dan minum harian pegawai	12 Bulan	93.960.000	50.380.000	Kecamatan Talun
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pemenuhan jasa kebersihan kantor dan tenaga jaga malam	12 Bulan	49.000.000	41.214.400	Kecamatan Talun
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				399.000.000	115.455.800	
00	00	02	005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Talun	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	2 Unit	40.000.000	20.799.800	Kecamatan Talun
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Talun	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas camat yang terpelihara	2 Unit	45.000.000	31.074.000	Kecamatan Talun
00	00	02	023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Talun	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pemeliharaan kendaraan jabatan dan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	35.000.000	32.512.000	Kecamatan Talun

00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, komputer dan printer	12 Bulan	9.000.000	8.125.000	Kecamatan Talun
00	00	02	102	Pengadaan Peralatan Kantor, RT dan Mebelair	Kecamatan Talun	Jumlah komputer, laptop, mebeleur dan peralatan kantor	5 Buah	70.000.000	22.945.000	Kecamatan Talun
00	00	02	129	Pembangunan Pagar Keliling Kantor	-	Jumlah pagar keliling yang tercukupi	1 Unit	200.000.000	0	Kecamatan Talun
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Talun	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pengiriman peserta Bintek/Diklat	12 Bulan	10.000.000	0	Kecamatan Talun
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				543.000.000	171.452.200	
04	06	39	001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kecamatan Talun	Jumlah pameran yang diikuti dalam promosi unggulan lokal dan fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup	2 Keg	22.000.000	0	Kecamatan Talun
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Talun	Jumlah musrenbangdesa dan musrenbang kecamatan yang terlaksana	11 Kali	10.000.000	6.700.000	Kecamatan Talun
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Talun	jumlah bulan dalam pembinaan dan pengawasan desa, serta fasilitasi pelayanan masyarakat berbasis stelsel aktif petugas	12 Bulan	80.000.000	44.348.200	Kecamatan Talun
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam pembinaan PKK	12 Bulan	35.000.000	25.580.000	Kecamatan Talun
04	06	39	009	Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Talun	jumlah kegiatan lomba olahraga yang terfasilitasi dan jumlah kegiatan pelaksanaan PIKR	10 Keg	45.000.000	0	Kecamatan Talun
04	06	39	014	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Talun	jumlah bulan dalam fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan survey indkeks kepuasan masyarakat	12 Bulan	26.000.000	24.500.000	Kecamatan Talun
04	06	39	015	Pengadaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Kecamatan Talun	Jumlah aplikasi pelayanan perijinan online dan SIMDASA	2 Paket	46.000.000	8.150.000	Kecamatan Talun
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Talun	Jumlah bulan terlaksananya pelayanan terpadu kecamatan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Talun
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Talun	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	2 Keg	80.000.000	0	Kecamatan Talun
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talun	Terlaksananya kegiatan apresiasi seni budaya tingkat kecamatan dan lomba sekolah sehat	6 Keg	66.000.000	4.026.000	Kecamatan Talun

04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam fasilitasi peningkatan keamanan dan ketentraman tingkat kecamatan dan desa	12 Bulan	20.000.000	4.606.400	Kecamatan Talun
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Talun	Jumlah bulan dalam fasilitasi forum kesehatan kecamatan, pelaksanaan PIKR, fasilitasi pengelolaan lingkungan hidup, pendampingan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak	12 Bulan	83.000.000	38.541.600	Kecamatan Talun
04	06	39	074	Fasilitasi Pembentukan Desa Layak Anak	Kecamatan Talun	Jumlah desa yang terfasilitasi pembentukan desa layak anak	10 Desa	15.000.000	0	Kecamatan Talun
TOTAL								1.216.960.000	495.597.400	

Kecamatan Lebakbarang

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00	NON URUSAN								
00	NON URUSAN								
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			231.300.000	170.933.800		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	20.500.000	14.812.000	Kecamatan Lebakbarang
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	35.300.000	35.100.000	Kecamatan Lebakbarang
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan ATK kantor dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	28.500.000	18.969.200	Kecamatan Lebakbarang
00	00	01	013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5.000.000	4.460.500	Kecamatan Lebakbarang
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dalam daerah dan makan minum bagi ASN	12 Bulan	94.000.000	53.632.100	Kecamatan Lebakbarang
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah Bulan yang terpenuhi untuk jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga malam	12 Bulan	48.000.000	43.960.000	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.880.000	175.067.000	
00	00	02	001 Penataan Lingkungan Kantor	Kecamatan Lebakbarang	Tertatanya lingkungan kantor yang representatif	1 Paket	150.000.000	143.200.000	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua)	2 Unit	50.000.000	0	Kecamatan Lebakbarang

00	00	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara dalam 1 (satu) tahun	1 Unit	25.000.000	0	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam dalam pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	34.000.000	31.867.000	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	039	Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah tugu batas dan monumen perjuangan yang terpelihara dalam 1(satu) tahun	2 Paket	11.880.000	0	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	044	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dalam 1 (satu) Tahun	1 Paket	150.000.000	0	Kecamatan Lebakbarang
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah Peralatan Kantor Penunjang Kerja	1 Paket	30.000.000	0	Kecamatan Lebakbarang
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				393.750.000	100.180.800	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah penyelenggaraan Musren tingkat Desa (11 desa) dan Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun	12 Kali	21.000.000	8.572.000	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pembinaan dan pengawasan tingkat Desa dalam 1 tahun	12 Bulan	57.000.000	18.040.500	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Lebakbarang	Terlaksananya Pelayanan PATEN dengan tertib dalam 1 tahun	12 Bulan	20.500.000	1.150.000	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	022	Fasilitasi Promosi Pariwisata	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah Kegiatan promosi pariwisata dan promosi industri lokal	2 Kali	35.250.000	0	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Lebakbarang	Terlaksananya upacara hari besar	3 Kali	66.000.000	0	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lebakbarang	Terlaksananya kegiatan Apresiasi dan Seni Budaya dan Jumlah bulan Organisasi Pemuda yang dibina dan jumlah kegiatan turnamen yang diselenggarakan tingkat kecamatan dalam 1 tahun	12 Bulan	91.500.000	8.266.800	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pembinaan PKK Desa dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	12 Bulan	62.500.000	47.981.500	Kecamatan Lebakbarang
04	06	39	050	Fasilitasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Kecamatan Lebakbarang	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pengamanan (PAM) dan patroli Wilayah Kecamatan dan pelayanan pengaduan masyarakat dalam 1 Tahun	12 Bulan	40.000.000	16.170.000	Kecamatan Lebakbarang
TOTAL								1.075.930.000	446.181.600	

Kecamatan Kandangserang

						Rencana Tahun 2020	Pagu Indikatif	Perubahan	SKPD Penanggung jawab
--	--	--	--	--	--	---------------------------	-----------------------	------------------	------------------------------

Kode				Urusan Bidang	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	
1	2	3	4			5	6			
00				NON URUSAN						
00	00			NON URUSAN						
00	00	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				344.250.000	226.914.300	
00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kandangserang	Pembayaran rekening Listrik,Air,dan Jaringan Internet dan surat kabar	1 Tahun	32.000.000	32.000.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kandangserang	Terbayarnya pajak kendaraan Dinas /Operasioanal	6 Unit	5.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kandangserang	Terpenuhinya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	30.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kandangserang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.000.000	32.502.300	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kandangserang	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12.500.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kandangserang	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor	1 Tahun	7.250.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kandangserang	Penyediaan Gas LPG 12 Kg, Bahan dan alat Pembersih	12 Bulan	12.000.000	12.818.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kandangserang	Makan dan Minum harian Pegawai, rapat dan tamu	11 Bulan	37.500.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kandangserang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	5.000.000	46.428.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Kandangserang	Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke desa dan ke Kabupaten	1 Tahun	30.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Kandangserang	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan tenaga lainnya	12 Bulan	125.000.000	93.050.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	01	059	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Kecamatan Kandangserang	Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	20.000.000	10.116.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				159.500.000	55.780.000	
00	00	02	012	Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya	Kecamatan Kandangserang	Pemeliharaan Komputer,Printer , LCD	1 Tahun	12.500.000	19.700.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Kandangserang	pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	12.500.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kandangserang	Pemeliharaan kendaraan Dinas Camat 1	1 Tahun	40.000.000	35.000.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	02	029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kecamatan Kandangserang	Pemeliharaan Meubeler Kantor	1 Paket	12.000.000	90.000	Kecamatan Kandangserang
00	00	02	039	Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas	Kecamatan Kandangserang	Pemeliharaan Tugu Batas Kecamatan	4 Buah	60.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
00	00	02	131	Pengadaan Genset	Kecamatan Kandangserang	Pengadaan Genset Kecamatan	1 Unit	12.500.000	990.000	Kecamatan Kandangserang

00	00	02	139	Pemeliharaan Rutin/Berkala Website	Kecamatan Kandangserang	Pemeliharaan Website kecamatan	1 Paket	10.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
01	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
01	05	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				50.000.000	0	
01	05	17	003	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Kegiatan Nilai luhur Bangsa	1 Paket	50.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
02				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
02	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				10.000.000	0	
02	07	15	025	Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Kandangserang	Terfasilitasinya Pengaduan Masyarakat	12 Bulan	10.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
02	16			KEBUDAYAAN						
02	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				45.000.000	5.640.000	
02	16	17	022	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Apresiasi dan delar budaya tingkat kecamatan	1 Paket	45.000.000	5.640.000	Kecamatan Kandangserang
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				97.500.000	102.557.000	
04	06	39	001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Kaje Expo	1 Keg	5.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan kepemudaan	12 Bulan	15.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Musrenbang Desa	1 Paket	18.000.000	18.000.000	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Pengawasan Desa	14 Desa	12.000.000	32.432.000	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Kandangserang	Terlaksananya Kegiatan PKK	14 Desa	20.000.000	13.000.000	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	007	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Kandangserang				9.900.000	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	019	Lomba Tertib Administrasi Desa	Kecamatan Kandangserang	Terciptanya Tertib Administrasi	14 Desa	7.500.000	0	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Kandangserang	Terciptanya Pelayanan Terpadu Kecamatan	12 Bulan	10.000.000	0	Kecamatan Kandangserang
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	-	Tersedianya Komunikasi Forum Kesehatan Masyarakat	1 Paket	10.000.000	29.225.000	Kecamatan Kandangserang
TOTAL								706.250.000	390.891.300	

Kecamatan Panninggaran

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	10	12		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			498.000.000	249.155.560		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	22.500.000	22.500.000	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	43.500.000	42.811.000	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	35.500.000	31.989.200	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	59.500.000	53.834.760	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	93.000.000	34.589.000	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	038 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Kecamatan Panninggaran	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja kantor	2 Orang	44.000.000	63.431.600	Kecamatan Panninggaran
00	00	01	053 Penataan Lingkungan Kecamatan	Kecamatan Panninggaran	-	1 Paket	200.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				357.000.000	41.425.400	
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Panninggaran	-	1 Paket	19.000.000	6.766.400	Kecamatan Panninggaran
00	00	02	023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	35.000.000	34.659.000	Kecamatan Panninggaran
00	00	02	029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	3.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
00	00	02	044 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Panninggaran		1 1 Paket	250.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
00	00	02	166 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Kecamatan Panninggaran	-	2 Unit	50.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
00	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				6.000.000	0	
00	00	05	001 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Panninggaran	-	2 -	6.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
04			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06		PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				360.000.000	98.059.000	
04	06	39	001 Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kecamatan Panninggaran	Terlaksananya promosi industri iokal	1 Keg	15.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	003 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Panninggaran	-	1 Keg	24.000.000	18.332.200	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	005 Pembinaan dan Pengawasan Desa	Musyawarah Pembangunan Desa	-	12 Bulan	50.000.000	30.480.000	Kecamatan Panninggaran

04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	54.000.000	15.974.600	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	007	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	19.000.000	15.142.400	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	18.000.000	14.099.800	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	50.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	066	Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	113.000.000	4.030.000	Kecamatan Panninggaran
04	06	39	070	Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan	Kecamatan Panninggaran	-	12 Bulan	17.000.000	0	Kecamatan Panninggaran
TOTAL								1.221.000.000	388.639.960	

Kecamatan Kesesi

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		200.500.000	196.084.200			
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kesesi	Tersedianya jasa komunikasi listrik,air dan internet	12 Bulan	21.000.000	22.600.000	Kecamatan Kesesi
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kesesi	Tersedianya jasa pengguna anggaran dan pejabat penatausahaan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	Kecamatan Kesesi
00	00	01	008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kesesi	tersedianya biaya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	42.000.000	41.993.700	Kecamatan Kesesi
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kesesi	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	23.000.000	19.782.000	Kecamatan Kesesi
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kesesi	tersedianya alat rumah tangga	12 Bulan	7.000.000	36.955.600	Kecamatan Kesesi
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kesesi	tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	77.500.000	44.752.900	Kecamatan Kesesi
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				277.600.000	108.444.500	
00	00	02	001 Penataan Lingkungan Kantor	kecamatan kesesi				99.930.000	Kecamatan Kesesi
00	00	02	005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kecamatan kesesi	tercukupnya kendaraan dinas	12 Bulan	100.000.000	0	Kecamatan Kesesi
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kecamatan kesesi	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	65.000.000	45.936.900	Kecamatan Kesesi
00	00	02	024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kecamatan kesesi	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	31.600.000	22.492.000	Kecamatan Kesesi

00	00	02	062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan kesesi	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15.000.000	12.185.000	Kecamatan Kesesi
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kecamatan kesesi	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	66.000.000	27.830.600	Kecamatan Kesesi
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				5.000.000	0	
00	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	kecamatan kesesi	tersedianya aparatur yang baik	12 Bulan	5.000.000	0	Kecamatan Kesesi
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				435.000.000	90.308.600	
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	kecamatan kesesi	terbinanya organisasi kepemudaan	12 Bulan	25.000.000	0	Kecamatan Kesesi
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	kecamatan kesesi	tersusunya prioritas pembangunan desa dan kecamatan	12 Bulan	20.000.000	4.794.800	Kecamatan Kesesi
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	kecamatan kesesi	aparatur desa se kecamatan kesesi yang mendapat pembinaan dan pengawasan	12 Bulan	40.000.000	14.629.900	Kecamatan Kesesi
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Kesesi	Tersedianya fasilitas kegiatan peningkatan peran serta perempuan dan anak di desa	12 Bulan	130.000.000	27.998.600	Kecamatan Kesesi
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	kecamatan kesesi	tersedianya pelayanan administrasi di kecamatan	12 Bulan	20.000.000	0	Kecamatan Kesesi
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	kecamatan kesesi	terlaksananya hari besar nasional	12 Bulan	70.000.000	0	Kecamatan Kesesi
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	kecamatan kesesi	tersedianya fasilitas kegiatan seni budaya ,MTQ dan syawalan	12 Bulan	50.000.000	0	Kecamatan Kesesi
04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	kecamatan kesesi	terlaksananya kegiatan peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat	12 Bulan	80.000.000	42.885.300	Kecamatan Kesesi
TOTAL								918.100.000	394.837.300	

Kecamatan Petungkrivono

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				340.200.000	247.611.550	

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi Air dan Listrik (Bulan)	12 Bulan	20.000.000	19.800.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Petungkriyono	terpeliharanya Kendaraan Dinas Kec. Petung	1 Paket	40.000.000	40.000.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12 Bulan	40.000.000	40.000.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemberian Honorarium pegawai honorer/tdk tetap	12 Bulan	62.200.000	61.840.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	28.000.000	21.299.550	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan tersedianya barang peralatan rumah Tangga	12 Bulan	26.000.000	0	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	121.000.000	61.752.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	01	049	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan	3.000.000	2.920.000	Kecamatan Petungkriyono
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				225.000.000	20.941.400	
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 (unit)	3 Unit	90.000.000	0	Kecamatan Petungkriyono
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Petungkriyono	12 Bulan	55.000.000	20.941.400	Kecamatan Petungkriyono
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Tersedianya Sarana prasarana Peralatan Kantor	12 Bulan	80.000.000	0	Kecamatan Petungkriyono
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				385.000.000	150.306.350	
04	06	39	001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah kegiatan Terlaksananya Promosi Industri lokal (kegiatan)	1 Keg	10.000.000	0	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Terlaksananya pelaksanaan Musyawarah pembangunan di desa / kecamatan (kali)	10 Kali	25.000.000	15.000.000	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa (desa)	9 Desa	50.000.000	20.330.000	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Terlaksananya fasilitasi peran perempuan dan anak pedesaan (bulan)	12 Bulan	65.000.000	32.418.800	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	012	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Bulan Tertanganinya penanganan permasalahan ditingkat kecamatan (bulan)	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah bulan Tersedianya Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (bulan)	12 Bulan	75.000.000	9.999.900	Kecamatan Petungkriyono

04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Terlaksananya pelaksanaan Upacara dalam Rangka peningkatan kesadaran masyarakat tingkat kecamatan terhadap nilai-nilai luhur Bangsa dan Negara (kali)	3 Kali	60.000.000	0	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah Terlaksananya penyelenggaraan apresiasi kreatifitas seni budaya tingkat kecamatan (kali)	1 Kali	70.000.000	5.000.000	Kecamatan Petungkriyono
04	06	39	039	Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Petungkriyono	Jumlah terlaksananya fasilitasi forum kesehatan tingkat kecamatan (bulan)	12 Bulan	20.000.000	57.557.650	Kecamatan Petungkriyono
TOTAL								950.200.000	418.859.300	

Kecamatan Wonokerto

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		264.300.000	170.217.850			
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	26.800.000	17.640.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	40.000.000	28.984.200	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	8 Unit	13.000.000	6.559.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	20.500.000	17.067.850	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	27.500.000	16.992.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	35.000.000	5.200.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Desa Fasilitasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tingkat Kecamatan	12 Bulan	65.000.000	42.485.800	Kecamatan Wonokerto
00	00	01	049 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Unit Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Mobil dan Motor Roda 2	4 Unit	36.500.000	35.289.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				465.750.000	52.956.000	
00	00	02	001 Penataan Lingkungan Kantor	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Paket Dalam Kegiatan Penataan Halaman Kantor Kecamatan	1 Paket	150.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	015 Pengadaan mebeleur	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Unit dalam pembelian Peralatan Meubuleur	4 Unit	7.250.000	0	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Gedung Kantor dalam Pemmeliharaan Rutin Gedung Berkala	1 Unit	7.500.000	10.956.000	Kecamatan Wonokerto

00	00	02	044	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Gedung / Paket dalam Rehabilitasi Sedang/Berat dalam Rehab Gedung dan Peninggihan Gedung Kapercam Wonokerto	1 Paket	150.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	101	Penataan Ruang Kantor	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Paket Dalam Kegiatan Penataan Kantor Kecamatan	1 Paket	35.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Unit dalam pembelian Peralatan Kerja	4 Unit	38.000.000	42.000.000	Kecamatan Wonokerto
00	00	02	166	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Kecamatan Wonokerto	Jumlah unit dalam pembelian Kendaraan Dinas	3 Unit	78.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				555.000.000	126.475.300	
04	06	39	002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Kegiatan Dalam Organisasi Kepemudaan	4 Keg	60.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	11 Desa	26.500.000	16.907.600	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	11 Desa	114.500.000	41.986.600	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Bulan Dalam Kegiatan Peran Perempuan DI Pedesaan	12 Bulan	99.000.000	21.751.200	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	12 Bulan	32.000.000	11.720.000	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Kegiatan dalam kegiatan Peningkatan kesadaran Masyarakat di tingkat Kecamatan terhadap nilai nilai luhur bangsa dan bernegara	4 Keg	80.000.000	0	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	KECAMATAN WONOKERTO	JUMLAH BULAN DALAM PEMBAYARAN	3 Keg	115.500.000	18.878.000	Kecamatan Wonokerto
04	06	39	026	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	Kecamatan Wonokerto	Jumlah Bulan dalam Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa	12 Bulan	27.500.000	15.231.900	Kecamatan Wonokerto
TOTAL								1.285.050.000	349.649.150	

Kecamatan Siwalan

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8
00	NON URUSAN						
00	NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		185.600.000	166.999.875	

00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	27.800.000	21.480.000	Kecamatan Siwalan
00	00	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	29.000.000	28.320.000	Kecamatan Siwalan
00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya	12 Bulan	41.800.000	41.800.000	Kecamatan Siwalan
00	00	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	12 Bulan	8.000.000	8.000.000	Kecamatan Siwalan
00	00	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	27.500.000	16.761.100	Kecamatan Siwalan
00	00	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	6.500.000	22.772.775	Kecamatan Siwalan
00	00	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	21.000.000	18.566.000	Kecamatan Siwalan
00	00	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	24.000.000	9.300.000	Kecamatan Siwalan
00	00	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				344.000.000	263.703.150	
00	00	02	003	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Siwalan	Jumlah yang terpenuhi dalam pembangunan gedung kantor paten	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Kecamatan Siwalan
00	00	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Siwalan	Jumlah yang terpenuhi dalam pengadaan kendaraan dinas roda dua	2 Unit	50.000.000	0	Kecamatan Siwalan
00	00	02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Siwalan	-	-	27.000.000	17.836.150	Kecamatan Siwalan
00	00	02	023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kecamatan Siwalan	Jumlah bulan yang terpenuhi pemeliharaan mobil jabatan	1 Unit	32.000.000	26.320.000	Kecamatan Siwalan
00	00	02	104	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Siwalan	Terpenuhinya pegadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	35.000.000	19.547.000	Kecamatan Siwalan
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04	06			PEMERINTAHAN UMUM						
04	06	39		Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				238.000.000	86.149.425	
04	06	39	003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kecamatan Siwalan	Prosentase pelaksanaan musrenbang desa dan tingkat kecamatan	13 Desa	24.000.000	20.239.500	Kecamatan Siwalan
04	06	39	005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kecamatan Siwalan	Prosentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa	13 Desa	38.000.000	20.705.725	Kecamatan Siwalan
04	06	39	006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kecamatan Siwalan	Prosentase terlaksananya pembinaan peran perempuan dan anak dipedesaan disetiap desa	13 Desa	63.000.000	33.219.200	Kecamatan Siwalan
04	06	39	007	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kecamatan Siwalan	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	5 Kasus	20.000.000	9.160.000	Kecamatan Siwalan
04	06	39	021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Siwalan	Prosentase terlasananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	3 Orang	8.000.000	2.825.000	Kecamatan Siwalan

04	06	39	023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kecamatan Siwalan	Jumlah kegiatan peringatan tujuh belas agustus dan hari besar nasinal lainnya	3 Keg	50.000.000	0	Kecamatan Siwalan
04	06	39	024	Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Kecamatan Siwalan	Jumlah pementasan kreasi seni budaya di Tingkat Kecamatan	13 Desa	35.000.000	0	Kecamatan Siwalan
TOTAL								767.600.000	516.852.450	

Kecamatan Karangdadap

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab		
		Lokasi	Keluaran Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		
00			NON URUSAN						
00	00		NON URUSAN						
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			243.740.000	255.389.800		
00	00	01	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Bulan	30.000.000	25.160.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	01	007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa administrasi keuangan dan perbaikan perlatan kerja	12 Bulan	48.000.000	39.298.200	Kecamatan Karangdadap
00	00	01	014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik/penerangan, perlatan rumah tangga, dan Makanan dan Minuman	12 Bulan	40.500.000	71.521.600	Kecamatan Karangdadap
00	00	01	017 Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	28.000.000	26.360.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	01	018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	12 Bulan	32.600.000	28.500.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	01	040 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan yang terpenuhi tenaga kebersihan, jaga malam dan driver	12 Bulan	64.640.000	64.550.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				514.500.000	45.125.200	
00	00	02	015 Pengadaan mebeleur	Kec. Karangdadap	Prosentase pengadaan mebeleur yang terlaksana	100%	65.000.000	14.452.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	02	022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Karangdadap	Jumlah gedung yang terpelihara	3 Unit	33.000.000	1.836.200	Kecamatan Karangdadap
00	00	02	031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan jasa perizinan kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.500.000	28.837.000	Kecamatan Karangdadap
00	00	02	104 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangdadap	Prosentase pengadaan barang yang terlaksana	100%	76.000.000	0	Kecamatan Karangdadap

Kode	Urusan Bidang	Rencana Tahun 2020			Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020	SKPD Penanggung jawab
		Lokasi	Keluaran Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8
00 00 02 187	Pavingisasi Halaman Kantor	Kec. Karangdadap	Jumlah halaman yang dipaving	1 Lokasi	300.000.000	0	Kecamatan Karangdadap
00 00 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.300.000	0	
00 00 05 001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan terlaksananya diklat/kursus/pelatihan bagi pegawai	1 Bulan	3.300.000	0	Kecamatan Karangdadap
04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
04 06	PEMERINTAHAN UMUM						
04 06 39	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan				379.800.000	83.735.600	
04 06 39 001	Peningkatan Promosi Industri Lokal	Kec. Karangdadap	Jumlah produk unggulan lokal kecamatan yang dipromosikan	2 Buah	11.000.000	0	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 002	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kec. Karangdadap	Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	3 Keg	27.800.000	0	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 003	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Kec. Karangdadap	Jumlah musrenbangdes dan musrenbangkec yang dilaksanakan	12 Keg	18.000.000	8.305.000	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 005	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi pembinaan pengawasan desa, Linmas, dan lomba tertib desa	12 Bulan	69.000.000	31.146.200	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 006	Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan	Kec. Karangdadap	Prosentase terlaksananya koordinasi bidang kesehatan dan pembinaan PKK di setiap desa	100%	67.000.000	32.084.400	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 007	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan tersedianya unit penanganan aduan masyarakat	12 Bulan	16.000.000	12.200.000	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 021	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Karangdadap	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan PATEN	12 Bulan	53.000.000	0	Kecamatan Karangdadap
04 06 39 023	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara	Kec. Karangdadap	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar bangsa dan Apresiasi Kreativitas Seni Budaya yang terfasilitasi	4 Keg	118.000.000	0	Kecamatan Karangdadap
TOTAL					1.141.340.000	384.250.600	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI